

POLA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BATANGHARI

TAHUN 2012



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor 51 /KPTS/M/2012

Tentang

**POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BATANGHARI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berlandaskan pada wilayah sungai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006, Wilayah Sungai Batanghari merupakan wilayah sungai strategis nasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BATANGHARI.**
- KESATU** : Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Batanghari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- KEDUA** : Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Batanghari dimaksudkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Batanghari.
- KETIGA** : Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Batanghari dimaksudkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memuat:
- a. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
 - b. skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang;
 - c. strategi pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Kehutanan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
6. Gubernur Jambi.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
9. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air.
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.
11. Pertinggal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2012



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	5
1.3.1 Isu Strategis Nasional	5
1.3.2 Isu Strategis Lokal	6
BAB 2 KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI	6
2.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Terkait Lainnya	8
2.2 Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	11
2.3 Inventarisasi Data	14
2.3.1 Data Umum	14
2.3.2 Data Sumber Daya Air	20
2.3.3 Data Kebutuhan Air	26
2.3.4 Data Lain-lain.....	27
2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan	29
2.4.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air	29
2.4.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air.....	31
2.4.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air.....	33
2.4.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air	34
2.4.5 Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	34
2.5 Identifikasi Potensi Yang Bisa Dikembangkan.....	34
2.5.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air	34
2.5.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	36
2.5.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air.....	37
2.5.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air	38

2.5.5 Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	38
BAB 3 ANALISA DATA	39
3.1 Asumsi, Kriteria dan Standar	39
3.2 Skenario Pengelolaan SDA WS Batanghari.....	63
3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	65
BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS BATANGHARI.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Administrasi dalam WS Batanghari.....	2
Tabel 1.2	Fluktuasi Muka Air Tahun 1999 s/d 2002	6
Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk di WS Batanghari	15
Tabel 2.2	Kondisi Pos Hidrologi di WS Batanghari.....	21
Tabel 2.3	Kondisi Iklim DAS Batanghari Hulu, Tengah dan Hilir	22
Tabel 2.4	Debit Air Sungai Rata - Rata Bulanan di Wilayah DAS Batanghari Hulu).....	24
Tabel 2.5	Debit Sungai Pada Berbagai Lokasi Pengambilan Air Sungai	25
Tabel 2.6	Kebutuhan air di WS Batanghari.....	26
Tabel 2.7	Danau - danau di Provinsi Jambi yang Berfungsi sebagai Konservasi SDA	35
Tabel 2.8	Sungai yang Dimanfaatkan sebagai Jalur Transportasi	36
Tabel 2.9	Penyebaran Jenis Tanah di WS Batanghari.....	37
Tabel 3.1	DAS Kritis di WS Batanghari.....	41
Tabel 3.2	Besarnya Sedimentasi Setiap DAS Tahun 2008.....	42
Tabel 3.3	Pemantauan Kualitas Air Sungai di WS Batanghari.....	43
Tabel 3.4	Ketersediaan Air WS Batanghari.....	45
Tabel 3.5	Proyeksi Jumlah Penduduk di WS DAS Batanghari.....	48
Tabel 3.6	Kebutuhan Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri.....	49
Tabel 3.7	Kebutuhan Air Irigasi.....	51
Tabel 3.8	Kebutuhan Air Ternak	52
Tabel 3.9	Proyeksi Kebutuhan Air di WS Batanghari.....	53
Tabel 3.10	Tabel Neraca Air Tahunan.....	54
Tabel 3.11	Neraca Air 20 Tahun.....	55
Tabel 3.12	Daerah Rawan Banjir WS Batanghari	57
Tabel 3.13	Kerusakan Sungai WS Batanghari.....	58
Tabel 4.1	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Tinggi (Aspek Konservasi SDA).....	69
Tabel 4.2	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Tinggi (Aspek Pendayagunaan SDA).....	71
Tabel 4.3	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Tinggi (Aspek Pengendalian Daya Rusak Air) ...	74

Tabel 4.4	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Tinggi (Aspek Sistem Informasi SDA).....	76
Tabel 4.5	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Tinggi (Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat).....	77
Tabel 4.6	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Sedang (Aspek Konservasi SDA).....	78
Tabel 4.7	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Sedang (Aspek Pendayagunaan SDA).....	80
Tabel 4.8	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Sedang (Aspek Pengendalian Daya Rusak Air).....	83
Tabel 4.9	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Sedang (Aspek Sistem Informasi SDA)	85
Tabel 4.10	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Sedang (Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat).....	86
Tabel 4.11	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Rendah (Aspek Konservasi SDA).....	87
Tabel 4.12	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Rendah (Aspek Pendayagunaan SDA).....	89
Tabel 4.13	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Rendah (Aspek Pengendalian Daya Rusak Air).....	92
Tabel 4.14	Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Rendah (Aspek Sistem Informasi SDA)	94

Tabel 4.15 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Batanghari Skenario Ekonomi Rendah (Aspek Pemberdayaan
dan Peningkatan Peran Masyarakat).....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Sungai Batanghari dan Wilayah Administrasi	3
Gambar 2.1 Perkembangan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2002 – 2006	16
Gambar 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2002 – 2006	17
Gambar 2.3 Lokasi dan Jenis Pertambangan di Provinsi Jambi.....	19
Gambar 2.4 Lokasi Pos Hidrologi di WS Batanghari	23
Gambar 2.5 Peta Tataguna Lahan di WS Batanghari.....	28
Gambar 2.6 Prosentase Tata Guna Lahan di WS Batanghari	28
Gambar 3.1 Prosentase Luas Lahan Kritis pada WS Batanghari	40
Gambar 3.2 Grafik Neraca Air Tahunan.....	55
Gambar 3.3 Grafik Neraca Air 20 Tahun.....	56
Gambar 3.4 Peta Lokasi Kerusakan Pantai	59
Gambar 3.5 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Rendah	60
Gambar 3.6 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Sedang.....	62
Gambar 3.7 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Tinggi	64
Gambar4.1 Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Konservasi Sumber Daya Air).....	96
Gambar 4.2 Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari(Aspek Konservasi Sumber Daya Air(lanjutan))	97
Gambar 4.3. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air)	98
Gambar 4.4. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Pengendalian Daya Rusak Air)	99
Gambar 4.5. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air)	100
Gambar 4.6. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air (lanjutan1)).....	101

Gambar 4.7. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air (lanjutan 2)).....	102
Gambar 4.8. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan terus meningkat dari tahun ketahun, yang diakibatkan karena pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Di lain pihak ketersediaan sumber daya air semakin terbatas dan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan, pencemaran, perubahan ekologi dan sebagainya.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik akibat terjadinya benturan kepentingan antara permintaan (*demand*) dan pemenuhan (*supply*) ketersediaan sumber daya air. Oleh karena itu perlu upaya secara seimbang antara pengembangan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, baik dilihat dari aspek teknis maupun dari aspek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat diberbagai keperluan, diperlukan suatu kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 14 huruf b menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Sesuai dengan pasal tersebut, kewenangan penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari yang selanjutnya disingkat WS Batanghari merupakan wilayah sungai lintas Provinsi, berada di tangan Pemerintah.

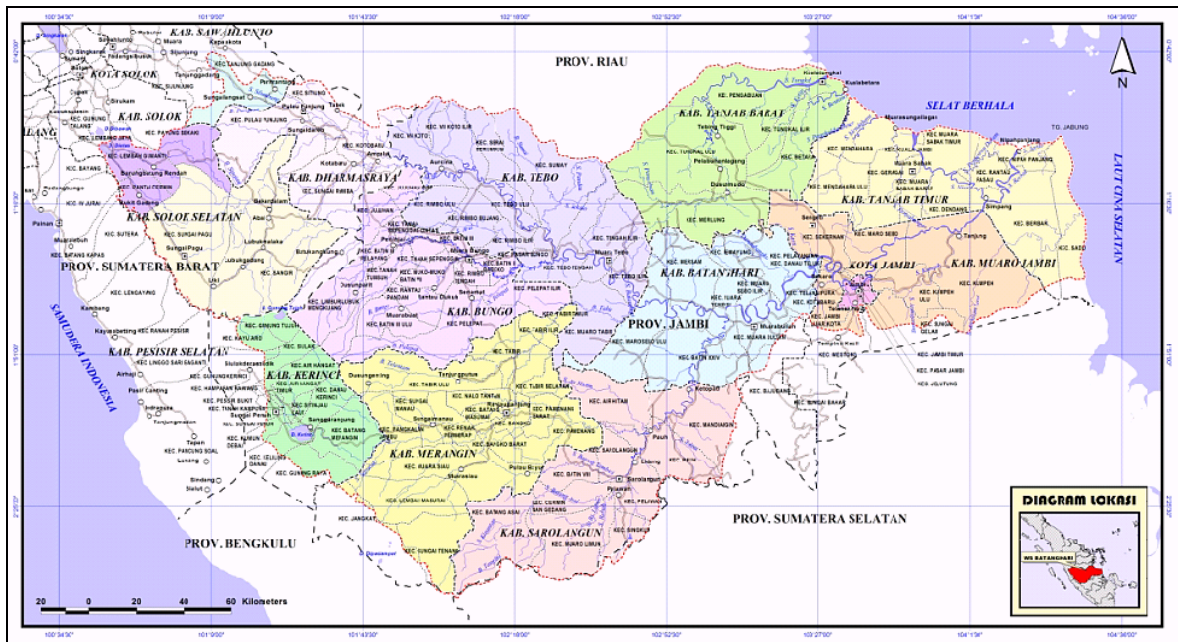
Secara administrasi Pemerintahan, wilayah sungai Batanghari terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu yang berada di Provinsi Jambi yang meliputi Kabupaten Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin,

Kerinci dan Kota Jambi, sebagian lagi berada di Provinsi Sumatera Barat meliputi Kabupaten Dharmasraya, Solok, Solok Selatan dan Sawahlunto. Bila ditinjau dari jumlah Kabupaten dan Kecamatan dapat dirinci bahwa untuk WS Batanghari terdapat 14 Kabupaten/Kota dengan 124 kecamatan. Wilayah administrasi yang termasuk dalam WS Batanghari disajikan pada **Tabel 1.1** dan **Gambar 1.1** berikut ini.

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi dalam WS Batanghari

DAS	PROVINSI	KABUPATEN
Batanghari Hulu (1.277.947 Ha)	Jambi Sumatera Barat	Bungo, Tebo, Kerinci Solok, Solok Selatan, Sawah-lunto/Sijunjung, Dharmasraya
Batang Tebo (538.725 Ha)	Jambi	Bungo, Tebo, Kerinci
Batang Tabir (381.329 Ha)	Jambi	Merangin, Tebo, Batanghari, Kerinci, Batanghari, Sarolangun
Batang Merangin-Tembesi (1.281.907 Ha)	Jambi	Merangin, Kerinci
Batanghari Hilir (979.559 Ha)	Jambi	Kota Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari

Sumber: Studi Pemanfaatan Ruang DAS Batanghari (2004) dan pertampalan peta 2008



Sumber: RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Sumatera Barat.

Gambar 1.1 Wilayah Sungai Batanghari dan Wilayah Administrasi

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari

Maksud disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari adalah merumuskan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya air bagi semua pemilik kepentingan (*stakeholder*).

Sasaran disusunnya pola pengelolaan sumber daya air adalah tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan yang antara lain meliputi:

1. terkendalinya potensi konflik air;
2. terkendalinya pemanfaatan air tanah;
3. meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;

4. berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
5. terkendalinya pencemaran air;
6. terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis;
7. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
8. meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi;
9. terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
10. tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat, dan mudah diakses;
11. pulihnya kondisi sumber air dan prasarana sumber daya air;
12. ketersediaan air baku bagi masyarakat; dan
13. pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan.

Visi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari adalah terwujudnya pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan secara kualitas dan kuantitas dan mampu menunjang pertumbuhan berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sungai Batanghari.

Misi pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Batanghari yaitu:

1. konservasi sumber daya air yang berkelanjutan;
2. pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas;
3. pengendalian daya rusak air (termasuk kekeringan);
4. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah; dan
5. peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air.

1.3 Isu-isu Strategis

1.3.1 Isu Strategis Nasional

Dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, memperhatikan isu-isu strategis nasional, meliputi:

1. MDG's

Dalam *Millennium Development Goals* (MDG's) 2015 disebutkan bahwa 80% penduduk di wilayah sungai dapat terlayani kebutuhan air bersihnya. Oleh karena itu perlu disusun skenario pemenuhannya dalam pola pengelolaan sumber daya air.

2. Ketahanan Pangan

Pemerintah telah mencanangkan terwujudnya swasembada pangan secara nasional, hal tersebut tentu menjadi landasan dan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengusahakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang dicanangkan.

3. *Global Climate Changes*

Isu adanya perubahan iklim global harus mendapat perhatian semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di WS Bantanghari, khususnya terkait dengan emisi gas karbon pada daerah rawa. Oleh karenanya kegiatan konsevasi sumber daya air menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

4. Ketersediaan Energi

Ketersediaan energi nasional akan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah oleh karena itu dalam pengelolaan sumber daya air WS Batanghari perlu diantisipasi dengan mengembangkan energi air, *micro hydro*, dan *hydro plant power*.

1.3.2 Isu Strategis Lokal

1. Degradasi DAS

Berdasarkan pengamatan muka air sungai Batanghari seperti terlihat pada Tabel 1.2 terlihat bahwa terjadi degradasi DAS di hulu, pada musim kemarau sungai tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai transportasi air karena muka air yang surut, sedimentasi tinggi pada muara dan dasar sungai, sehingga beberapa kapal berukuran besar tidak dapat masuk sungai dan merapat di pelabuhan. Hal tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi setempat.

Tabel 1.2 Fluktuasi Muka Air Tahun 1999 s/d 2002

No	Tahun	Elevasi Minimum	Elevasi Maksimum	Selisih El. Maks - Min
1	1999	7.00	12.70	5.70
2	2000	7.25	13.25	6.00
3	2001	7.15	13.00	5.85
4	2002	7.00	13.76	6.76
	Rerata	7.10	13.17	6.07

Sumber : Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai ,2002.

2. Penurunan Pelayanan/Kinerja Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa

Dalam kurun waktu \pm 3 - 4 tahun terakhir telah terjadi penurunan fungsi pelayanan/kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi dan rawa jambi yang berdampak kepada menurunnya produktifitas areal irigasi dan rawa di propinsi Jambi, sehingga berdampak kepada penurunan produksi padi pada khususnya dan tanaman pangan pada umumnya.

3. Meningkatnya frekuensi Banjir

Dalam kurun waktu \pm 5 tahun terakhir frekuensi banjir pada WS Batanghari meningkat disertai dengan bertambahnya luas genangan banjir. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya perubahan tutupan lahan akibat alih fungsi lahan.

4. Semakin Menurunnya Kualitas Air Sungai

Sungai yang ada di WS Batanghari sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk berbagai kepentingan, namun kualitasnya semakin menurun sebagai akibat adanya buangan limbah rumah tangga, industri dan lainnya.

5. Limbah Pertambangan

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) pertambangan yang membuang limbah berbahaya mengandung unsur merkuri ke sungai, sehingga dapat mencemari air sungai maupun air tanah disekitar tepi sungai.

BAB II

KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI BATANGHARI

2.1 Peraturan Perundangan dibidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya yang Terkait

Peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Batanghari diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

16. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
30. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
33. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
36. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
37. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/M/1993 tentang Reklamasi Rawa
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/PRT/M/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air Provinsi Daerah Tingkat I
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/ 2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air

49. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
53. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengulangan Bencana
54. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Daerah jangka Menengah 2010 – 2015
55. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Ombilin Dan Batang Anai

2.2 Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Arahan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jaknas Sumber Daya Air Pasal 2, menyebutkan bahwa Jaknas Sumber Daya Air menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang dapat ditinjau kembali oleh dewan sumber daya air nasional setiap 5 tahun sekali. Jaknas tersebut mencakup:

1. Kebijakan Umum, terdiri dari:
 - 1) Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya terkait air

- 3) Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air
 - 4) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Menerus, terdiri dari:
 - 1) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air
 - 2) Peningkatan upaya pengawetan air
 - 3) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air
 - 2) Peningkatan upaya penyediaan sumber daya air
 - 3) Peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air
 - 4) Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air
 - 5) Pengendalian Pengusahaan sumber daya air
4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak, terdiri dari:
 - 1) Peningkatan upaya pencegahan
 - 2) Peningkatan upaya penanggulangan
 - 3) Peningkatan upaya pemulihan
5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan

6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 1) Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA
 - 2) Pengembangan jejaring SISDA
 - 3) Pengembangan teknologi Informasi

b. Arahan Kebijakan Sumber Daya Air Provinsi

1. pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
3. pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan;
4. pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan;
5. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah diangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan

- airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di wilayah lumbung padi;
6. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya;
 7. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; dan
 8. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan.

2.3 Inventarisasi Data

2.3.1 Data Umum

a. Kependudukan.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jambi, dengan luas wilayah paling kecil mengakibatkan tingkat kepadatan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.1** berikut :

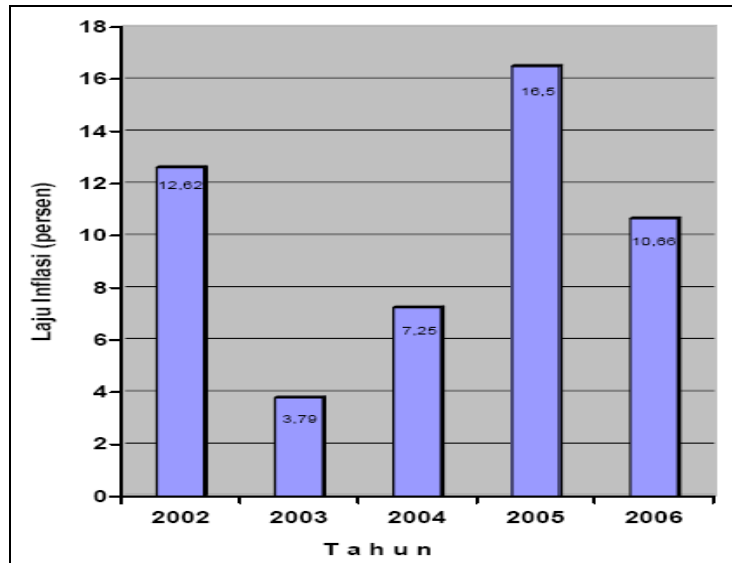
Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk di Wilayah Sungai Batanghari

No	Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Sungai	Luas & Penduduk Kabupaten / Kota		
		Total Luas	Jumlah	Kepadatan
		Km ²	Jiwa	Jiwa/km ²
1	Kerinci	4,200.00	306,494	73
2	Merangin	7,679.00	277,595	36
3	Sarolangun	6,174.00	205,090	33
4	Batanghari	4,983	211,897	43
5	Muaro Jambi	5,419.68	295,319	54
6	Tanjab Timur	5,445.00	207,340	38
7	Tanjab Barat	5,503.50	239,016	43
8	Tebo	7,862	246,044	31
9	Bungo	7,160	250,934	35
10	Kota Jambi	205	443,370	2,163
11	Solok	3,738.00	347,288	93
12	Solok Selatan	3,346	135,744	41
13	Sawahlunto	3130.8	196,667	63
14	Dharmasraya	2,961.13	173,375	59

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2007

b. Sektor Perekonomian.

Indeks Harga Konsumen rata-rata pada tahun 2006 naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 indeks umum tercatat sebesar 143,31 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 126,40. Adapun laju inflasi yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan IHK per bulan tercatat sebesar 10,66 %.



Gambar 2.1 Perkembangan Laju Inflasi Kota Jambi Tahun 2002-2006

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2006 atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 5,89 %. Kenaikan ini merupakan pertumbuhan perekonomian secara riil dimana faktor inflasi/deflasi sudah dihilangkan.

1) Sub Sektor Tanaman Pangan.

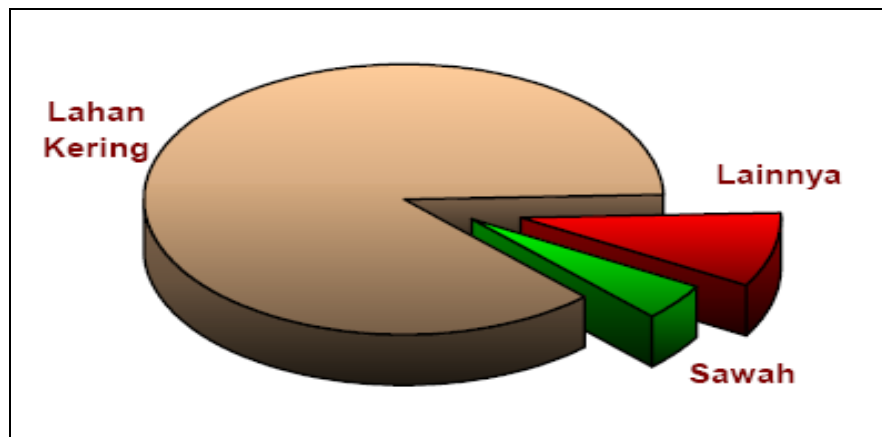
Struktur perekonomian Jambi pada awal Pelita I sangat didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi lebih dari 55 %. Memasuki tahun 1989, awal Pelita V, peran sektor pertanian mulai menurun hingga 35 %. Dalam era tahun 1990-an, dominasi sektor pertanian cenderung menurun tinggal 26,27 % pada tahun 1997. Sebagian besar perannya mulai diambil alih oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan yang meningkat cukup tajam pada periode tersebut.

Berdasarkan sektor utama, kontribusi sektor primer juga meningkat dari 35,75 % tahun 1999 meningkat menjadi 38,19 % tahun 2004, sejak krisis ekonomi kontribusi sektor industri sedikit mengalami penurunan dari 20,85 % tahun 1999 menjadi 19,46 % tahun 2004, kontribusi sektor utilitas

sedikit mengalami kenaikan dari 11,46 % tahun 1999 meningkat 11,63 % tahun 2004, sedangkan kontribusi sektor jasa-jasa mengalami penurunan yang relatif kecil dari 31,94 % tahun 1999 menjadi 30,71 % tahun 2004. Keadaan ini menggambarkan pengaruh krisis ekonomi nasional yang belum pulih juga berpengaruh kepada perekonomian daerah Jambi.

Padi : Produksi Padi sawah Provinsi Jambi tahun 2006 turun sebesar 7,13 % dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Padi ladang naik 3,12 % sehingga total produksi padi mengalami penurunan sebesar 6,04 %.

Palawija : Produksi palawija seperti ubi kayu naik 2,51 %, jagung turun 1,31 %, ubi jalar naik 3,14 %, dan kedelai naik 20,26 %.



Gambar 2.2 Luas Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2006

2) Sub Sektor Tanaman Perkebunan.

Disektor pertanian, subsektor perkebunan baik rakyat maupun besar menjadi sektor andalan Provinsi Jambi terutama wilayah potensial di setiap Kabupaten. Sub sektor ini akan mempengaruhi pembentukan basis ekonomi Provinsi

Jambi, baik dari segi ekspor maupun arah pengembangan industri, serta orientasi penyediaan jasa perdagangan, maupun perbankan.

Perkebunan Daerah Jambi pada umumnya adalah Perkebunan Rakyat. Produksi Perkebunan Rakyat yang terbesar adalah karet. Produksi Karet mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 3,29 %.

3) Sub Sektor Perikanan.

Subsektor perikanan yang memiliki prospek di Provinsi Jambi perlu dikelola secara optimal, baik dari segi penangkapan maupun pemanasan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberdayakan subsektor perikanan sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya kelautan, maka dukungan terhadap pengembangan subsektor perikanan akan lebih besar.

4) Sub Sektor Peternakan.

Produksi daging unggas pada Tahun 2006 di Provinsi Jambi sekitar 14.094.563 ekor turun dari tahun sebelumnya yaitu 3.998.585 ekor. Sedangkan untuk Produksi ternak kecil meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 137.989 ekor untuk kambing, 47.899 ekor untuk domba dan 13.255 ekor babi. Untuk produksi ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda relative sama dengan tahun sebelumnya yaitu untuk sapi 118.16 ekor, kerbau 72.117 ekor dan kuda 21 ekor

c. Sektor Kehutanan

Hasil kehutanan Provinsi Jambi yang terbesar adalah bahan baku serpih, produksi Tahun 2006 adalah 4.428.728,45 m³.

d. Sektor Industri

Perindustrian di Provinsi Jambi dari Tahun 1995-2006 mengalami peningkatan baik dari unit usahanya, tenaga kerja, investasi dan produksinya. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Provinsi Jambi pada Tahun 2006 ada sebanyak 89 dan

angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,11 % dari tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja ada 27.567 orang

e. Sektor Pertambangan.

Saat ini, di WS Batanghari terdapat beberapa kegiatan penambangan terutama untuk galian C yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten/Kota WS. Batanghari. Dalam hal ini, pembangunan dan pengembangan sektor pertambangan diarahkan dan diusahakan sepenuhnya pada upaya pengelolaan sumber daya pertambangan yang efektif dan efisien, berwawasan lingkungan serta diarahkan sepenuhnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan.



Gambar 2.3 Lokasi dan Jenis Pertambangan di Provinsi Jambi

f. Sektor Pariwisata.

Wilayah DAS Batanghari sebagian besar berada di daerah pegunungan baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di Provinsi Jambi. Lokasi di pegunungan memiliki panorama alam yang sangat indah dengan beragam flora dan fauna termasuk didalamnya flora dan fauna langka, juga terdapat beragam

budaya yang khas merupakan potensi wilayah yang masih terpendam. Potensi keanekaragaman alam dan budaya di wilayah DAS Batanghari dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dalam pengembangan kegiatan ekonomi wilayah khususnya bidang kepariwisataan. Jenis obyek wisata yang dapat diidentifikasi di wilayah DAS Batanghari dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

g. Sektor Energi

Energi merupakan salah satu faktor penting dalam berbagai kegiatan masyarakat. Saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Berdasarkan jumlah pelanggan dan besar pemakaiannya, penggunaan listrik terbesar di WS Batanghari diserap oleh sektor rumah tangga terutama untuk sumber penerangan dan kegiatan pendukung lain.

Perkembangan perlistrikan di Provinsi Jambi juga meningkat sesuai dengan lajunya perkembangan Pembangunan. Listrik yang terjual dikelompokkan menurut 6 (enam) golongan: yaitu sosial/sekolah, rumah tangga, perdagangan, industri, pemerintahan dan penerangan jalan.

2.3.2 Data Sumber Daya Air

a. Iklim

Data yang dipergunakan dalam kajian ini diambil dari stasiun pengamatan yang berlokasi dekat dengan wilayah studi dan dianggap mewakili wilayah studi. Kondisi iklim daerah studi didasarkan pada data hasil pencatatan di stasiun pengamatan yang terdekat.

Penyebaran peralatan-peralatan hidroklimatologi dapat dilihat **Gambar 2.4** dan kondisi peralatannya dapat dilihat pada **Tabel 2.2** pada halaman berikut ini.

Tabel 2.2 Kondisi Pos Hidrologi di WS Batanghari

NO	NAMA POS	LOKASI POS	KONDISI ALAT		KET
			MANUAL	AUTOMATIC	
1	2	3	4	5	6
	Kota Jambi				
1	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Hari - Ancol (Kasang)	Baik	Baik	Kurang Lengkap
2	Pos Klimatologi	Pasir Putih	Baik	Baik	
3	Pos Curah Hujan Otomatis (ARR) / Manual	Simpang III Sipin	Baik	Rusak	
	Kabupaten Ma. Jambi				
4	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Kumpeh - Pmt. Bidaro	Baik	Rusak	
5	Pos Duga Air Otomatis (AWLR)	Bt. Hari - Sei. Duren	Baik	Baik	
6	Pos Curah Hujan Biasa (Manual)	Sengeti	Baik		
	Kabupaten Batanghari				
7	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Hari - Ma. Tembesi	Baik	Rusak	
8	Pos Curah Hujan Otomatis (ARR) & Manual	Ma. Bulian	Baik	Rusak	
9	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Ma. Tembesi	Baik	-	
	Kabupaten Sarolangun				
10	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Bt. Tembesi - Pauh	Baik	-	
11	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Singkut - Rt. Tenang	Baik	Rusak	
12	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Asai - Ds. Benso	Baik	Rusak	
13	Pos Curah Hujan Biasa (Manual)	Pulau Pandan	Baik	-	
14	Pos Curah Hujan Biasa (Manual)	Sarolangun	Baik	-	
15	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Tembesi - Ma. Inum	Baik	Rusak	
	Kabupaten Merangin				
16	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Marangin - Bangko	Baik	Baik	Kurang Lengkap
17	Pos Klimatologi	Bangko	Baik	Rusak	
18	Pos Duga Air Otomatis (AWLR)	Bt. Marangin - Pl. Rengas	Baik	Baik	
19	Pos Duga Air Otomatis (AWLR)	Bt. Masumai - Sei. Manau	Baik	Baik	
20	Pos Curah Hujan Otomatis (ARR) & Manual	Sungai Manau	Baik	Baik	
21	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Tabir - Rt. Panjang	Baik	Baik	
22	Pos Duga Air Otomatis (AWLR) & Manual	Bt. Tabir - Ma. Jernih	Baik	Rusak	
	Kabupaten Kerinci				
23	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Bt. Siulak - Siulak Deras	Baik	-	Kurang Lengkap
24	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Bt. Merao - Ds. Debai	Baik	-	
25	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Bt. Siulak - Kubang	Baik	-	
26	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Bt. Sangkir - Tn. Kampung	Baik	-	
27	Staf Gauge (Peilskall) / Manual	Danau Kerinci	Baik	-	
28	Pos Klimatologi	Kayu Aro	Baik	Baik	
29	Pos Curah Hujan Otomatis (ARR) / Manual	Sungai Penuh	Baik	Rusak	
30	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Tg. Genting	Baik	-	
31	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Semurup	Baik	-	
32	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Lempur	Baik	-	
33	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Pulau Tengah	Baik	-	
34	Pos Curah Hujan Otomatis (ARR) & Manual	Siulak Deras	Baik	Rusak	
35	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Temiai	Baik	-	
36	Pos Curah Hujan Biasa / Manual	Ma. Imat	Baik	-	

Berdasarkan klasifikasi iklim Schimdt dan Ferguson, DAS Batanghari secara umum beriklim Am (basah) dengan curah hujan sepanjang tahun. Tahun 2002 rata-rata bulan basah sebanyak 10 (sepuluh) bulan dan rata-rata bulan kering sebanyak 1 (satu) bulan.

Curah hujan rata-rata sebesar 2500 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 12 (dua belas) hari. Suhu rata-rata wilayah sebesar 28°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 83 %.

Tabel 2.3 Kondisi Iklim DAS Batanghari Hulu, Tengah Dan Hilir

No	Kondisi Iklim	DAS		
		Batanghari Hulu	Batanghari Tengah	Batanghari Hilir
1	Klasifikasi Iklim (Schmidt&Ferguson)	Sangat Basah (Af)	Basah (Am)	Basah (Am)
2	Rata-rata bulan basah	12 bulan	10 bulan	10 bulan
3	Rata-rata bulan kering	Tidak ada	1 bulan	1 bulan
4	Curah Hujan rata – rata	3.000 mm/th	2.340 mm/th	2.271 mm/th
5	Jumlah hari hujan	13 hari/bln		
6	Ketinggian tempat	500-3.000 mdpl	100-500 m dpl	0-100 m dpl

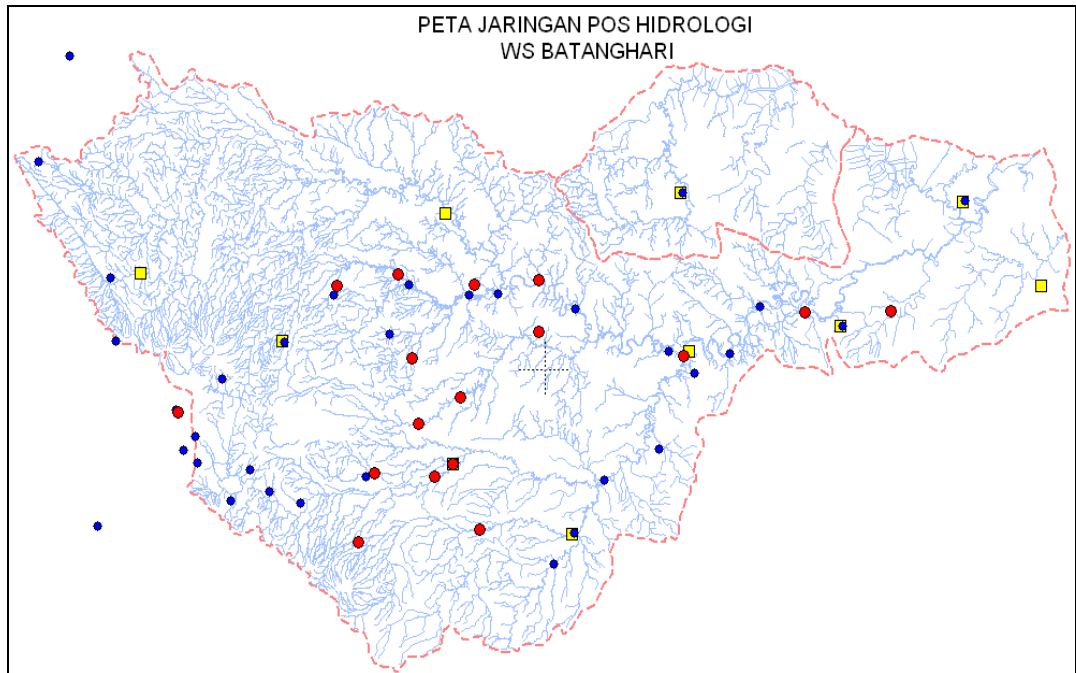
Sumber : BP DAS Batanghari dan Hasil Perhitungan, 2004

b. Curah Hujan

Dalam Wilayah DAS Batanghari terdapat 12 (dua belas) stasiun curah hujan, 4 (empat) stasiun diantaranya berada pada DAS Batanghari Hulu, 4 (empat) stasiun berada pada DAS Batanghari Tengah, dan 4 (empat) stasiun berada pada DAS Batanghari Hilir. Dari data Stasiun Klimatologi Sicinsin, pada wilayah DAS Batanghari Hulu terdapat 4 (empat) unit stasiun pengamat dengan data pengamatan curah hujan dari tahun 1993 sampai dengan Tahun 2002 yaitu; Stasiun Lubuk Gadang, Stasiun Muara Labuh, Stasiun Sitiung, dan Stasiun Tanjung Gadang.

Data hujan untuk DAS Batanghari Tengah dan DAS Batanghari Hilir dicatat dari stasiun pengamat hujan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Sarko. Data hujan untuk DAS Batanghari Hilir dicatat dari stasiun pengamat hujan di Kabupaten

Tanjung Jabung, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi, catatan hujan bulanan mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2002; secara lebih lengkap data hujan bulanan dari beberapa stasiun hujan pada DAS Batanghari Tengah dan DAS Batanghari Hilir seperti ditunjukkan oleh **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4 Lokasi Pos Hidrologi di WS Batanghari

c. Debit Sungai

Besarnya debit sungai yang tersedia pada DAS Batanghari seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. Selanjutnya berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, pada DAS Batanghari Hulu hanya terdapat 3 (tiga) buah stasiun pengamat/pengukur debit sungai, seperti ditunjukkan dalam **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Debit Air Sungai Rata-Rata Bulanan di Wilayah DAS Batanghari Hulu

Tahun		Stasiun Batanghari (m ³ /detik)			Stasiun Batang Siat (m ³ /detik)			Stasiun Sangir (m ³ /detik)		
No	Pengamatan	Max	Min	Rata2	Max	Min	Rata2	Max	Min	Rata
1	1990	-	-	-	-	-	-	315.0	8,6	27,39
2	1991	-	-	-	184.0	4,47	26,58	384.0	4.0	29,39
3	1992	1.5	108.0	367,42	195.0	4,77	27,69	358.0	21,2	40,84
4	1993	1.2	116,8	321,08	173,4	2,10	20,71	-	-	-
5	1994	1.2	63,6	270,41	157.0	3,86	20,33	-	-	-
6	1995	3.3	60.0	372,58	199,2	1,18	36,15	234.0	15,6	35,48
7	1996	1.8	96.0	307,92	320.0	4,38	30,93	322,3	7,4	37,33
8	1997	1.1	45.0	132,43	157.0	0,57	15,11	136,2	9,8	21,06
9	1998	-	-	-	135.0	4,20	18,98	-	-	-
10	1999	1.3	82.0	195,25	128.0	2,22	14,45	70,6	11,50	24,12
11	2000	965.0	88.0	226,50	152.0	0,86	19,20	-	-	-
12	2001	1.7	70,8	202,17	181.0	0,66	17,87	97,8	13,30	37,04
13	2002	2.8	110.0	275,92	215.0	1,34	23,19	223,8	28,8	54,44

Menurut Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat Departemen Kimpraswil Tahun 2003, secara umum debit air yang tersedia pada DAS Batanghari berdasarkan potensi yang ada telah mencukupi. Hal ini diindikasikan dengan jumlah debit Sungai Batanghari sebesar 35.953,18 m³/dt (8.3 milyar m³/tahun), sedangkan kebutuhan air hanya sebesar 4. 668,96 m³/dt untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai sektor. Meskipun demikian tetap perlu mewaspadaai adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan akan air berbagai sektor seiring dengan meningkatnya pembangunan dan perekonomian daerah.

Tabel 2.5 Debit Sungai Pada Berbagai Lokasi Pengambilan Air Sungai

No	Lokasi	Sungai	CA	Q Mak	Q Min	Q Rerata
			(Km ²)	(m ³ /dt)	(m ³ /dt)	(m ³ /dt)
1	Siulak Deras	Siulak Deras	187	15	4,69	8,25
2	Ds. Deboi	Merao Deboi	425	47	5,50	13,60
3	Tn. Kampung	Bt. Sangkir	50	30	1,96	7,25
4	D. Kerinci	Bt. Merangin	568	90	4,16	16,90
5	S. Manau	Bt. Mesumai	396	90	4,16	16,90
6	P. Rengas	Bt. Merangin	2.916	557	28,30	144,00
7	Ps. Bangko	Bt. Merangin	3.645	721	38,20	122,00
8	M. Jernih	Bt. Tabir	885	396	26,40	104,00
9	Rt. Panjang	Bt. Tabir	1.046	713	17,00	97,10
10	Rt. Tenang	Bt. Singkut	327	52	2,00	11,30
11	Ds. Benso	Bt. Asai	1.258	356	12,00	199,00
12	Ma. Inum	Bt. Tembesi	1.455	1.022	12,70	87,60
13	D. Pauh	Bt. Tembesi	10.76	1.358	64,16	248,70
14	Air Gemuruh	Bt. Tebo	1.831	742	20,60	150,00
15	Rt. Kelayang	Bt. Pelepat	412	220	13,60	41,10
16	Rt. Pandan	Bt. Bungo	410	177	6,54	28,80
17	M. Kilis	Batanghari	17.824	1.948	82,00	552,00
18	Ma. Tembesi	Batanghari	36.135	8.303	596,00	2.110,00
19	S. Duren	Batanghari	38.704	-	690,00	2.484,00
20	Pmt. Bidaro	Bt. Kumpeh	375	129	2,80	40,10
21	Ancol Kasang	Batanghari	4.3	11.343	696,00	3.114,00

Sumber : Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat, Departemen Kimpraswil, Tahun 2004

2.3.3 Data Kebutuhan Air

Kebutuhan air untuk berbagai pemanfaatan tersebut per DAS sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.6** berikut:

Tabel 2.6 Kebutuhan air di WS Batanghari (m³/dt)

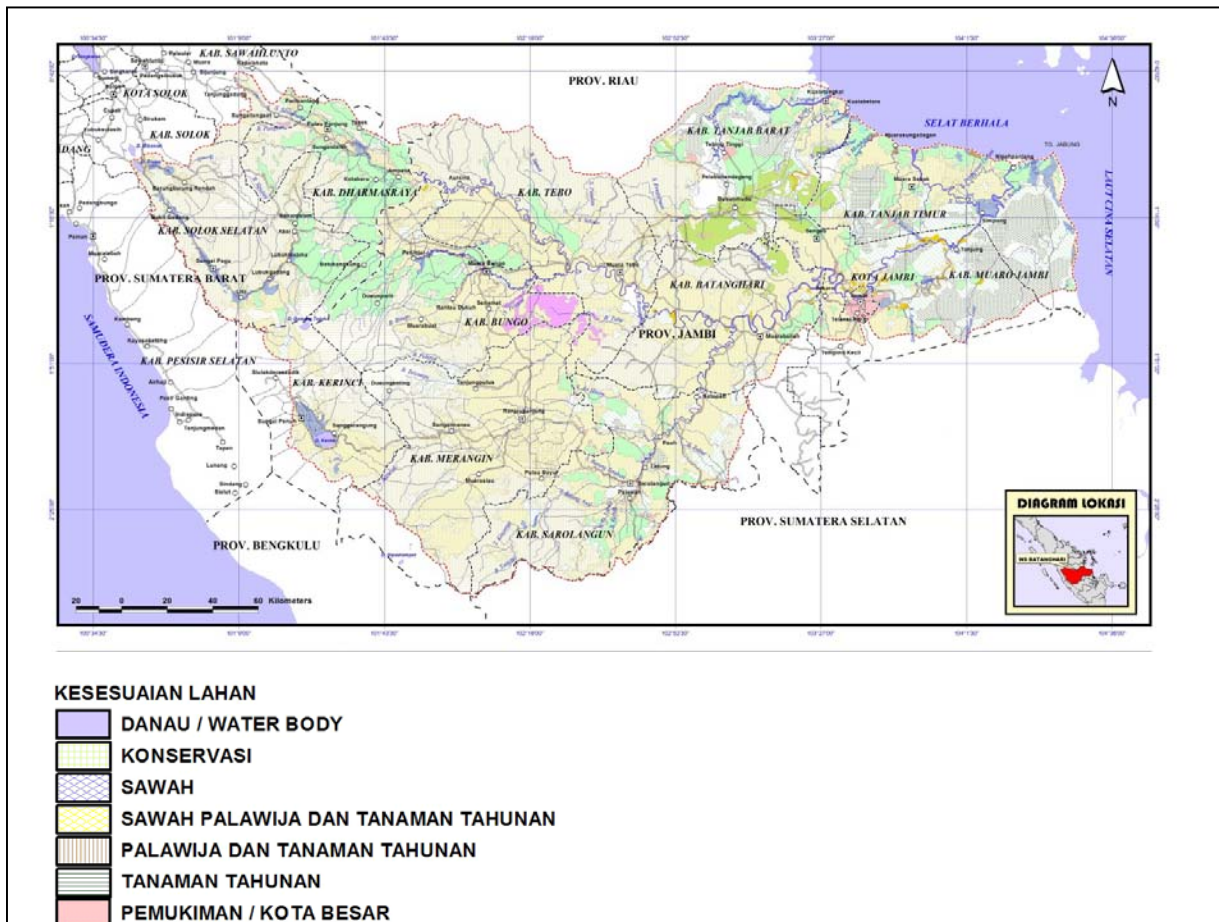
No	DAS	Kebutuhan air tahun (m ³ /dt)
		2008
1	DAS Sumai	2.01
2	DAS Air Hitam	4.26
3	DAS Batang Kumpeh	11.52
4	DAS Kaos	3.30
5	DAS Danau Bangko	1.33
6	DAS Singkatigedang	1.17
7	DAS Rengas	1.98
8	DAS Ketalo	1.19
9	DAS Kilis	2.02
10	DAS Cempengan	0.12
11	DAS Batang Langsisip	0.04
12	DAS Mungoh	1.03
13	DAS Batang Jujuhan	12.98
14	DAS Batang Siat	10.03
15	DAS Batang Sipotan	2.76
16	DAS Batang Monjong	3.16
17	DAS Batang Pangean	5.24

18	DAS Batang Talantan	0.15
19	DAS Batang Sangir	15.56
20	DAS Batang Tabir	15.05
21	DAS Batang Tembesi	97.69
22	DAS Batang Tebo	34.34
23	DAS Batang Gumati	6.06
24	DAS Batang Bangko	11.75
25	DAS Batanghari	94.95
26	DAS Pangkal Duri Besar	3.55
27	DAS Bentano	4.13
28	DAS Mandahara	7.17
29	DAS Tungkal	27.04
	WS Batanghari	381.56

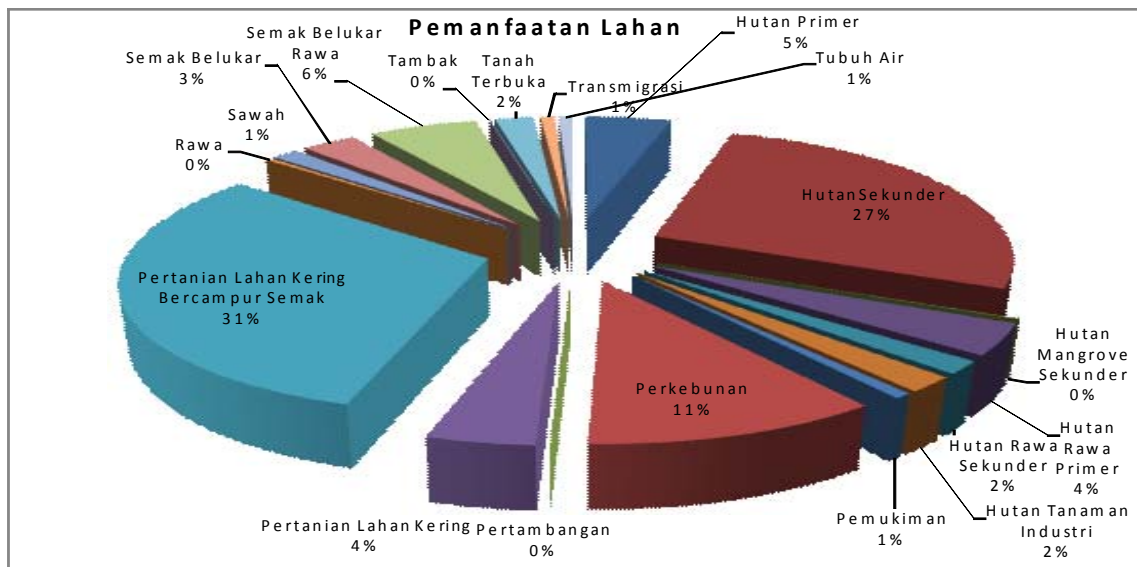
2.3.4 Data Lainnya

a. Tata Guna Lahan dan Tutupan Hutan

Penggunaan lahan pada WS Batanghari diketahui sebagai lahan didominasi oleh pertanian lahan kering, hutan sekunder, perkebunan dan semak belukar dan rawa, dan diikuti oleh penggunaan lahan lainnya sebagaimana tercantum dalam **Gambar 2.5 dan Gambar 2.6**.



Gambar 2.5 Peta Tataguna Lahan di WS Batanghari



Gambar 2.6 Prosentase Tata Guna lahan di WS Batanghari

2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

Sumber Daya Air merupakan sumber daya alam yang cukup dinamis dan sensitif terhadap perubahan yang terjadi. Sumber Daya Air dengan sungai sebagai fokus merupakan sumber daya alam yang menyimpan energi yang potensial dan kinetik bagi kehidupan di bumi. Hampir seluruh kebutuhan air tawar di bumi di bebaskan pada air permukaan utamanya sungai., demikian juga dengan energi listrik serta pembentukan daerah yang subur oleh sungai, namun demikian sumber daya air juga dapat menjadi sumber ancaman apabila tidak dikelola dengan baik.

2.4.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air

1. Kualitas Air

Secara umum kualitas air pada WS Batanghari relatif masih cukup baik, namun demikian pertumbuhan berbagai hal dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas air di sebagian sungai dan danau yang menjadi sumber air bersih. Pada sungai penurunan kualitas air disebabkan oleh meningkatnya limbah yang dibuang ke sungai, hal ini dapat dipicu oleh meningkatnya industri maupun rendahnya kesadaran masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai/saluran drainase lingkungan. Selain itu penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh tidak terkontrolnya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian dimana hal ini terakumulasi dalam proses drainase lahan ke sungai-sungai.

Pada danau konservasi penurunan kualitas air disebabkan oleh penggunaan makanan ikan pada keramba apung yang biasanya banyak ditebar pada danau di Jambi (Danau Teluk-Jambi, Danau Kerinci-Kerinci) yang terakumulasi dan mengendap pada dasar danau. Pencemaran ini dapat menyebabkan kematian bagi ikan dan organisme lainnya serta penyakit kulit pada manusia dan ternak.

Di kota Jambi penurunan kualitas air bersih (PDAM) dirasakan masyarakat pada musim kemarau, dimana permukaan sungai Batanghari rendah (debit kecil), ini memberi indikasi bahwa penurunan debit sungai menyebabkan kemampuan *fresh water* untuk mencuci/menggelontor kotoran rendah.

2. Erosi

Pada umumnya baik erosi lahan maupun erosi alur sungai terjadi pada daerah dengan kemiringan yang cukup terjal serta karakteristik tanah yang labil. Pada WS Batanghari bagian *upstream* umumnya erosi lahan terjadi sebagai akibat telah rusaknya DAS sebagai akibat berubahnya penutupan lahan pada DAS dari hutan menjadi daerah yang tandus.

Sedangkan erosi alur sungai terjadi karena morfologi sungai yang berkelok-kelok dengan kemiringan yang curam serta tingginya debit yang lewat. Biasanya erosi akan terjadi bersamaan dengan naiknya debit air/banjir, dengan demikian dengan semakin sering terjadinya banjir maka erosi akan semakin meningkat.

Sebagian besar sungai-sungai di WS Batanghari mempunyai karakter yang sama, yaitu bermeander, berkelok-kelok sedemikian hingga mempunyai kecenderungan yang sama untuk mengalami erosi

Berdasarkan Intensitas Lahan Kritis Dari Kehutanan Tahun 1985 diperoleh data bahwa lahan kritis pada DAS Batanghari seluas 39.245 Ha dan lahan kritis dalam kawasan hutan 21.900 Ha

3. Sedimentasi.

Efek lain dari terjadinya erosi pada bagian *upstream* WS Batanghari adalah terjadinya sedimentasi pada bagian hilir. Sedimentasi ini telah menyebabkan pendangkalan pada sebagian alur sungai (utamanya bagian hilir) sehingga menghambat kelancaran transportasi air/kapal-kapal pada muara sungai Batanghari. Selain itu sedimentasi dan pendangkalan sungai Batanghari juga telah mempengaruhi kualitas air minum utamanya pada *intake* Sungai Batanghari oleh PDAM kota Jambi, meskipun masih belum mengkhawatirkan, namun demikian

sedimentasi memberikan kecenderungan meningkat sebagai akibat semakin kritisnya DAS di bagian hulu.

Berdasarkan informasi dari PDAM Kota Jambi, peningkatan sedimen di lokasi *intake* pada Sungai Batanghari cukup besar, menyebabkan peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan peralatan yang rusak akibat sedimentasi.

Pendangkalan sungai juga telah menyebabkan sebagian perkebunan kelapa rakyat di daerah pesisir mengalami kerusakan akibat tidak lancarnya proses pencucian lahan/*flushing* yang menyebabkan terbatasnya *fresh water* bagi tanaman.

4. Permasalahan Sempadan / Bantaran Sungai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian masyarakat mempunyai kebiasaan/budaya untuk membangun permukiman pada lahan di sepanjang/pinggir sungai, hal ini utamanya pada daerah-daerah yang tingkat keterjangkauan/aksesibilitas transportasi darat masih terbatas, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga di daerah perkotaan dengan lahan permukiman yang terbatas serta mahal.

Meskipun di Provinsi Jambi kondisi ini belum pada tingkat mengkhawatirkan namun demikian harus diwaspadai karena dapat menyebabkan penyempitan sungai dan mengganggu fungsi sungai, utamanya kemampuan/kapasitas pengaliran pada musim hujan yang biasanya disertai dengan peningkatan debit/banjir.

2.4.2 Aspek Penatagunaan Sumber Daya Air

1. Kuantitas Air

Berdasarkan studi Neraca Air yang dilakukan pada Tahun 1997/1998 secara umum Neraca Air WS Batanghari masih cukup, namun demikian pada musim kemarau di sebagian wilayah di Provinsi Jambi terjadi kelangkaan air minum (PDAM), utamanya di Kota Jambi.

Disebagian Daerah Irigasi di beberapa kabupaten pada musim kemarau juga terjadi penurunan pasokan air dan mengalami kekeringan.

Penurunan kuantitas air, yang di indikasikan oleh rendahnya Muka Air (MA) beberapa sungai besar di Provinsi Jambi, meskipun belum mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi pemenuhan air harus dicermati sebagai kurang optimalnya pengelolaan sumber daya air.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Air yang tumpang tindih dan kurang terkoordinasi.

Permasalahan lain yang sangat menonjol dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi adalah belum adanya keterpaduan antarsektor dan bidang, sehingga tidak semua pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dalam WS Batanghari dapat di kontrol dan dimonitor dengan baik. Demikian juga dalam hal pengembangan ke depan, belum tersedia Rencana Pengembangan Sumber Daya Air di Provinsi Jambi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya air bagi kepentingan sektor masing-masing.

3. Menurunnya Tingkat Fungsi Pelayanan/Kinerja Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa

Dalam kurun waktu \pm 3 - 4 tahun terakhir telah terjadi penurunan fungsi pelayanan/kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi dan rawa jambi yang berdampak kepada menurunnya produktifitas areal irigasi dan rawa di Provinsi Jambi, sehingga berdampak kepada penurunan produksi padi pada khususnya dan tanaman pangan pada umumnya.

Penurunan produksi padi/beras dan tanaman pangan pada umumnya menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat petani dan dalam skala yang lebih luas akan menyebabkan kerawanan sosial. Secara lebih luas penurunan produksi padi/beras akan mengganggu program ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Penyebab dari penurunan tingkat layanan/fungsi jaringan irigasi dan rawa diantaranya adalah rusaknya sarana dan prasarana jaringan yang ada, terbatasnya operasi dan pemeliharaan yang selanjutnya disingkat OP, jaringan dan juga belum lengkapnya program pembangunan jaringan yang telah direncanakan. Kerusakan jaringan terjadi diantaranya disebabkan oleh bencana alam banjir pada 3 tahun terakhir yang belum tertangani/direhabilitasi sebagai akibat terbatasnya dana pembangunan yang dimiliki oleh daerah maupun nasional.

Adapun terbatasnya OP yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten) disebabkan antara lain oleh terbatasnya dana dan berubahnya prioritas pembangunan, serta lemahnya sumber daya manusia yang mengelolanya.

Pada era otonomi daerah, persoalan OP adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, namun demikian mengingat besarnya dana OP yang dibutuhkan maka sudah selayaknya ini menjadi persoalan nasional.

2.4.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Dalam beberapa tahun terakhir di sebagian wilayah Provinsi Jambi telah terjadi banjir dengan skala yang bervariasi, dari ringan, sedang sampai dengan berat, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan sebagian wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi serta Kota Jambi. Sebagai contoh banjir yang terjadi pada akhir Tahun 2002 sampai dengan awal Tahun 2003 telah menyebabkan kerusakan wilayah pertanian dan pemukiman (Wilayah pertanian \pm 62.410 ha, Wilayah pemukiman \pm 5.504 Ha yang meliputi \pm 222 desa dan \pm 29.502 kepala keluarga).

2.4.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

Peralatan hidrologi yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan/pemantau kondisi WS Batanghari di bawah pengelolaan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi secara khusus perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan kondisi peralatan yang rusak akan mempengaruhi data-data yang di hasilkan sehingga dapat memberikan dasar pengambilan keputusan yang salah dalam pengelolaan/pemanfaatan dan pengembangan sumber daya air pada WS Batanghari.

Selain permasalahan peralatan hidrologi, masalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang terampil/ahli serta pendanaan yang terbatas menyebabkan intensitas pemantauan komponen DAS dalam WS Batanghari menjadi terbatas.

2.4.5 Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat

1. masyarakat banyak yang belum paham mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air
2. pelibatan peran masyarakat masih sangat minim Dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai,
3. dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha belum banyak dilibatkan

2.5 Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan

Beberapa potensi sumber daya air yang dapat dimaksimalkan di WS Batanghari diantaranya:

2.5.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Potensi Sumber Daya Air di WS Batanghari terdiri dari sumber-sumber air berupa mata air dan beberapa danau yang tersebar di beberapa wilayah.

Secara umum konservasi sumber daya air dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamankan serta melestarikan keberadaan sumber daya air. Adapun cara-cara yang telah dilakukan dalam konservasi sumber daya air

ini meliputi konservasi tidak langsung yaitu dengan melestarikan hutan lindung, hutan wisata, cagar alam, Taman Hutan Rakyat (Tahura), cagar biosfer serta taman nasional sebagai daerah resapan air, sebagaimana keberadaan taman nasional serta hutan lindung yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu konservasi dilakukan pula dengan cara langsung yaitu dengan keberadaan danau-danau yang langsung berfungsi sebagai konservasi air.

Daerah konservasi di kabupaten Kerinci yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 200.464 ha, daerah konservasi di Sarko berupa hutan lindung, cagar biosfer dan taman nasional seluas 168.561 ha, di Kabupaten Bungo Tebo berupa hutan lindung, hutan wisata dan taman nasional seluas 93.605 ha, di Kabupaten Batanghari berupa hutan lindung, hutan wisata, cagar alam, tahura dan nasional seluas 58.630 ha, serta di Kabupaten Tanjung Jabung berupa hutan lindung, cagar alam, tahura, taman nasional Berbak seluas 87.370 ha.

Sedangkan danau di Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.7** berikut.

Tabel 2.7 Danau-danau di Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai konservasi sumber daya air

Danau	Kabupaten	Luas (ha)	Volume(1000m³)
Danau GunungTujuh	Kerinci	1.100	350.000
Danau Dipati Empat	Merangin	250	20.000
Danau Pauh	Merangin	75	8.500
Danau Kecil	Merangin	50	4.500
Danau Kembang	Merangin	50	4.500
Danau Cermin	Merangin	50	5.000

Sumber : Basis Data Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

2.5.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

1. Potensi Sungai sebagai sarana perhubungan

Selain airnya dimanfaatkan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sungai-sungai di WS Batanghari Provinsi Jambi mempunyai fungsi yang sangat menunjang untuk memperlancar roda perekonomian, sebagai sarana transportasi. Sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran dalam membawa penumpang dan barang-barang (yang utama), seperti ditunjukkan pada **Tabel 2.8** berikut ini:

Tabel 2.8 Sungai yang dimanfaatkan sebagai jalur transportasi

Sungai	Potensi yang dapat dilayari (km)	Yang dapat dilayari (km)	Dalam rata-rata (m)	Lebar rata-rata (m)
1 Batanghari	1.740	1.440	15 & 25	500
2 Batang Tembesi	350	125	2	300
3 Batang Tebo	140	140	3	70
4 Pengabuan	166	120	3	140
5 Batara	120	65	2	80
6 Mendahara	112	70	2	130
7 Lagan	30	20	3	50
8 Sadu	27	27	4	75

Sumber : Data Base Sektor Perhubungan Provinsi Jambi

2. Potensi Irigasi dan rawa

Beberapa areal irigasi tadah hujan dan rawa yang berpotensi untuk dikembangkan di WS Batanghari di beberapa Kabupaten.

3. Potensi lahan pertanian

Jenis tanah dominan di WS Batanghari adalah *andosol*, *gley humic*, *organosol*, dan *podsolik*, merupakan jenis tanah potensial untuk

pertanian. Penyebaran jenis tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.9** berikut.

Tabel 2.9 Penyebaran Jenis Tanah di WS Batanghari

NO.	JENIS TANAH	LUAS	
		Ha	%
1	Alluvial	152.700,14	2,92
2	Andosol	528.602,64	10,09
3	Gley Humic	444.343,12	8,48
4	Hidromorfik	152.764,53	2,92
5	Kompleks Andosol dan Latosol	52.034,38	0,99
6	Kompleks Latosol dan Litosol	16.554,32	0,32
7	Kompleks Podsolik Latosol	139.904,18	2,67
8	Latosol	15.586,64	0,30
9	Organosol	489.489,90	9,35
10	Podsolik	3.162.685,63	60,39
11	Rawang Laut	56.860,84	1,09
12	Regosol	25.481,55	0,49
JUMLAH		5.237.007,87	100,00

Sumber : Diolah dari Peta jenis tanah

2.5.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian secara langsung dilaksanakan dengan memanfaatkan prasarana sumber daya air, melalui :

1. pembuatan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain: *groundsill*, *revetment*, *retaining wall*, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.;dan
2. meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak.

2.5.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di WS Batanghari dalam rangka pelayanan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan

2.5.5 Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Melakukan pelatihan partisipatif dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya air .

BAB III

ANALISA DATA

3.1 Asumsi, Kriteria dan standar yang Digunakan

Untuk mendapatkan asumsi kondisi yang akan datang diperlukan beberapa analisis, yaitu analisis ketersediaan air, analisis kebutuhan air, analisis neraca air dengan menggunakan kriteria dan standar yang digunakan dalam melakukan studi atau kajian pada kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan skenario, strategi pola pengelolaan sumber daya air WS Batanghari digunakan beberapa kriteria dan standar yang telah ditetapkan berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), atau standar dan kriteria yang jelas sumbernya, memiliki referensi, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*).

a. Analisa Aspek Konservasi Sumber Daya Air

1. Cekungan Air Tanah

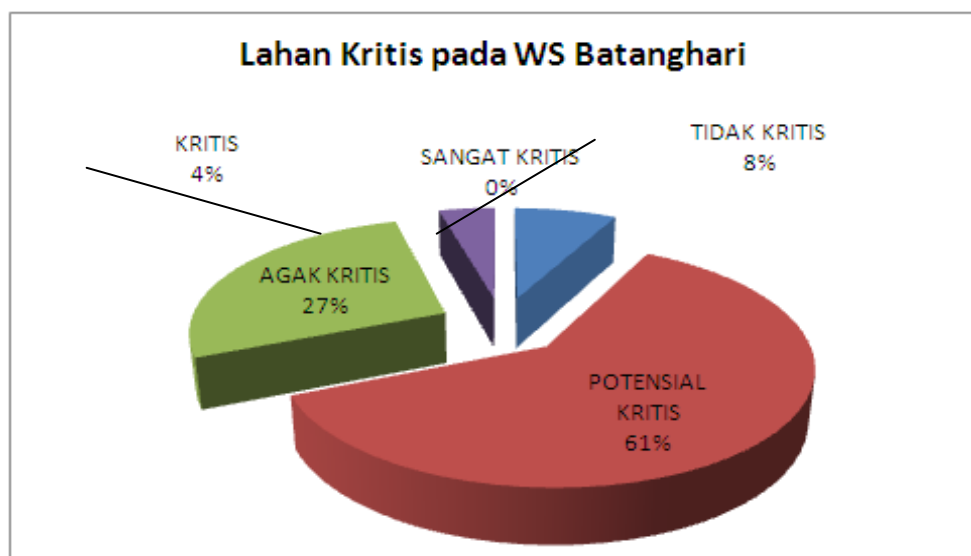
Berdasarkan interpretasi dari peta Geohidrologi DGTL Lembar Muara Siberut-Painan, Solok, Bangko dan Jambi, disebutkan di atas maka pada daerah WS Batanghari sebaran akuifer tidak merata dan terdapat beberapa lokasi cekungan air tanah (CAT) yaitu:

- a) CAT Solok di Kab. Solok, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 745 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 51 juta m³/tahun.
- b) CAT Kayu Aro-Padang Aro di sekitar Kab. Solok Selatan, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 2.283 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 29 juta m³/tahun.

- c) CAT Sungai Penuh di sekitar Kab. Kerinci, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 926 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 22 juta m³/tahun.
- d) CAT Bangko-Sarolangun di sekitar Kab. Sarolangun, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 4.189 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 32 juta m³/tahun.
- e) CAT Muara Bungo di sekitar Kab. Bungo, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 3.788 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 55 juta m³/tahun.
- f) CAT Muara Tembesi di sekitar Kab. Batanghari, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 115 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan tidak diketahui (tidak ada data).
- g) CAT Dumai-Jambi di sekitar Kab. Tanjung Jabung, dengan jumlah imbuan air tanah bebas sebesar 19.356 juta m³/tahun dan aliran air tanah tertekan sebesar 1.045 juta m³/tahun.

2. DAS Kritis

Area lahan kritis yang terdapat di WS Batanghari jumlahnya belum terlalu luas. Namun lahan yang agak kritis hingga potensial kritis mencapai lebih dari 70%. Seperti dapat diperiksa **Gambar 3.1** dan **Tabel 3.1** berikut:



Gambar 3.1 Prosentase Luas Lahan Kritis pada WS Batanghari

Tabel 3.1 DAS Kritis di WS Batanghari

NO.	N A M A D A S	TIDAK KRITIS	POTENSIAL KRITIS	AGAK KRITIS	KRITIS	SANGAT KRITIS	JUMLAH
1	DAS Tungkal	3,927.06	407,879.83	0.00	0.00	0.00	411,806.89
2	DAS Bentano	0.00	83,990.23	0.00	0.00	0.00	83,990.23
3	DAS Mendahara	576.51	111,015.94	5,916.70	0.00	0.00	117,509.15
4	DAS Pangkal Duri Besar	2.58	25,925.32	0.00	0.00	0.00	25,927.90
5	DAS Air Hitam	677.30	181,652.60	0.00	0.00	0.00	182,329.90
6	DAS Batang Bangko	2.35	6,088.75	54,507.14	11,022.58	0.00	71,620.82
7	DAS Batang Gumati	9,443.91	66,792.63	22,931.70	9,437.52	0.00	108,605.76
8	DAS Batang Talantan	857.16	25,505.44	5,760.63	207.07	0.00	32,330.30
9	DAS Batang Sangir	2,039.55	72,659.30	27,823.98	16,470.86	0.00	118,993.69
10	DAS Batang Sipotan	1,875.85	22,251.18	8,966.35	750.47	0.00	33,843.85
11	DAS Batang Monjong	5,601.75	20,109.23	9,641.94	516.87	0.00	35,869.79
12	DAS Batang Pangean	124.40	42,267.95	28,125.96	3,537.50	0.00	74,055.81
13	DAS Mungoh	0.00	1,500.87	8,186.91	0.00	0.00	9,687.78
14	DAS Batang Siat	16,331.60	87,717.32	13,310.16	0.00	0.00	117,359.08
15	DAS Batang Jujuhan	6,652.13	101,002.48	52,057.09	28.71	0.00	159,740.41
16	DAS Batang Langsisip	19.94	51,755.92	12,892.44	0.00	0.00	64,668.30
17	DAS Cempengan	35,919.71	1,750.11	11.52	0.00	0.00	37,681.34
18	DAS Sumai	27,431.21	88,117.97	200.55	0.00	0.00	115,749.73
19	DAS Batang Tebo	44,210.35	213,944.42	206,287.26	53,429.55	0.00	517,871.58
20	DAS Kilis	7,296.00	19,496.94	0.00	0.00	0.00	26,792.94
21	DAS Ketalo	14,277.82	20,698.30	0.00	0.00	0.00	34,976.12
22	DAS Batang Tabir	28,255.77	182,674.59	95,343.49	8,220.62	0.00	314,494.47
23	DAS Rengas	13,468.79	24,494.84	0.00	0.00	0.00	37,963.63
24	DAS Singkatigedang	9,595.41	18,419.22	9,799.08	0.00	0.00	37,813.71
25	DAS Batang Tembesi	33,207.00	670,940.63	501,516.43	104,880.38	0.00	1,310,544.44
26	DAS Danau Bangko	22,137.46	19,073.17	568.33	0.00	0.00	41,778.96
27	DAS Kaos	7,947.46	23,583.77	10,790.50	0.00	0.00	42,321.73
28	DAS Batang Kumpeh	22,784.08	97,138.67	6,295.82	0.00	0.00	126,218.57
29	DAS Batanghari	84,108.60	507,915.08	341,636.37	10,798.49	0.00	944,458.54
J U M L A H		398,771.75	3,196,362.70	1,422,570.35	219,300.62	0.00	5,237,005.42
D A S B A T A N G H A R I		393,588.30	2,385,898.78	1,416,653.65	219,300.62	0.00	4,415,441.35
(%)		8.91	54.04	32.08	4.97	0.00	100.00

Sumber : Hasil analisis 2008

3. Erosi dan Sedimentasi

Nilai sedimen merupakan hasil perkalian antara erosi yang terjadi di suatu daerah aliran sungai dengan besarnya *Sediment Ratio Delivery (SDR)*. Pada tabel berikut disajikan nilai SDR menurut luas DAS dan sedimentasi yang dihasilkan. Besarnya sedimentasi pada WS Batanghari seperti berikut:

Tabel 3.2 Besarnya Sedimentasi Setiap DAS di WS Batanghari Tahun 2008

No.	NAMA DAS	LUAS DAS (Km²)	Nilai SDR	Erosi (ton/ha/tahun n)	Sedimentasi (ton/ha/tahun n)
1	DAS Tungkal	4,118.07	7.99	124.83	9.97
2	DAS Bentano	839.90	8.45	88.24	7.46
3	DAS Mandahara	1,175.09	8.40	78.56	6.60
4	DAS Pangkal Duri Besar	259.28	10.51	71.33	7.50
5	DAS Air Hitam	1,823.30	8.31	24.89	2.07
6	DAS Batang Bangko	716.21	8.47	44.42	3.76
7	DAS Batang Gumati	1,086.06	8.42	185.70	15.64
8	DAS Batang Talantan	323.30	9.97	46.05	4.59
9	DAS Batang Sangir	1,189.94	8.40	433.70	36.43
10	DAS Batang Sipotan	338.44	9.85	55.81	5.50
11	DAS Batang Monjong	358.70	9.68	201.41	19.50
12	DAS Batang Pangean	741.16	8.47	334.80	28.36
13	DAS Mungoh	96.88	13.12	225.80	29.62
14	DAS Batang Siat	1,172.04	8.41	156.68	13.18
15	DAS Batang Jujuhan	1,597.04	8.35	248.72	20.77
16	DAS Batang Langsisip	646.79	8.48	18.73	1.59
17	DAS Cempengan	296.95	10.19	1.00	0.10
18	DAS Sumai	1,157.50	8.41	29.60	2.49
19	DAS Batang Tebo	5,178.72	7.84	243.87	19.12
20	DAS Kilis	267.93	10.43	64.65	6.74
21	DAS Ketalo	349.76	9.75	33.52	3.27
22	DAS Batang Tabir	3,144.66	8.13	207.55	16.87
23	DAS Rengas	379.64	9.50	378.46	35.95
24	DAS Singkatigedang	378.14	9.52	360.15	34.29
25	DAS Batang Tembesi	13,105.44	6.72	370.05	24.87
26	DAS Danau Bangko	417.79	9.19	362.31	33.30
27	DAS Kaos	423.22	9.14	635.36	58.07
28	Batang Kumpeh	1,262.19	8.39	118.24	9.92
29	DAS Batanghari	9,525.96	7.23	135.70	9.81
JUMLAH		52,370.08		5280.12	467.33

Sumber : Hasil analisis, 2008

4. Pencemaran Air Sungai

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, pada beberapa titik pemantauan sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.3** berikut:

Tabel 3.3 Pemantauan Kualitas Air Sungai di WS Batanghari

No.	Lokasi Pemantauan	Parameter								Keterangan
		Fisik		Kimia					Mikro biologi	
		Keruh	Zat Terlarut	Fe	Ch	BOD	CO D	pH	Coli	
1.	Danau Kerinci'	15,4	122	0,14	5,6	5	8	6,8	989	memenuhi
2	BtTebo/Air Gemuruh	7,4	58	0,02	3,7	2	6	8	1750	memenuhi
3	Pulau Mosang	10,2	72,8	0,02	7,4	4	6	7,9	1600	memenuhi
4	Muara Tembesi	6	46	0,04	5,6	5	3	8,3	2500	memenuhi
5	S.Duren, Kota Jambi	5,2	44,2	0,0	5,6	4	5	5	1200	memenuhi

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut maka kualitas air sungai tersebut pada tabel di atas, belum mengalami pencemaran dan masih di bawah ambang batas persyaratan kualitas air.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tk I Jambi, Nomor 84 Tahun 1996, air sungai tersebut pada tabel di atas memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air baku untuk pengolahan air minum.

Dengan adanya 27 (dua puluh tujuh) pertambangan yang membuang limbah berbahaya mengandung unsur merkuri ke sungai, maka perlu ditambahkan titik pengamatan/pemantauan kualitas air di bagian hulu dari lokasi penambangan serta upaya pengendalian pencemaran melalui pengaturan oleh pemerintah daerah mengenai persyaratan limbah penambangan yang dibuang ke sungai dengan terlebih dahulu melalui proses pengolahan limbah.

5. Ekstensifikasi Hutan Gambut

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi terdapat lahan gambut yang cukup luas. Di ke 3 (tiga) Kabupaten ini terdapat hutan lindung dan hutan suaka alam (pelestarian alam dan cagar budaya).

Dalam rangka pelestarian lingkungan udara, khususnya pelaksanaan program langit biru, maka perlu dilakukan upaya rehabilitasi lahan dan hutan gambut di lokasi hutan lindung dan hutan suaka alam tersebut serta upaya ekstensifikasi hutan gambut di ke 3 (tiga) Kabupaten tersebut di atas

b. Analisa Pendayagunaan Sumber Daya Air

1. Transportasi Air

Sebagian besar sungai-sungai di WS Batanghari masih digunakan untuk transportasi air dari daerah perdesaan ke perkotaan, hal ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang belum terjangkau oleh moda transportasi darat.

Upaya konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, khususnya yang dilakukan di tepi sungai diusahakan untuk selalu memperhatikan pengembangan transportasi air. Sebagai contoh antara lain kegiatan konservasi sumber daya air dilakukan dengan upaya penetapan sempadan sungai dapat diselaraskan dengan akses transportasi air di tepi sungai,

2. Analisis Ketersediaan Air

Hasil analisis ketersediaan air di WS Batanghari sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.4.** berikut:

Tabel 3.4 Ketersediaan Air WS Batanghari

No	DAS	DAS	Luas Km2	Hujan mm/tahun	Runoff Rata2 mm/hari	Ketersediaan Air (m3/s)			Ketersediaan Air (Juta m3/tahun)		
						Rata- rata	Q80%	Q90%	Rata- rata	Q80%	Q90%
1	DAS Bentano	DAS Bentano	840	2,004	2.806	27.28	8.33	5.18	3,382	1,087	607
2	DAS Mandahara	DAS Mandahara	1,175	2,002	2.803	38.12	11.63	7.23	4,725	1,520	848
3	DAS Pangkal Duri Besar	DAS Pangkal Duri Besar	259	2,003	2.803	8.41	2.57	1.6	1,042	335	187
4	DAS Tungkal	DAS Tungkal	4,118	1,760	2.142	102.1	28.15	20	14,559	4,682	2,614
5	DAS Batang Bangko	DAS Batanghari	716	1,949	2.61	21.64	6.53	3.15	2,803	901	503
6	DAS Batang Gumati	DAS Batanghari	1,086	2,184	3.249	40.85	12.78	5.63	4,765	1,532	855
7	DAS Batang Jujuhan	DAS Batanghari	1,597	2,183	3.247	60.01	18.84	8.28	7,003	2,252	1,257
8	DAS Batang Kumpeh	DAS Batanghari	1,262	2,000	2.798	40.88	12.46	7.75	5,070	1,630	910
9	DAS Batang Langsisip	DAS Batanghari	647	1,980	2.652	19.85	5.78	3.11	2,573	828	462
10	DAS Batang Monjong	DAS Batanghari	359	2,184	3.25	13.49	4.22	1.86	1,575	506	283
11	DAS Batang Pangean	DAS Batanghari	741	2,182	3.245	27.83	8.71	3.84	3,248	1,044	583

No	DAS	DAS	Luas Km2	Hujan mm/tahun	Runoff Rata2 mm/hari	Ketersediaan Air (m3/s)			Ketersediaan Air (Juta m3/tahun)		
						Rata- rata	Q80%	Q90%	Rata- rata	Q80%	Q90%
12	DAS Batang Sangir	DAS Batanghari	1,190	1,911	2.511	34.58	10.09	4.92	4,568	1,469	820
13	DAS Batang Siat	DAS Batanghari	1,172	2,183	3.247	44.05	13.78	6.07	5,139	1,653	923
14	DAS Batang Sipotan	DAS Batanghari	338	2,184	3.25	12.73	3.98	1.75	1,483	477	266
15	DAS Batang Tabir	DAS Batanghari	3,145	1,514	1.583	57.61	11.77	8.58	9,565	3,076	1,717
16	DAS Batang Talantan	DAS Batanghari	323	2,184	3.25	12.16	3.81	1.68	1,417	456	254
17	DAS Batang Tebo	DAS Batanghari	5,179	2,101	2.939	176.18	47.86	29.68	21,858	7,029	3,924
18	DAS Batang Tembesi	DAS Batanghari	13,105	2,257	3.311	502.3	185.39	95.8	59,416	19,106	10,667
19	DAS Batanghari	DAS Batanghari	9,526	1,852	2.288	252.29	86.45	51.01	35,439	11,396	6,362
20	DAS Cempengan	DAS Batanghari	297	941	0.704	2.42	0.48	0.35	561	181	101
21	DAS Danau Bangko	DAS Batanghari	418	1,992	2.747	13.28	4.29	2.61	1,673	538	300
22	DAS Kaos	DAS Batanghari	423	2,004	2.806	13.75	4.2	2.61	1,703	548	306
23	DAS Ketalo	DAS Batanghari	350	1,088	0.832	3.37	0.73	0.59	765	246	137
24	DAS Kilis	DAS Batanghari	268	941	0.704	2.18	0.44	0.32	507	163	91
25	DAS Mungoh	DAS Batanghari	97	2,182	3.245	3.64	1.14	0.5	425	137	76

No	DAS	DAS	Luas Km2	Hujan mm/tahun	Runoff Rata2 mm/hari	Ketersediaan Air (m3/s)			Ketersediaan Air (Juta m3/tahun)		
						Rata- rata	Q80%	Q90%	Rata- rata	Q80%	Q90%
26	DAS Rengas	DAS Batanghari	380	1,960	2.676	11.76	3.82	2.36	1,496	481	269
27	DAS Singkatigedang	DAS Batanghari	378	1,959	2.674	11.7	3.8	2.35	1,488	478	267
28	DAS Sumai	DAS Batanghari	1,157	941	0.704	9.43	1.88	1.37	2,187	703	393
29	DAS Air Hitam	DAS Air Hitam	1,823	1,998	2.792	58.92	17.95	11.16	7,317	2,353	1,314
Jumlah			52,370	1,884	2.547	1,622.81	521.85	291.35	207,753	66,806	37,297

Sumber: Hasil Analisis

3. Analisis Kebutuhan Air

Proyeksi Penduduk (2008-2028).

Untuk mengetahui kebutuhan akan sumber daya air di masa yang akan datang maka harus diketahui pula proyeksi penduduk di Wilayah Sungai Batanghari pada tahun mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dilakukan untuk Tahun 2008, Tahun 2013, Tahun 2018, Tahun 2023 dan Tahun 2028 yang dibagi berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3.5 Proyeksi Jumlah Penduduk di WS Batanghari

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2006	Proyeksi Penduduk				
			2008	2013	2018	2023	2028
1	Kabupaten Kerinci	311,354	314,417	322,206	330,189	338,369	346,752
2	Kabupaten Merangin	289,296	298,091	321,266	346,243	373,161	402,173
3	Kabupaten Sorolangun	205,090	213,159	234,746	258,520	284,702	313,535
4	Kabupaten Batanghari	217,935	225,547	245,760	267,784	291,782	317,931
5	Kabupaten Muaro Jambi	272,541	282,316	308,313	336,705	367,712	401,573
6	Kabupaten Tanjab Timur	210,821	216,482	231,310	247,152	264,080	282,167
7	Kabupaten Tanjab Barat	245,224	262,312	310,424	367,361	434,742	514,481
8	Kabupaten Tebo	257,070	268,085	297,730	330,654	367,218	407,826
9	Kabupaten Bungo	251,096	256,314	269,840	284,079	299,069	314,851
10	Kota Jambi	452,560	471,805	523,574	581,024	644,777	715,525
11	Kabupaten darmasraya Padang	170,440	181,418	212,059	247,874	289,738	338,673
12	Kabupaten Solok Padang	347,288	365,318	414,597	470,522	533,992	606,023
13	Kabupaten Solok Selatan	135,744	145,528	173,184	206,097	245,265	291,876
14	Kabupaten Sawah Lunto	196,667	204,656	226,075	249,737	275,876	304,750

Sumber: Hasil analisis, 2008

Kebutuhan Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri.

Untuk mendapat kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri dianalisis berdasarkan proyeksi jumlah kebutuhan dengan standar kebutuhan air, seperti diuraikan **Tabel 3.6** sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kebutuhan Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri

No	DAS	2008	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun	2013	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun	2018	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/tahun	Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/tahun	Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/tahun
1	DAS Sumai	13,508	0.0360	0.0047	0.0407	1.2644	14,914	0.0397	0.0052	0.0449	1.3959	16,319	0.0434	0.0057	0.0491	1.5275
2	DAS Air Hitam	8,355	0.0222	0.0029	0.0251	0.7820	8,818	0.0235	0.0031	0.0265	0.8254	9,282	0.0247	0.0032	0.0279	0.8688
3	DAS Batang Kumpeh	86,356	0.2299	0.0300	0.2599	8.0830	94,890	0.2526	0.0329	0.2855	8.8817	103,381	0.2752	0.0359	0.3111	9.6765
4	DAS Kaos	6,259	0.0167	0.0022	0.0188	0.5858	7,049	0.0188	0.0024	0.0212	0.6598	7,839	0.0209	0.0027	0.0236	0.7338
5	DAS Danau Bangko	7,014	0.0187	0.0024	0.0211	0.6565	7,107	0.0189	0.0025	0.0214	0.6652	7,167	0.0191	0.0025	0.0216	0.6708
6	DAS Singkatigedang	5,352	0.0142	0.0019	0.0161	0.5009	5,423	0.0144	0.0019	0.0163	0.5076	5,469	0.0146	0.0019	0.0165	0.5119
7	DAS Rengas	4,597	0.0122	0.0016	0.0138	0.4302	4,658	0.0124	0.0016	0.0140	0.4360	4,697	0.0125	0.0016	0.0141	0.4396
8	DAS Ketalo	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
9	DAS Kilis	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
10	DAS Cempengan	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
11	DAS Batang Langsisip	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
12	DAS Mungoh	15,625	0.0416	0.0054	0.0470	1.4625	16,951	0.0451	0.0059	0.0510	1.5866	18,248	0.0486	0.0063	0.0549	1.7080
13	DAS Batang Jujuhan	44,777	0.1192	0.0155	0.1347	4.1912	47,274	0.1258	0.0164	0.1423	4.4249	47,526	0.1265	0.0165	0.1430	4.4484
14	DAS Batang Siat	65,617	0.1747	0.0228	0.1975	6.1418	67,026	0.1784	0.0233	0.2017	6.2737	67,937	0.1809	0.0236	0.2044	6.3589
15	DAS Batang Sipotan	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
16	DAS Batang Monjong	6,348	0.0169	0.0022	0.0191	0.5942	6,484	0.0173	0.0023	0.0195	0.6069	6,573	0.0175	0.0023	0.0198	0.6152
17	DAS Batang Pangean	46,539	0.1239	0.0162	0.1400	4.3561	47,299	0.1259	0.0164	0.1423	4.4272	47,806	0.1273	0.0166	0.1439	4.4746
18	DAS Batang Talantan	6,492	0.0173	0.0023	0.0195	0.6077	6,666	0.0177	0.0023	0.0201	0.6239	6,778	0.0180	0.0024	0.0204	0.6344
19	DAS Batang Sangir	123,049	0.3276	0.0427	0.3703	11.5174	126,302	0.3362	0.0439	0.3801	11.8219	128,585	0.3423	0.0446	0.3869	12.0356
20	DAS Batang Tabir	86,736	0.2309	0.0301	0.2610	8.1185	87,951	0.2341	0.0305	0.2647	8.2323	88,907	0.2367	0.0309	0.2675	8.3216
21	DAS Batang Tembesi	591,858	1.5755	0.2055	1.7811	55.3979	619,428	1.6489	0.2151	1.8640	57.9785	645,987	1.7196	0.2243	1.9439	60.4644
22	DAS Batang Tebo	306,263	0.8153	0.1063	0.9216	28.6662	329,684	0.8776	0.1145	0.9921	30.8584	353,093	0.9399	0.1226	1.0625	33.0495
23	DAS Batang Gumali	11,297	0.0301	0.0039	0.0340	1.0574	11,517	0.0307	0.0040	0.0347	1.0780	11,659	0.0310	0.0040	0.0351	1.0913
24	DAS Batang Bangko	31,030	0.0826	0.0108	0.0934	2.9045	31,859	0.0848	0.0111	0.0959	2.9820	32,395	0.0862	0.0112	0.0975	3.0322
25	DAS Batanghari	1,205,290	3.2085	0.4185	3.6270	112.8152	1,262,677	3.3613	0.4384	3.7997	118.1866	1,317,630	3.5076	0.4575	3.9651	123.3302
26	DAS Pangkal Duri Besar	7,767	0.0207	0.0027	0.0234	0.7270	7,994	0.0213	0.0028	0.0241	0.7483	8,141	0.0217	0.0028	0.0245	0.7620
27	DAS Bentano	45,023	0.1199	0.0156	0.1355	4.2142	46,341	0.1234	0.0161	0.1395	4.3376	47,193	0.1256	0.0164	0.1420	4.4173
28	DAS Mandahara	39,862	0.1061	0.0138	0.1200	3.7311	42,075	0.1120	0.0146	0.1266	3.9382	44,287	0.1179	0.0154	0.1333	4.1453
29	DAS Tungkal	193,777	0.5158	0.0673	0.5831	18.1376	199,451	0.5309	0.0693	0.6002	18.6686	203,117	0.5407	0.0705	0.6112	19.0118

No	DAS	2023	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun	2028	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun	2033	Kebutuhan Air Rumah Tangga Perkotaan	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan RKI	Kebutuhan RKI/Tahun
		Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/Th	Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/th	Jiwa	m3/dtk	m3/dtk	m3/dtk	Juta m3/th
1	DAS Sumai	17724.342	0.047182855	0.006154285	0.05333714	1.658998411	19129.668	0.050923885	0.006642246	0.057566131	1.790536925	20534.994	0.054664915	0.007130206	0.061795121	1.922075438
2	DAS Air Hitam	9745.94376	0.025944063	0.003384008	0.029328072	0.912220336	10209.67066	0.027178521	0.003545025	0.030723546	0.955625174	10673.39756	0.02841298	0.003706041	0.03211902	0.999030012
3	DAS Batang Kumpeh	111852.0814	0.297754383	0.038837528	0.336591912	10.46935482	120311.5504	0.320273803	0.041774844	0.362048647	11.26116112	128763.3038	0.342772684	0.04470948	0.387482164	12.05224524
4	DAS Kaos	8629.61616	0.022972358	0.002996395	0.025968752	0.807732073	9419.94306	0.025076237	0.003270814	0.028347051	0.88170667	10210.26996	0.027180117	0.003545233	0.030725349	0.955681268
5	DAS Danau Bangko	7211.39484	0.019197	0.002503957	0.021700957	0.674986557	7246.747219	0.019291109	0.002516232	0.021807341	0.67829554	7276.075828	0.019369183	0.002526415	0.021895599	0.681040698
6	DAS Singkatgedang	5502.848985	0.014648788	0.001910711	0.016559499	0.515066665	5529.82557	0.0147206	0.001920078	0.016640679	0.517591673	5552.205555	0.014780177	0.001927849	0.016708026	0.51968644
7	DAS Rengas	4726.237233	0.012581419	0.001641055	0.014222473	0.442375805	4749.406639	0.012643096	0.0016491	0.014292196	0.444544461	4768.628158	0.012694265	0.001655774	0.014350038	0.446343596
8	DAS Ketalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DAS Kilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DAS Cempengan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAS Batang Langsisip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DAS Mungoh	19533.03595	0.051997665	0.006782304	0.058779969	1.828292165	20810.06487	0.055397163	0.007225717	0.06262288	1.947822072	22082.03895	0.058783206	0.007667375	0.06645058	2.066878846
13	DAS Batang Jujuhan	51926.91734	0.138231377	0.01803018	0.156261557	4.860359463	54182.21754	0.14423507	0.01881327	0.16304834	5.071455562	56412.29284	0.150171613	0.019587602	0.169759215	5.28019061
14	DAS Batang Siat	68611.41436	0.182646126	0.023823408	0.206469534	6.422028384	69146.91549	0.18407165	0.024009346	0.208080996	6.47215129	69591.1714	0.185254276	0.024163601	0.209417877	6.513733643
15	DAS Batang Sipotan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	DAS Batang Monjong	6637.782686	0.017670023	0.002304786	0.019974809	0.621296459	6689.58952	0.017807935	0.002322774	0.020130709	0.626145579	6732.568873	0.017922348	0.002337698	0.020260045	0.630168446
17	DAS Batang Pangean	48478.2099	0.12905079	0.016832712	0.145883502	4.537560447	48943.27243	0.130288804	0.016994192	0.147282996	4.581090299	49598.90724	0.132034128	0.017221843	0.149255971	4.642457718
18	DAS Batang Talantan	6860.894568	0.018263955	0.002382255	0.020646211	0.642179732	6926.788022	0.018439366	0.002405135	0.020844501	0.648347359	6981.453744	0.018584888	0.002424116	0.021009004	0.65346407
19	DAS Batang Sangir	130407.4126	0.347149362	0.045280352	0.392429714	12.20613381	131959.7169	0.351281654	0.045819346	0.397101	12.3514295	133334.4122	0.354941144	0.046296671	0.401237815	12.48010098
20	DAS Batang Tabir	89737.92496	0.23888568	0.031159002	0.270044682	8.399469776	90496.84984	0.240905966	0.031422517	0.272328483	8.470505145	91208.07326	0.242799269	0.03166947	0.274468739	8.537075657
21	DAS Batang Tembesi	672065.0634	1.78906209	0.233355925	2.022418015	62.90528993	697862.0195	1.857734543	0.242313201	2.100047744	65.31988502	723473.7987	1.925914047	0.25120618	2.177120227	67.71714755
22	DAS Batang Tebo	376498.0626	1.002251787	0.130728494	1.132980281	35.24021866	399899.8368	1.064548177	0.13885411	1.203402287	37.43062472	423299.6717	1.126839404	0.146979053	1.273818457	39.62084927
23	DAS Batang Gumati	11764.47975	0.031317481	0.004084889	0.03540237	1.101155304	11848.13017	0.031540161	0.004113934	0.035654095	1.108984984	11917.52722	0.031724899	0.00413803	0.035862929	1.115480548
24	DAS Batang Bangko	32791.48081	0.087292136	0.011385931	0.098678067	3.069282604	33106.41699	0.088130508	0.011495284	0.099625792	3.09876063	33367.69049	0.088826028	0.011586004	0.100412032	3.12321583
25	DAS Batanghari	1371427.934	3.650791954	0.476190255	4.126982208	128.3656546	1424548.785	3.792201626	0.494634995	4.286836621	133.3377663	1477224.191	3.932425509	0.512925066	4.445350575	138.2681843
26	DAS Pangkal Duri Besar	8250.020813	0.021961861	0.002864591	0.024826452	0.772201948	8336.425828	0.022191874	0.002894592	0.025086467	0.780289457	8408.1081	0.022382695	0.002919482	0.025302177	0.786998918
27	DAS Bentano	47823.93017	0.127309073	0.016605531	0.143914605	4.476319864	48324.80496	0.128642421	0.016779446	0.145421867	4.523201744	48740.33458	0.129748576	0.016923727	0.146672303	4.562095316
28	DAS Mandahara	46499.92704	0.123784528	0.016145808	0.139930336	4.352393171	48712.46464	0.129674385	0.01691405	0.146588435	4.55948669	50925.00224	0.135564242	0.017682292	0.153246535	4.76658021
29	DAS Tungkal	205831.4716	0.547931001	0.071469261	0.619400262	19.26582575	207987.2082	0.553669651	0.072217781	0.625887432	19.46760269	209775.624	0.558430481	0.072838758	0.631269239	19.63499841

Kebutuhan Air Irigasi.

Untuk mendapatkan data daerah irigasi dilakukan pengumpulan data mengenai lokasi daerah irigasi dan kondisi pemakaian air irigasi saat ini. Data didapat dari luas panen lahan sawah dari data dalam angka tiap kabupaten yang terletak dalam lokasi DAS Batanghari sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.7** berikut:

Tabel 3.7 Kebutuhan Air irigasi (m³/dt)

NO	KAB/KOTA	2008	2013	2018	2023	2028
1	Kabupaten Kerinci	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27
2	Kabupaten Merangin	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
3	Kabupaten Sorolangun	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
4	Kabupaten Batanghari	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
5	Kabupaten Muaro Jambi	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
6	Kabupaten Tanjab Timur	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
7	Kabupaten Tanjab Barat	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57
8	Kabupaten Tebo	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
9	Kabupaten Bungo	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
10	Kota Jambi	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
11	Kabupaten Darmasraya	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
12	Kabupaten Solok	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17
13	Kabupaten Solok Selatan	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51
14	Kabupaten Sawah Lunto	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52

Sumber: Hasil analisis, 2008

Kebutuhan Air untuk Ternak.

Kebutuhan air ternak diuraikan sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.8** berikut:

Tabel 3.8 Kebutuhan air ternak (m³/dt)

NO	KAB/KOTA	2008	2013	2018	2023	2028
1	Kabupaten Kerinci	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2	Kabupaten Merangin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kabupaten Sorolangun	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Kabupaten Batanghari	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5	Kabupaten Muaro Jambi	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6	Kabupaten Tanjab Timur	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
7	Kabupaten Tanjab Barat	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
8	Kabupaten Tebo	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
9	Kabupaten Bungo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Kota Jambi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
11	Kabupaten Darmasraya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-
13	Kabupaten Solok Selatan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	Kabupaten Sawah Lunto	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Total kebutuhan air untuk berbagai pemanfaatan tersebut per-DAS disajikan pada **Tabel 3.9** berikut :

Tabel 3.9 Proyeksi Kebutuhan air di WS Batanghari (m³/dt)

No	DAS	Kebutuhan air tahun (m ³ /dt)				
		2008	2013	2018	2023	2028
1	DAS Sumai	2.01	2.01	2.02	2.03	2.04
2	DAS Air Hitam	4.26	4.47	4.70	4.94	5.19
3	DAS Batang Kumpeh	11.52	11.92	12.34	12.79	13.26
4	DAS Kaos	3.30	3.22	3.14	3.07	2.99
5	DAS Danau Bangko	1.33	1.29	1.26	1.23	1.20
6	DAS Singkatigedang	1.17	1.15	1.12	1.09	1.06
7	DAS Rengas	1.98	1.94	1.89	1.84	1.80
8	DAS Ketalo	1.19	1.20	1.21	1.23	1.24
9	DAS Kilis	2.02	1.97	1.92	1.88	1.83
10	DAS Cempengan	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
11	DAS Batang Langsisip	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
12	DAS Mungoh	1.03	1.05	1.08	1.11	1.14
13	DAS Batang Jujuhan	12.98	13.32	13.67	14.07	14.48
14	DAS Batang Siat	10.03	10.51	11.02	11.55	12.11
15	DAS Batang Sipotan	2.76	2.90	3.05	3.20	3.36
16	DAS Batang Monjong	3.16	3.31	3.46	3.62	3.79
17	DAS Batang Pangean	5.24	5.44	5.66	5.89	6.13
18	DAS Batang Talantan	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

19	DAS Batang Sangir	15.56	16.03	16.53	17.05	17.61
20	DAS Batang Tabir	15.05	14.70	14.36	14.03	13.71
21	DAS Batang Tembesi	97.69	97.88	98.19	98.63	99.20
22	DAS Batang Tebo	34.34	34.68	35.06	35.50	35.99
23	DAS Batang Gumati	6.06	6.35	6.66	6.98	7.32
24	DAS Batang Bangko	11.75	12.33	12.95	13.60	14.27
25	DAS Batanghari	94.95	97.08	99.37	101.83	104.46
26	DAS Pangkal Duri Besar	3.55	3.67	3.81	3.95	4.10
27	DAS Bentano	4.13	4.18	4.23	4.29	4.35
28	DAS Mandahara	7.17	7.29	7.42	7.57	7.72
29	DAS Tungkal	27.04	28.15	29.31	30.54	31.83
	WS Batanghari	381.56	388.35	395.75	403.81	412.54

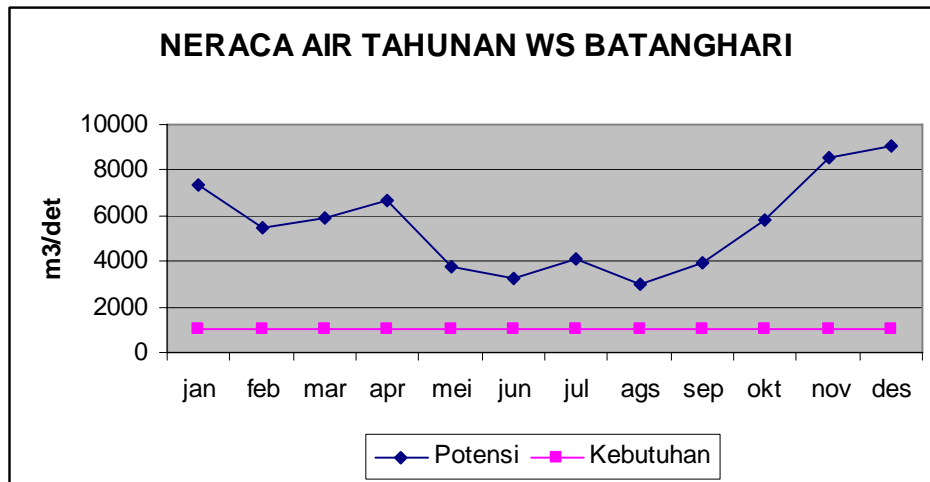
Sumber: Hasil analisis, 2008

4. Neraca Air Tahunan

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan air di atas serta analisis kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya pada WS Batanghari, maka diperoleh tabel dan neraca air sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.10 dan Gambar 3.2** sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tabel Neraca Air Tahunan (dalam juta m³)

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Potensi Air	7332	5438	5927	6631	3757	3240	4109	2969	3940	5840	8544	9079
Kebutuhan Air	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022



Gambar 3.2 Grafik Neraca Air Tahunan

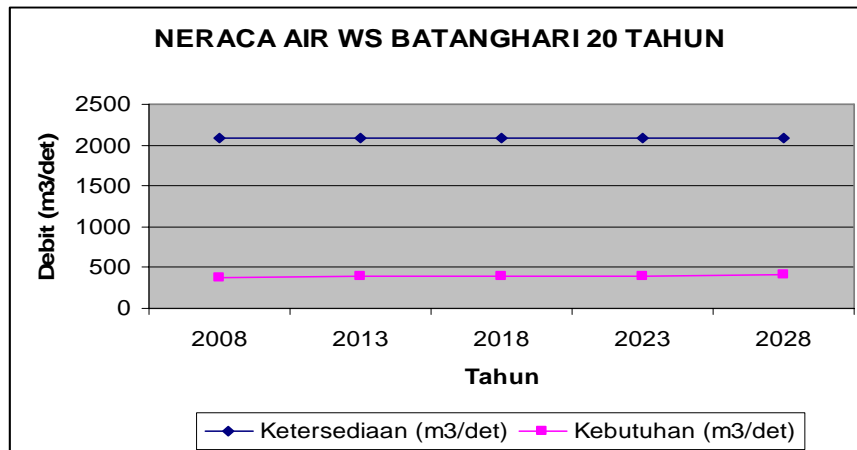
Berdasarkan neraca air tahunan tersebut maka secara umum ketersediaan air di WS Batanghari selalu berada di atas kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), Irigasi dan lainnya.

5. Neraca Air 20 Tahun

Berdasarkan hasil analisis pembangkitan rangkaian data hujan aliran yang menggambarkan ketersediaan air 5, 10, 15, dan 20 tahun yang akan datang, beserta analisis kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya dengan asumsi kebutuhan 5, 10, 15 dan 20 tahun ke depan, maka disusun **Tabel 3.11** dan neraca air sebagaimana tercantum dalam **Gambar 3.3** sebagai berikut :

Tabel 3.11 Neraca Air 20 Tahun

URAIAN	2008	2013	2018	2023	2028
Ketersediaan (m ³ /det)	2080.3 01	2080.3 01	2080.3 01	2080.3 01	2080.3 01
Kebutuhan (m ³ /det)	381.56 42	388.35 42	395.74 94	403.80 81	412.54 13



Gambar 3.3 Grafik Neraca Air 20 Tahun

6. Alokasi Air

Berdasarkan simulasi neraca air dapat dikatakan untuk permasalahan potensi air secara umum sangat cukup, yang diperlukan adalah pelestarian dan penataan pendayagunaan sumber daya air, sehingga masalah utama yang paling mendesak untuk WS Batanghari adalah pengendalian daya rusak air khususnya banjir yang tiap tahun melanda. Dari hasil analisis alokasi air untuk kondisi sekarang maupun pengembangan 20 (dua puluh) tahun mendatang, terlihat pada beberapa sub DAS mengalami kekurangan air yakni untuk DI Sei Betuk dan DI di Kec. Sopian yang berada pada DAS Tembesi. Oleh karena itu pada DAS ini perlu dicarikan solusi pemenuhan kebutuhan airnya terutama untuk irigasi dengan membangun sarana dan prasarana penunjang baik di dalam DAS maupun kemungkinan *interbasin water transfer*. Sementara untuk Rawa Singkut dan Lagan hulu, tidak dianggap kekurangan air karena wilayahnya yang berupa rawa pasang surut dan secara potensi sebenarnya air sangat berlimpah hanya diperlukan pengelolaan yang lebih baik.

c. Analisis Pengendalian Daya Rusak Air

1. Daerah Rawan Banjir

Walaupun propinsi Jambi mempunyai kawasan hutan dan kawasan perkebunan yang cukup luas, tetapi karena terjadi perambahan hutan serta pembukaan lahan di daerah hulu yang tidak memperhatikan ekosistem, maka di beberapa lokasi di hilir dari DAS yang terganggu tersebut timbul banjir. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Provinsi Jambi, daerah yang rawan banjir adalah sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.12** sebagai berikut:

Tabel 3.12 Daerah Rawan Banjir di WS Batanghari

Kabupaten/ Kecamatan	Pertanian (ha)	Pemukiman (ha,Desa,KK)	Jumlah (ha)	Sungai
Kerinci	6.500	1550, 291, 550	8.275	Bt. Merao, Bt. Bungkal dll.
Merangin	620	300, 3, 300	1.313	Mesumai
Sarolangun	1.620	85, 14, 700	3.720	Bt. Asai, Limun dan Tembesi
Bungo	1.583	130, 9, 525	2.064	Bt. Tebo, Bungo dan Jujuhan
Tebo	382	53, 7, 575	1.072	Bt. Tebo
Batanghari	4.660	905, 36, 9189	14.035	Batanghari, Tembesi
Muara Jambi	8.565	1220, 43, 10.158	50.650	Batanghari
Kota Jambi		458, 33, 4300	608	Batanghari
Tanjab Barat	9.370	268, 21, 920	47.978	Pengabuhan, Tungkal
Tanjab Timur	29.110	832, 27, 1.285	98.568	Batanghari
Jumlah total	62.410	504, 222, 29502	228.283	

Sumber : Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Provinsi Jambi

2. Kerusakan Sungai

Pada daerah hulu dan bagian tengah Sungai Batanghari terdapat kerusakan sungai berupa longsonya tepi/tebing sungai yang diakibatkan terjadinya banjir serta adanya usaha pembukaan lahan ditepi sungai. Kerusakan sungai; berupa tepi/tebing sungai yang longsor sebagaimana tercantum dalam pada **Tabel 3.13** sebagai berikut:

Tabel 3.13 Kerusakan Sungai

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Kerusakan (km)
1.	Batanghari	775	248
2.	Batang Tebo	185	49
3.	Batang Tabir	140	42
4.	Batang Merangin-Tembesi	210	86

Sumber: Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

Dengan mengingat kerusakannya yang mencapai 25-40%, maka perlu dilakukan upaya perkuatan tepi/tebing sungai.

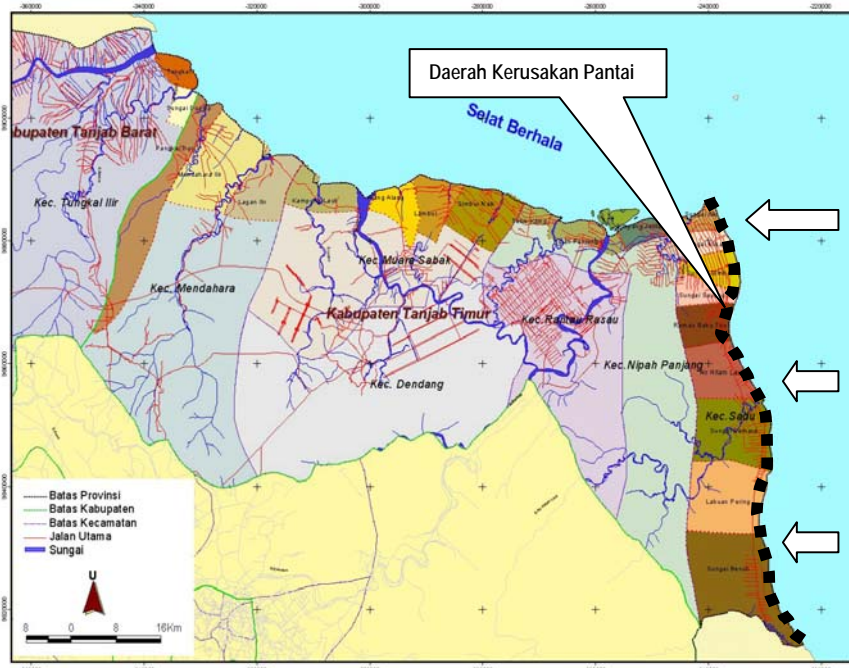
3. Kerjasama Hulu-Hilir

Dengan mengingat luasnya daerah rawan banjir, kerusakan sungai yang mencapai 25-40% baik di hulu maupun di hilir yang mengakibatkan dampak ekonomi bagi masyarakat di WS Batanghari serta melibatkan banyak pihak yang terkait, maka diperlukan upaya kerjasama terpadu antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang berada di hulu dan hilir dalam pengendalian daya rusak air.

4. Kerusakan Pantai

Pada WS Batanghari terdapat pantai yang merupakan dataran rendah dari pantai timur Pulau Sumatera. Karakteristik gelombang laut pada pantai Pulau Sumatera sangat dipengaruhi oleh angin timur yang menyebabkan terjadi abrasi pada sebagian besar pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Panjang pantai di WS Batanghari adalah 270 km, sedangkan yang rusak dan memerlukan penanganan adalah 18 km. Peta lokasi kerusakan pantai sebagaimana tercantum dalam **Gambar 3,4**



Gambar 3.4 Peta Lokasi Kerusakan Pantai

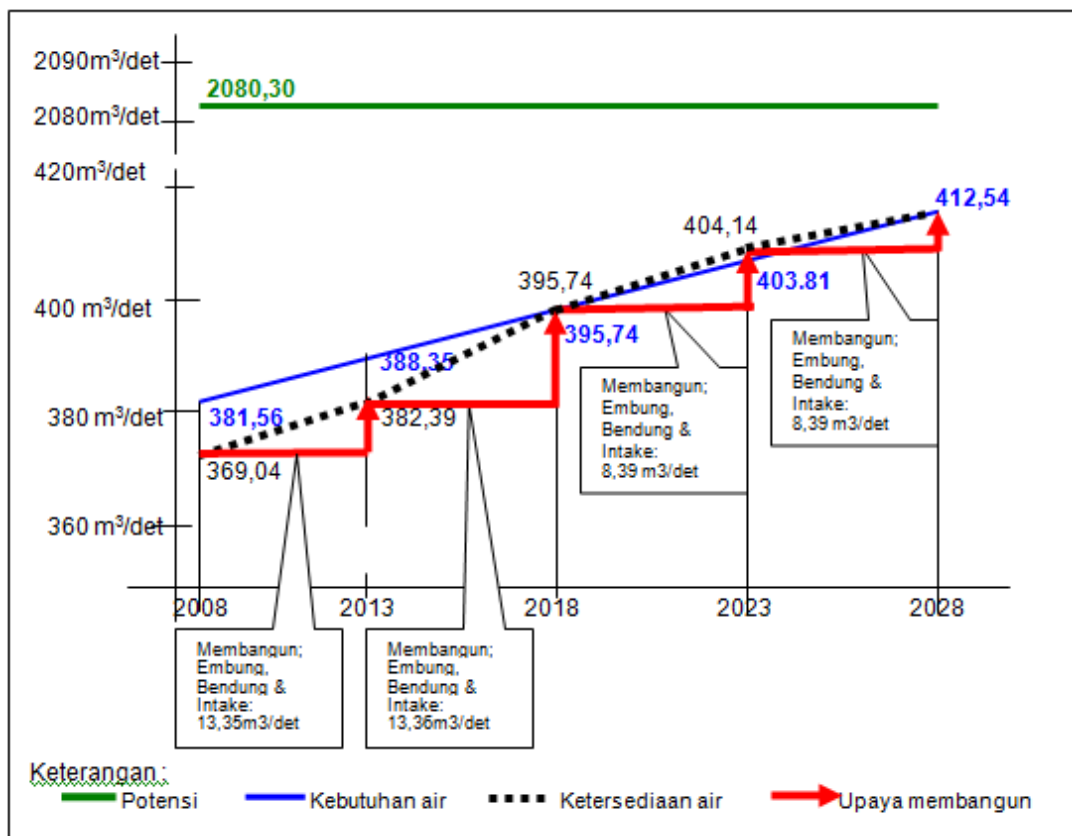
3.2 Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi, misalnya, kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik. Dengan mengingat sulitnya melakukan asumsi terhadap kondisi perubahan iklim dan perubahan politik yang akan terjadi pada masa yang akan datang maka dilakukan pendekatan untuk menggunakan asumsi kondisi perekonomian.

Skenario kondisi WS Batanghari akan ditetapkan dengan menggunakan tinjauan terhadap kondisi perkonomian tinggi, sedang dan rendah dengan kriteria sebagai berikut:

- Skenario 1: pertumbuhan ekonomi rendah apabila pertumbuhan ekonomi < 4,5%
- Skenario 2: pertumbuhan ekonomi sedang apabila pertumbuhan ekonomi 4,5% - 6,5%
- Skenario 3: pertumbuhan ekonomi tinggi apabila pertumbuhan ekonomi > 6,5%

a. Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Rendah



Gambar 3.5 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Rendah

Periode 2008-2013

Pada Tahun 2008, air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang untuk RKI, Irigasi/Rawa dan lainnya adalah sebesar 369,04 m³/det, sedangkan kebutuhan air pada Tahun 2008 mencapai 381,5 m³/det, sehingga terdapat defisit air sebesar 12,53 m³/det.

Dengan skenario pada kondisi ekonomi rendah, kemampuan untuk membangun prasarana sumber daya air sangat rendah.

Untuk memenuhi kebutuhan air disusun strategi yaitu dengan membangun bendung di Kab. Sarolangun dan *intake* (pengambilan air baku pada sungai) di Kab. Dharmasraya, Kab. Bungo, Kota Jambi dengan kapasitas total 13,35 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2013 dapat mencapai 382,39 m³/det. Pada kondisi ini masih terdapat defisit air sebesar 8,96 m³/det.

Periode 2013-2018

Untuk memenuhi kebutuhan air disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab. Sijunjung/Sawah Lunto), dan *intake* (di Kab.Solok Selatan, Kab.Kerinci, Kab.Tebo, Kab.Tanjab Timur), dengan kapasitas total 13,35 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2018 dapat mencapai 395,75 m³/det. Pada saat ini diharapkan tidak terjadi defisit air.

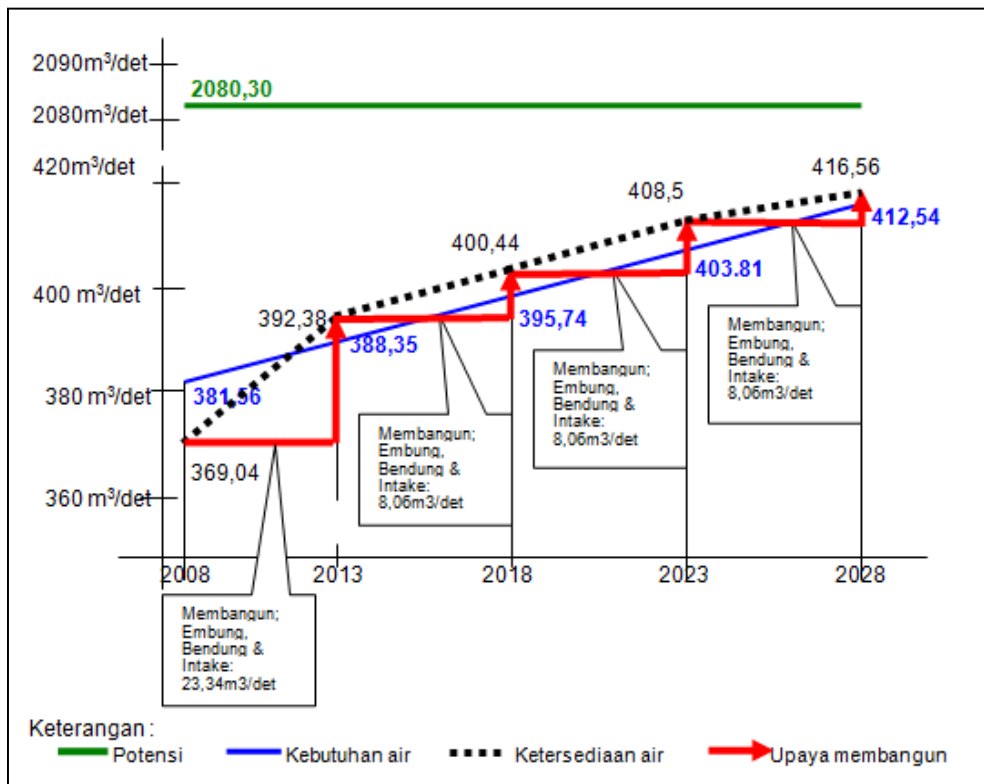
Periode 2018-2023

Untuk memenuhi kebutuhan air disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Bungo, Kab.Tanjab Timur) dan *intake* (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Sarolangun, Kab.Kerinci) dengan kapasitas total 8,39 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2023 dapat mencapai 404,14 m³/det. Pada saat ini terdapat surplus air sebesar 0.33 m³/det.

Periode 2023-2028

Untuk memenuhi kebutuhan air disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Tebo, Kab.Sarolangun) dan *intake* (di Kab.Merangin, Kab.Muaro Jambi) dengan kapasitas total 8,39 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2028 dapat mencapai 412,54 m³/det. Pada saat ini diharapkan tidak terjadi defisit air.

b. Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Sedang



Gambar 3.6 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Sedang

Periode 2008-2013

Pada Tahun 2008, air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang untuk RKI, Irigasi/Rawa dan lainnya adalah sebesar 369,04 m³/det, sedangkan kebutuhan air pada Tahun 2008 mencapai 381,5 m³/det, sehingga terdapat defisit air sebesar 12,53 m³/det.

Dengan skenario pada kondisi ekonomi sedang, kemampuan untuk membangun prasarana sumber daya air cukup untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2013. Untuk itu disusun strategi antara lain dengan membangun embung (di Kab.Solok Selatan, Kab.Bungo), bendung (di Kab.Sarolangun) dan intake (di Kab.Dharmasraya, Kab.Bungo, Kota Jambi) kapasitas total 23,34 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2013 dapat mencapai 392,38 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,03 m³/det.

Periode 2013-2018

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2018 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Solok Selatan, Kab.Dharmasraya) dan intake (Kab.Solok Selatan, Kab.Kerinci, Kab.Tebo, Kab.Sarolangun, Kab.Tanjab Timur) dengan kapasitas total 8,06 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2018 dapat mencapai 400,44 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,7 m³/det.

Periode 2018-2023

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2023 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Dharmasraya, Kab.Bungo, Kab.Kerinci dan Kota Jambi) dan intake (di Kab.Solok Selatan, Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Bungo, Kab.Sarolangun, Kab.Muaro Jambi, Kota Jambi, Kota Kerinci) dengan kapasitas total 8.06 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2023 dapat mencapai 408,5 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,69 m³/det.

Periode 2023-2028

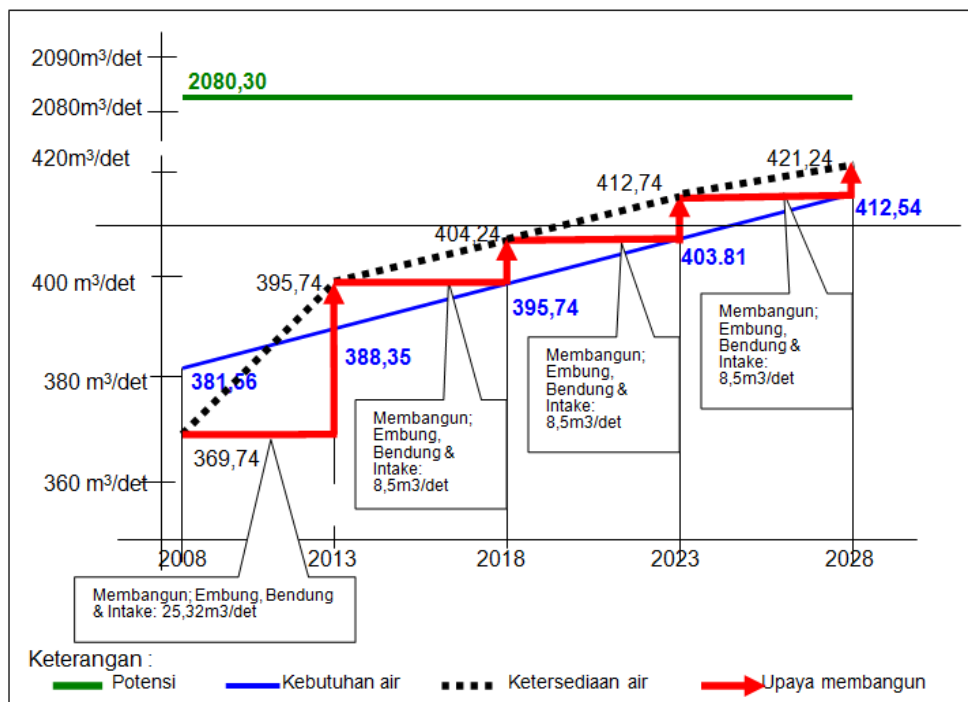
Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2028 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Tebo, Kab.Sarolangun), dan intake (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Muaro Jambi) dengan kapasitas total 8.06 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2028 dapat mencapai 416,56 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 4,03 m³/det.

c. Neraca Air Skenario Ekonomi Tinggi**Periode 2008-2013**

Pada Tahun 2008, air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang untuk RKI, Irigasi/Rawa dan lainnya adalah sebesar 363,03 m³/det, sedangkan kebutuhan air pada Tahun 2008 mencapai 381,5 m³/det, sehingga terdapat defisit air sebesar 12,53 m³/det.

Dengan skenario pada kondisi ekonomi tinggi, kemampuan untuk membangun prasarana sumber daya air cukup tinggi oleh karena itu pemenuhan kebutuhan air pada Tahun 2013 dapat mencukupi sampai Tahun 2018. Untuk

itu disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Solok Selatan, Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Tebo), bendung (di Kab.Sarolangun) dan intake (di Kab.Solok Selatan, Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Tebo, Kab.Bungo, Kab.Tanjab Timur dan Kota Jambi) dengan kapasitas total 25,32 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2013 dapat mencapai 395,74 m³/det. Pada kondisi ini tidak terdapat defisit air.



Gambar 3.7 Grafik Neraca Air WS Batanghari pada Skenario Ekonomi Tinggi

Periode 2013-2018

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2018 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Solok Selatan, Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Bungo, Kota Jambi) dan intake (di Kab.Solok Selatan, Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Tebo, Kab.Bungo, Kab.Sarolangun, Kab.Tanjab Timur dan Kota Jambi) dengan kapasitas total 8.5 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2018 dapat mencapai 404,24 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 8,5 m³/det.

Periode 2018-2023

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2023 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Dharmasraya, Kab.Kerinci, Kab.Tebo, Kab.Bungo, Kab.Sarolangun, Kab.Tanjab Timur) dan intake (di Kab.Solok Selatan, Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Merangin, Kab.Bungo, Kab.Sarolangun, Kab.Batanghari, Kab.Muaro Jambi, Kota Jambi, Kota Kerinci) dengan kapasitas total 8.5 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2023 dapat mencapai 412,74 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 8,93 m³/det.

Periode 2023-2028

Untuk memenuhi kebutuhan air sampai Tahun 2028 disusun strategi yaitu dengan membangun embung (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.Tebo dan Kab.Sarolangun) dan intake (di Kab.Sijunjung/Sawah Lunto, Kab.Merangin, Kab.batanghari, Kab.Tanjab Barat dan Kab.Muaro Jambi) dengan kapasitas total 8.5 m³/det sehingga jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/terpasang pada Tahun 2028 dapat mencapai 421,24 m³/det. Pada kondisi ini terdapat surplus air sebesar 8,7 m³/det, diharapkan mampu mencukupi kebutuhan air 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Alternatif Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Aspek Konservasi Sumber Daya Air

1. Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyanggah maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur
2. Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur

3. Upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan hutan
4. Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab. Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur
5. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
6. Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan
7. Penyusunan peraturan daerah tentang keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit
8. Meninjau, melihat kembali dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah

b. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

1. Menetapkan zona penyediaan Sumber Daya Air, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik
2. Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga
3. Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana OP penyediaan air baku
4. Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya
5. Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo
6. Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan
7. Peningkatan pembiayaan dan kegiatan OP infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri
8. Peningkatan pembiayaan dan kegiatan OP irigasi
9. Pembangunan PLTN dan PLTA
10. Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan
11. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota
12. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap Kab./Kota

13. Terpelihara dan terjaganya mutu/kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari
14. Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan OP
15. Menetapkan kriteria bagian Sumber Daya Air yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik

c. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

1. Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain ground sill, revetment, retaining wall, dan tanggul
2. Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari
3. Normalisasi sungai-sungai
4. Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari
5. Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak
6. Pemasangan *flood warning system* WS Batanghari
7. Mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil
8. Pengerukan muara di S. Batanghari
9. Penyusunan peta resiko banjir (*flood hazard map*) untuk daerah rawan banjir
10. Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir
11. Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih
12. Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan prasarana pengendali banjir
13. Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, *check dam*)
14. Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup

d. Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

1. Pelaksanaan pengelolaan aset sumber daya air, pemantauan dan evaluasi
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset sumber daya air, pemantauan dan evaluasi
3. Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan pelatihan.

e. Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

1. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan *stakeholder* (TKPSDA) terkait
2. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha
3. Pemantauan dan pengawasan masyarakat

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS BATANGHARI

Dalam Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa salah satu muatan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang merupakan arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah ditentukan, misalnya, arahan pokok yang harus dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang harus disusun sebagai instrumen untuk:

- a. penghematan penggunaan air, antara lain, penerapan tarif progresif; dan
- b. mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain, baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum.

Dalam pasal 16 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air harus memuat alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario.

Strategi pengelolaan sumber daya air merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan skenario kondisi wilayah sungai.

Karena Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai disusun untuk jangka 20 (dua puluh) tahun dan dalam skenario didasarkan analisis kondisi tingkat perekonomian (kuat, sedang dan rendah) maka untuk pencapaian target 20 tahun ke depan diperlukan strategi pengelolaan sumber daya air yang merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam tahapan:

- a. jangka pendek 5 (lima) tahun;
- b. jangka menengah 10 (sepuluh) tahun, dan
- c. jangka panjang 20 (dua puluh) tahun dalam sebuah matrik di bawah ini.

Tabel 4.1 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Tinggi

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air		Untuk mencapai tujuan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, maka keberadaan Hutan Lindung dan Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur perlu dipertahankan penetapannya, direhabilitasi, ditingkatkan upaya pemeliharaan.	Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyanggah maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung	- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung Monitoring dan evaluasi	Selain penetapan status hutan lindung dan hutan suaka/taman nasional oleh pemerintah pusat, perlu didukung oleh peraturan daerah tentang RTRW di tingkat Provinsi dan Kab./Kota yang menetapkan kawasan tsb.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Balai PSDA Prov. BWS Sumatera VI
				- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung -Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar		
				Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan,	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar; perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi;		
				Tutupan Hutan lindung dan hutan suaka (taman nasional) telah mencapai 27% dari luas WS Batanghari, namun lokasinya kurang proporsional.	Utk tujuan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, maka perlu diusahakan penambahan luasnya, khususnya untuk hutan lindung di Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur	- Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab.Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur		
	Luas DAS Kritis yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.	Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan menjadi DAS yang tidak kritis.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 50% dari seluruh luas lahan kritis:	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 100% dari seluruh luas lahan kritis:	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 100% dari seluruh luas lahan kritis; Monitoring dan evaluasi	Perlu ada penancangan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat Prov., Kab./Kota tentang upaya terpadu untuk pemulihan lahan atau DAS Kritis.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI	

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
		Tingkat erosi lahan pada WS Batanghari masuk dalam kategori sedang, dengan kemiringan lereng bagian hulu antara 2 % sampai dengan 3 % yang disebabkan oleh adanya pengolahan tanah/lahan pertanian, perkebunan dan hutan produksi yang tidak memperhatikan norma konservasi lahan.	Upaya pengendalian erosi lahan sehingga mencapai kategori rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan - Penegakan hukum - Monitoring dan evaluasi 	Penyiapan peraturan daerah tentang teknik pengolahan lahan pertanian,	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
2	Pengawetan air	Terjadi konflik antar sektor, khususnya terhadap perkebunan sawit yang dianggap melenyapkan keberadaan sumber2 air	Mengupayakan dibangunnya embung-embung pada setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan sawit, kebutuhan airnya terpenuhi dan tidak mengganggu keberadaan sumber air di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ttg kebutuhan air tanaman sawit, perbandingan luas lahan dengan volume embung sbg dasar penyusunan - Penyusunan perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Review perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Review perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum - Monitoring & evaluasi 	Penyiapan peraturan daerah di tingkat Prov., Kab./Kota tentang persyaratan membangun embung dgn volume tampungan tertentu sesuai dengan luas lahan kebun sawit yang ditanam	Bappeda,BLHD, Dinas Perkebunan di tingkat Prov., Kab./Kota
		Pengambilan air tanah secara besar-besaran akan mengganggu ekosistem keairan (siklus geohidrologi) di WS Batanghari	Upaya mengendalikan penggunaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum - Monitoring & evaluasi 	Perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Prov., Kab./Kota tentang prioritas penggunaan air permukaan untuk memenuhi semua kebutuhan air di WS Batanghari (seuai UU SDA dan PP 42/2008, ps 26) serta ketentuan dan persyaratan penggunaan air tanah beserta nilai restibusi yang menyertakan beban biaya untuk konservasi SDA	
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Pencemaran terjadi pada sungai-sungai yang melalui kota di WS Batanghari yang disebabkan oleh aktivitas PETI, pembuangan limbah rumah tangga.	Upaya pengendalian pencemaran air sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota (50%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, sesuai kondisi lingkungan - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota (100%) - Penegakan hukum, 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, sesuai kondisi lingkungan - Sosialisasi Review perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota - Penegakan hukum, - Monitoring dan Evaluasi 	Peraturan daerah di Tk Prov., Kab./Kota tentang persyaratan air limbah RT, Industri yang boleh dibuang ke badan air serta peraturan tentang golongan atau kelas sungai yang mencerminkan kualitas dan peruntukannya.	BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas PU/Bidang Cipta Karya di Tk Prov., Kab./Kota

Tabel 4.2 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Tinggi

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	Penatgunaan sumber daya air	Arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi telah sesuai dengan potensi SDA, kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, keberadaan CAT.	Dalam RTRW Kab/Kota perlu penetapan zona untuk fungsi lindung khususnya pada daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya	- Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - Upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung	Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. - Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan	- Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. - Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan Monitoring dan evaluasi	Perlu ditetapkan zona untuk fungsi lindung di kedua hulu sungai tersebut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2	Penyediaan sumber daya air	- Belum ada kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan - Belum ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi	- Terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga/domestik sebesar 80% - Pengembangan pelayanan/peningkatan kapasitas PDAM untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga daerah pedesaan	- Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 80% penduduk kota yang ada di WS Batanghari	Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 100% penduduk kota yang ada di WS Batanghari	Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 100% penduduk kota yang ada di WS Batanghari - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 100% penduduk kota yang ada di WS Batanghari	Perlu ada penetapan kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan Perlu ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi	Bappeda,BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU/bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.
		- PDAM hanya melayani air kebutuhan rumah tangga/domestik	- Pengembangan sistim penyediaan kebutuhan air perkotaan/municipal (taman, gelontor, hidran dll) dan industri secara terpadu	- Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga dmencaapai 80% penduduk pedesaan yang ada di WS Batanghari	- Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 100% penduduk pedesaan yang ada di WS Batanghari	- Evaluasi, Monitoring, O&P Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk kota	Perlu ada kebijakan pemerintah utk peningkatan pembangunan (investasi) infrastruktur sarana air bersih untuk RKI	

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
		- Kesulitan air baku utk PDAM karena kualitas dan kuantitas air baku yang menurun.	- Peningkatan, penyediaan sarana dan prasarana air baku	- Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku	- Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku	- Evaluasi, Monitoring, O&P prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk pedesaan	Pengaturan kerjasama antar daerah kekeringan air dan surplus air dlm penyediaan air baku utk RKI.	
		- Pelayanan penyediaan air irigasi utk lahan eksisting belum optimal karena fungsi bangunan dan jaringan belum optimal - Penyediaan air utk irigasi masih dapat ditingkatkan dengan pengembangan lahan irigasi baru - Penyediaan air untuk perkotaan, industri, perkebunan sawit DLL belum dapat terpenuhi	- Dikembangkan upaya pemenuhan kebutuhan air perkebunan tanpa mengganggu badan air di wilayahnya. Terbangunnya daerah irigasi baru di wilayah WS Batanghari	- Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya sebesar 50% dari potensial lahan irigasi - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo (70%) - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan	- Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya sebesar 100% dari potensial lahan irigasi - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo (100%) - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan	- Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya sebesar 100% dari potensial lahan irigasi - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo (100%) - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan Evaluasi, Monitoring, O&P embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan	Perlu ada kebijakan peningkatan O&P irigasi yang meningkat menyesuaikan inflasi Perlu adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan RT FW tentang daerah pertanian yang dimaksud Perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan khususnya kelapa sawit harus membangun embung atau saluran air penampung air hujan utk memenuhi kebutuhan airnya	
3	Penggunaan sumber daya air	- Penggunaan air utk rumah tangga meningkat sesuai penambahan penduduk, PDAM belum mampu memenuhi. - Peningkatan kegiatan O&P untuk mendukung meningkatnya penggunaan air irigasi - Masih kurangnya tenaga listrik untuk keperluan masyarakat	- Peningkatan penggunaan air rumah tangga harus disertai denga peningkatan kegiatan pembangunan dan pembiayaan O&P infrastruktur penyediaan air bersih. - Optimalisasi penggunaan air irigasi harus diikuti dengan peningkatan kegiatan dan pembiayaan O&P irigasi - Tersedianya sumber daya listrik yang terjangkau oleh masyarakat	- Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri (60%) - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi (80%) Pembangunan PLTN dan PLTA (50%)	- Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri (80%) - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi (90%) Pembangunan PLTN dan PLTA (80%)	- Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri (100%) - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi (100%) Pembangunan PLTN dan PLTA (100%)	Perlu ada kebijakan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi pengelola yang menyediakan air rumah tangga perkotaan dan industri secara terpadu. Meningkatkan peran serta masyarakat dan P3A di daerah Memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk pengembangan sumber daya listrik dengan pemanfaatan sumber daya air	Bappeda,BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU/bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
4	Pengembangan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi dan optimalisasi penggunaan air untuk kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri dan irigasi belum dilakukan. - Pengelolaan SDA belum menerapkan konsep kemandirian dalam pengelolaannya dgn memperhitungkan nilai ekonomi dan jasa lingkungan SDA - Transportasi sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang masih dimanfaatkan - Peningkatan Pemanfaatan Rawa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA, khususnya dalam pendayagunaannya harus dilakukan secara optimal, efisien dan efektif - Pengelolaan SDA harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian - Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi sungai harus dijaga - Pengembangan daerah rawa potensial untuk lahan pertanian Pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan dengan subsidi 50% - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari (70%) - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari (70%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari (100%) - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari (100%) - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penggunaan hemat air - Kebijakan pemanfaat air membayar jasa pengelolaan - Kebijakan dalam penentuan jalur pelayaran - Pengaturan RTRW daerah rawa potensial pengembangan budidaya tanaman pangan. 	Bappeda, Dinas Pendapatan/Perekonomian Daerah, Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan, Dinas PU/Bid Pengairan, Prvo. Kab/Kota, PDAM Kab/Kota, BWS
		<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya perikanan air tawar dengan metode keramba banyak dilakukan disungai-sungai dan Danau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya potensi dan pengembangan budidaya ikan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan ikan keramba 	
5	Pengusahaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Ada potensi usaha air kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiapkan peraturan terkait pengusahaan tersebut - Penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda - Pelaksanaan, penegakan peraturan, pemantauan&evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pengendalian debit, retribusi untuk pendapatan daerah dan retribusi untuk konservasi daerah resapan & tangkapan air 	Bappeda, Dinas Pendapatan/Perekonomian Daerah, Dinas Pertambangan, BLHD, Dinas PU/Bid Pengairan, BWS

Tabel 4.3 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Tinggi

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait			
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)					
1	PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR	Banjir S.Batanghari terjadi setiap tahun dan menjadi kejadian yang rutin, lokasi limpasan banjir yang sering terjadi yaitu pada S Batanghari bagian Hulu Menggenangi Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya, S. Batanghari bagian hilir dan tengah menggenangi Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur, S Batang Tembesi menggenangi Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari, S Batang Tebo menggenangi Kab. Tebo dan Kab. Bungo, S Batang Merao menggenangi Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh, S Batang Merangin dan S Batang Tabir menggenangi Kab. Merangin.	Terbebasnya kawasan dari bencana banjir akibat meluapnya sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Alokasi dana untuk pembangunan bangunan sipil teknis untuk mencegah terjadinya banjir	BWS SUMATERA VI			
				Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari, 50%	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari, 100%	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari, 100%	Penetapan kawasan rawan bencana banjir dengan Perda				
				Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai Monitoring dan Evaluasi	Penyebaran informasi tentang banjir				
				Banjir sebagian disebabkan oleh kerusakan DAS di hulu sungai	Di prioritaskan upaya-upaya non teknis dalam pencegahan banjir, antara lain: sistem peringatan dini, pengaturan dataran banjir, konservasi sumber daya air.	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari		Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Menggunakan konsep kesatuan sistem ekologi hidrolis antara badan sungai, sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS)	BWS SUMATERA VI
					Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak		Penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi dibagian hulu dengan pendayagunaan dibagian hilir		
					Pemasangan flood warning system WS Batanghari	Pemasangan flood warning system WS Batanghari	Pemasangan flood warning system WS Batanghari		Penetapan SOP(RTD)		
				Meningkatnya erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	Mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil		mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	Alokasi dana untuk pemeliharaan muara sungai	BWS SUMATERA VI
						Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai, 100%	Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai, 100%		Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai, 100%		
							Pengerukan muara di S. Batanghari		Pengerukan muara di S. Batanghari; Monitoring, Evaluasi, Operasional dan Pemeliharaan		

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait	
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)			
2	PENANGGULANGAN DAYA RUSAK AIR	Diperlukan pemahaman tentang manajemen banjir	Daerah yang rawan bencana banjir siap menghadapi banjir pada periode ulang banjir yang direncanakan	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penegakan hukum dan peraturan yang berlaku khususnya yang menyangkut sempadan sungai	BWS SUMATERA VI	
				Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	SOP dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan banjir		
				Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Penetapan pedoman pemanfaatan lahan di daerah rawan banjir Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan bencana alam/banjir.		
		Menyiapkan penanggulangan darurat bencana akibat banjir	Bencana banjir dapat dijinakkan (dimitigasi) sehingga mngurangi korban akibat banjir	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menyusun perencanaan pengendalian banjir		Koordinasi stakeholder dalam kesiapsiagaan menghadapi banjir Mobilisasi bantuan tanggap darurat Pelibatan peran masyarakat dalam menanggulangi banjir
				Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca			
				Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam); Evaluasi dan monitoring, O & P sistim informasi			
3	PEMULIHAN DAYA RUSAK AIR	Kekurangsiapan dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup setelah terjadi bencana banjir	Fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air dapat dipulihkan kembali	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Penyebaran informasi tentang banjir	BWS SUMATERA VI	
				Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Pelibatan peran masyarakat dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup setelah banjir		
				Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir	Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir	Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir; Monitoring dan Evaluasi serta pemeliharaan			

Tabel 4.4 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Tinggi

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	INFORMASI SDA	Data klimatologi, curah hujan, muka air sungai di tiap DAS sangat terbatas dari sisi panjang/th data, kelengkapan data, kerapatan datanya.	Peningkatan kualitas data	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos hidrologi (60%)	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos hidrologi	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta O & P	Perlu didukung peraturan tentang pentingnya pendataan yang benar dan lengkap terhadap kondisi	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada keterpaduan informasi data antar instansi pengelola data hidrologi serta data dasar lainnya di DAS Batanghari sehingga menyulitkan mengakses data dan informasi yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah.	Perlu wadah atau badan koordinasi informasi data hidrologi dan geohidrologi serta data dasar lainnya antar lembaga/instansi pengelola data terkait sehingga memberikan kemudahan pengaksesan data dan informasi SDA yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan	Penyiapan peraturan terkait koordinasi, pelaksanaan kegiatan Sistem informasi dan penyiapan perangkatnya.	Membangun sistem jaringan informasi dengan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang bentuk badan koordinasi, mekanisme koordinasi, pengaturan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan keterpaduan informasi data	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada data aset sumber daya air terkait dengan kepentingan pengelolaan SDA	Pendataan aset SDA dan pengelolaannya.	Penyiapan peraturan pengelolaan aset, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengelolaan aset SDA	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang pengelolaan aset SDA, usaha pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan	BWS SUM-VI, Dinas PU Prov/Kab/Kota
2	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Jumlah & kerapatan jaringan stasiun pengamatan iklim, curah hujan, Kualitas air, muka air sungai kurang mewakili DAS pada WS Batanghari	Penambahan kuantitas stasiun pengamatan dan peningkatan kemampuan kerja alat.sesuai rasionalisasi jaringan hidrologi	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi (80%)	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi (100%)	Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Adanya kebijakan tentang pentingnya pendataan yang baik dan lengkap terhadap	BWS SUM-VI
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air (SDA)	Disiapkan organisasi dan personil yang handal pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Pusat	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Adanya peraturan organisasi dan personil pengelola sistem informasi secara	BWS SUM-VI

Tabel 4.5 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Tinggi

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	PEMBERDAYAAN	masyarakat banyak yang belum paham mengenai pentingnya menjaga kelestarian SDA	Dikembangkan sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Disiapkan sistim pendidikan yang sesuai, serta dilakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Adanya peraturan mengenai sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Depdiknas
2	PELIBATAN PERAN MASYARAKAT	Dalam pengelolaan SDA di WS, pelibatan peran masyarakat masih sangat minim	Pelibatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan konsrtuksi SDA, Pengawasan SDA, O & P SDA perlu ditingkatkan	Setiap kegiatan pengelolaan SDA harus ada wadah untuk konsultasi publik dengan para stake holder (Pembentukan TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, perlu ada kebijakan tertulis dari lembaga/instansi pengelola SDA untuk memprioritaskan pelibatan masyarakat.	Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BWS SUM VI, Perguruan Tinggi, LSM
		Dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha belum banyak dilibatkan	Dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha perlu dilibatkan dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada masing-masing DAS pada WS Batanghari	Penyiapan peraturan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Adanya peraturan mengenai kewajiban dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada tiap DAS	Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertambangan Pemprov, Pemkab, Bappeda
3	PENGAWASAN	Belum ada mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan SDA	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan SDA oleh seluruh masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan Pengawasan terhadap pengelolaan SDA dengan melibatkan Dewan Sumber Daya Air,TKPSDA mupun Masyarakat	BWS SUMATERA VI, LSM, Perguruan Tinggi, PDAM, Dinas PU Prov/Daerah

Tabel 4.6 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Sedang

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	Hutan Suaka TN Kerinci Seblat dan hutan lindung di hulu S. Batanghari (Kab. Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Solok Selatan) berfungsi sbg daerah recharge dr CAT Bangko Sarolangun, CAT Kayu aro padang aro, CAT Muara Bungo, CAT Solok, CAT Sungai Penuh, Hutan Lindung di Kab. Tebo, Sarolangun, Batanghari (Tengah Sungai Batanghari), sbg daerah recharge CAT Muara Tembesi, CAT Jambi Dumai, Hutan lindung di Kab. Tanjung Jabung Timur/ TN Berbak (Hilir Sungai Batanghari) sbg daerah recharge CAT Jambi Dumai	Untuk mencapai tujuan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, maka keberadaan Hutan Lindung dan Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur perlu dipertahankan penetapannya, direhabilitasi, ditingkatkan upaya pemeliharaan.	Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyanggah maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung - Pembuatan chek dam, embung	- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung - Monitoring dan evaluasi	Selain penetapan status hutan lindung dan hutan suaka/taman nasional oleh pemerintah pusat, perlu didukung oleh peraturan daerah tentang RTRW di tingkat Provinsi dan Kab./Kota yang menetapkan kawasan tsb.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Balai PSDA Prov. BWS Sumatera VI
				- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur - Pembuatan chek dam, embung - Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar		
				Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan,	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar; perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi;		
				Tutupan Hutan lindung dan hutan suaka (taman nasional) telah mencapai 27% dari luas WS Batanghari, namun lokasinya kurang proporsional.	Utk tujuan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, maka perlu diusahakan penambahan luasnya, khususnya untuk hutan lindung di Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur	- Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab.Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur		
Luas DAS Kritis yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.	Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan menjadi DAS yang tidak kritis.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis .	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 50% dari seluruh luas lahan kritis:	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 50% dari seluruh luas lahan kritis; Monitoring dan evaluasi	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 50% dari seluruh luas lahan kritis; Monitoring dan evaluasi	Perlu ada pencaanangan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat Prov., Kab./Kota tentang upaya terpadu untuk pemulihan lahan atau DAS Kritis.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI	
Tingkat erosi lahan pada WS Batanghari masuk dalam katagori sedang, dengan kemiringan lereng bagian hulu antara 2 % sampai dengan 3 % yang disebabkan oleh adanya pengolahan tanah/lahan pertanian, perkebunan dan hutan produksi yang tidak memperhatikan norma konservasi lahan.	Upaya pengendalian erosi lahan sehingga mencapai kategori rendah.	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan - Penegakan hukum	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan - Penegakan hukum	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan - Penegakan hukum - Monitoring dan evaluasi	Penyiapan peraturan daerah tentang teknik pengolahan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI	

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2030) (2010-		
2	Pengawetan air	Terjadi konflik antar sektor, khususnya terhadap perkebunan sawit yang dianggap melenyapkan keberadaan sumber2 air	Mengupayakan dibangunnya embung-embung pada setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan sawit, kebutuhan airnya terpenuhi dan tidak mengganggu keberadaan sumber air di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ttg kebutuhan air tanaman sawit, perbandingan luas lahan dengan volume embung sbg dasar penyusunan - Penyusunan perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Review perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Review perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum - Monitoring & evaluasi 	Penyiapan peraturan daerah di tingkat Prov., Kab./Kota tentang persyaratan membangun embung dgn volume tampungan tertentu sesuai dengan luas lahan kebun sawit yang ditanam	Bappeda,BLHD, Dinas Perkebunan di tingkat Prov., Kab./Kota
		Pengambilan air tanah secara besar-besaran akan mengganggu ekosistem keairan (siklus geohidrologi) di WS Batanghari	Upaya mengendalikan penggunaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum - Monitoring & evaluasi 	Perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Prov., Kab./Kota tentang prioritas penggunaan air permukaan untuk memenuhi semua kebutuhan air di WS Batanghari (seuai UU SDA dan PP 42/2008, ps 26) serta ketentuan dan persyaratan penggunaan air tanah beserta nilai restibusi yang menyertakan beban biaya untuk konservasi SDA	
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian	Pencemaran terjadi pada sungai-sungai yang melalui kota di WS Batanghari yang disebabkan oleh aktivitas PETI, pembuangan limbah rumah tangga.	Upaya pengendalian pencemaran air sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang pengendalian - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, sesuai kondisi - Sosialisasi review perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota (50%) - Penegakan hukum, 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, sesuai kondisi - Sosialisasi Review perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota (50%) - Penegakan hukum, - Monitoring dan Evaluasi 	Peraturan daerah di Tk Prov., Kab./Kota tentang persyaratan air limbah RT, Industri yang boleh dibuang ke badan air serta peraturan tentang golongan atau kelas sungai yang mencerminkan kualitas dan peruntukannya.	BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas PU/Bidang Cipta Karya di Tk Prov., Kab./Kota

Tabel 4.7 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Sedang

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Lembaga/Instansi yang Bertanggung Jawab	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	Penatagunaan sumber daya air	Arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi telah sesuai dengan potensi SDA, kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, keberadaan CAT.	Dalam RTRW Kab/Kota perlu penetapan zona untuk fungsi lindung khususnya pada daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - Upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. - Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya - upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. - Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan 	Perlu ditetapkan zona untuk fungsi lindung di kedua hulu sungai tersebut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2	Penyediaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan - Belum ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi - PDAM hanya melayani air kebutuhan rumah tangga/domestik - Kesulitan air baku utk PDAM karena kualitas dan kuantitas air baku yang menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga/domestik sebesar 80% - Pengembangan pelayanan/peningkatan kapasitas PDAM untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga daerah pedesaan - Pengembangan sistim penyediaan kebutuhan air perkotaan/municipal (taman, gelontor, hidran dll) dan industri secara terpadu - Peningkatan, penyediaan sarana dan prasarana air baku 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk kota yang ada di WS Batanghari - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga dmencapai 80% penduduk pedesaan yang ada di WS Batanghari - Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 100% penduduk kota yang ada di WS Batanghari - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 50% penduduk pedesaan yang ada di WS Batanghari - Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik - Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga mencapai 50% penduduk kota yang ada di WS Batanghari - Evaluasi, Monitoring, O&P Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk kota - Evaluasi, Monitoring, O&P prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada penetapan kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan - Perlu ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi - Perlu ada kebijakan pemerintah utk peningkatan pembangunan (investasi) infrastruktur sarana air bersih untuk RKI - Pengaturan kerjasama antar daerah kekeringan air dan surplus air dlm penyediaan air baku utk RKI. 	Bappeda,BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU/bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Lembaga/Instansi yang Bertanggung Jawab	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penyediaan air irigasi utk lahan eksisting belum optimal karena fungsi bangunan dan jaringan belum - Penyediaan air utk irigasi masih dapat ditingkatkan dengan pengembangan lahan irigasi baru - Penyediaan air untuk perkotaan, industri, perkebunan sawit DLL belum dapat terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikembangkan upaya pemenuhan kebutuhan air perkebunan tanpa mengganggu badan air di wilayahnya. - Terbangunnya daerah irigasi baru di wilayah WS Batanghari 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya dari lahan irigasi potensial - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya sebesar 50% dari potensial lahan irigasi - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya sebesar 50% dari potensial lahan irigasi, evaluasi, monitoring, O&P. - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo (50%) - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan - Evaluasi, Monitoring, O&P embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada kebijakan peningkatan O&P irigasi yang meningkat menyesuaikan inflasi - Perlu adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan RT RW tentang daerah pertanian yang dimaksud - Perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan khususnya kelapa sawit harus membangun embung atau saluran air penampung air hujan utk memenuhi kebutuhan airnya 	
3	Penggunaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan air utk rumah tangga meningkat sesuai pertambahan penduduk, PDAM belum mampu memenuhi. - Peningkatan kegiatan O&P untuk mendukung meningkatnya penggunaan air irigasi - Masih kurangnya tenaga listrik untuk keperluan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan air rumah tangga harus disertai denga peningkatan kegiatan pembangunan dan pembiayaan O&P infrastuktur penyediaan air bersih. - Optimalisasi penggunaan air irigasi harus diikuti dengan peningkatan kegiatan dan pembiayaan O&P irigasi - Tersedianya sumber daya listrik yang terjangkau oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi - Pembangunan PLMH dan PLTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri (50%) - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi (50%) - Pembangunan PLMH dan PLTA (50%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastuktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri (50%) - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi (50%) - Pembangunan PLMH dan PLTA (50%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada kebijakan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi pengelola yang menyediakan air rumah tangga perkotaan dan industri secara terpadu. - Meningkatkan peran serta masyarakat dan P3A di daerah - Memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk pengembangan sumber daya listrik dengan pemanfaatan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU/bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Lembaga/Instansi yang Bertanggung Jawab	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
4	Pengembangan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi dan optimalisasi penggunaan air untuk kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri - Pengelolaan SDA belum menerapkan konsep kemandirian dalam pengelolaannya dgn memperhitungkan nilai ekonomis dan - Transportasi sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang masih - Peningkatan Pemanfaatan Rawa - Budidaya perikanan air tawar dengan metode keramba banyak dilakukan disungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA, khususnya dalam pendayagunaannya harus dilakukan secara optimal, efisien dan efektif - Pengelolaan SDA harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian - Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi sungai harus dijaga - Pengembangan daerah rawa potensial untuk lahan pertanian Pangan. - Terpeliharanya potensi dan pengembangan budidaya ikan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan dengan subsidi 50% - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari (50%) - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari (50%) - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari (50%) - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari (50%) - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penggunaan hemat air - Kebijakan pemanfaat air membayar jasa pengelolaan - Kebijakan dalam penentuan jalur pelayaran - Pengaturan RTRW daerah rawa potensial pengembangan budidaya tanaman pangan. - Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan ikan keramba 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, Dinas Pendapatan/Pereko nomian Daerah, Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan, Dinas PU/Bid Pengairan, Prvo. Kab/Kota, PDAM Kab/Kota, BWS
5	Pengusahaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Ada potensi usaha air kemas 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiapkan peraturan terkait pengusahaan tersebut - Penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda - Pelaksanaan, penegakan peraturan, pemantauan&evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pengendalian debit, retribusi untuk pendapatan daerah dan retribusi untuk konservasi daerah resapan & tangkapan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, Dinas Pendapatan/Pereko nomian Daerah, Dinas Pertambangan, BLHD, Dinas PU/Bid Pengairan, BWS

Tabel 4.8 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Sedang

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait		
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)				
1	PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR	Banjir S.Batanghari terjadi setiap tahun dan menjadi kejadian yang rutin, lokasi limpasan banjir yang sering terjadi yaitu pada S Batanghari bagian Hulu Menggenangi Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya, S. Batanghari bagian hilir dan tengah menggenangi Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur, S Batang Tembesi menggenangi Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari, S Batang Tebo menggenangi Kab. Tebo dan Kab. Bungo, S Batang Merao menggenangi Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh, S Batang Merangin dan S Batang Tabir menggenangi Kab. Merangin.	Terbebasnya kawasan dari bencana banjir akibat meluapnya sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Alokasi dana untuk pembangunan bangunan sipil teknis untuk mencegah terjadinya banjir	BWS SUMATERA VI		
				Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari,	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari, 50%	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari, 50%	Penetapan kawasan rawan bencana banjir dengan Perda			
				Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai Monitoring dan Evaluasi	Penyebaran informasi tentang banjir			
			Banjir sebagian disebabkan oleh kerusakan DAS di hulu sungai	Di prioritaskan upaya-upaya non teknis dalam pencegahan banjir, antara lain: sistem peringatan dini, pengaturan dataran banjir, konservasi sumber daya air.	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Menggunkan konsep kesatuan sistem ekologi hidrolik antara badan sungai, sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS) Penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi dibagian hulu dengan pendayagunaan dibagian hilir	BWS SUMATERA VI
						Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak		
						Pemasangan flood warning system WS Batanghari	Pemasangan flood warning system WS Batanghari	Pemasangan flood warning system WS Batanghari		
			Meningatnya erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	Mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	Alokasi dana untuk pemeliharaan muara sungai	BWS SUMATERA VI
						Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai,	Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai, 50%	Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai, 50%		
							Pengerukan muara di S. Batanghari	Pengerukan muara di S. Batanghari; Monitoring, Evaluasi, Operasional dan Pemeliharaan		

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2030)	Jangka Panjang (2010-2030)		
2	PENANGGULANGAN DAYA RUSAK AIR	Diperlukan pemahaman tentang manajemen banjir	Daerah yang rawan bencana banjir siap menghadapi banjir pada periode ulang banjir yang direncanakan	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penegakan hukum dan peraturan yang berlaku khususnya yang menyangkut sempadan sungai	BWS SUMATERA VI
				Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	SOP dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan banjir	
				Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Penetapan pedoman pemanfaatan lahan di daerah rawan banjir	
							Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan bencana alam/banjir.	
		Menyiapkan penanggulangan darurat bencana akibat banjir	Bencana banjir dapat dijinakkan (dimitigasi) sehingga mngurangi korban akibat banjir	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menyusun perencanaan pengendalian banjir	
				Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Koordinasi stakeholder dalam kesiapsiagaan menghadapi banjir	
				Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam); Evaluasi dan monitoring, O & P sistim informasi	Mobilisasi bantuan tanggap darurat	
							Pelibatan peran masyarakat dalam menanggulangi banjir	
3	PEMULIHAN DAYA RUSAK AIR	Kekurangsian dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup setelah terjadi bencana banjir	Fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air dapat dipulihkan kembali	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Penyebaran informasi tentang banjir	BWS SUMATERA VI
				Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Pelibatan peran masyarakat dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup setelah banjir	
					Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir	Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir; Monitoring dan Evaluasi serta pemeliharaan		

Tabel 4.9 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Sedang

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	INFORMASI SDA	Data klimatologi, curah hujan, muka air sungai di tiap DAS sangat terbatas dari sisi panjang/th data, kelengkapan data, kerapatan datanya.	Peningkatan kualitas data	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta O & P	Perlu didukung peraturan tentang pentingnya pendataan yang benar dan lengkap terhadap kondisi hidrologi dan geohidrologi	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada keterpaduan informasi data antar instansi pengelola data hidrologi serta data dasar lainnya di DAS Batanghari sehingga menyulitkan mengakses data dan informasi yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah.	Perlu wadah atau badan koordinasi informasi data hidrologi dan geohidrologi serta data dasar lainnya antar lembaga/instansi pengelola data terkait sehingga memberikan kemudahan pengaksesan data dan informasi SDA yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan	Penyiapan peraturan terkait koordinasi, pelaksanaan kegiatan Sistem informasi dan penyiapan perangkatnya.	Membangun sistem jaringan informasi dengan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang bentuk badan koordinasi, mekanisme koordinasi, pengaturan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan keterpaduan informasi data	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada data aset sumber daya air terkait dengan kepentingan pengelolaan SDA	Pendataan aset SDA dan pengelolaannya.	Penyiapan peraturan pengelolaan aset, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengelolaan aset SDA	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang pengelolaan aset SDA, usaha pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan pengelolaannya	BWS SUM-VI, Dinas PU Prov/Kab/Kota
2	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Jumlah & kerapatan jaringan stasiun pengamatan iklim, curah hujan, Kualitas air, muka air sungai kurang mewakili DAS pada WS Batanghari	Penambahan kuantitas stasiun pengamatan dan peningkatan kemampuan kerja alat. sesuai rasionalisasi jaringan	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan,	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan,	Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Adanya kebijakan tentang pentingnya pendataan yang baik dan lengkap terhadap kondisi	BWS SUM-VI
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air (SDA)	Disiapkan organisasi dan personil yang handal pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Pusat	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan,	Adanya peraturan organisasi dan personil pengelola sistem informasi secara khusus	BWS SUM-VI

Tabel 4.10 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Sedang

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2015)	(2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	PEMBERDAYAAN	masyarakat banyak yang belum paham mengenai pentingnya menjaga kelestarian SDA	Dikembangkan sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Disiapkan sistim pendidikan yang sesuai, serta dilakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Adanya peraturan mengenai sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Depdiknas
2	PELIBATAN PERAN MASYARAKAT	Dalam pengelolaan SDA di WS, pelibatan peran masyarakat masih sangat minim	Pelibatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan konsrtuksi SDA, Pengawasan SDA, O & P SDA perlu ditingkatkan	Setiap kegiatan pengelolaan SDA harus ada wadah untuk konsultasi publik dengan para stake holder (Pembentukan TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, perlu ada kebijakan tertulis dari lembaga/instansi pengelola SDA untuk memprioritaskan pelibatan masyarakat.	Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BWS SUM VI, Perguruan Tinggi, LSM
		Dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha belum banyak dilibatkan	Dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha perlu dilibatkan dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada masing-masing DAS pada WS Batanghari	Penyiapan peraturan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Adanya peraturan mengenai kewajiban dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada tiap DAS	Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertambangan
3	PENGAWASAN	Belum ada mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan SDA	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan SDA oleh seluruh masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan Pengawasan terhadap pengelolaan SDA dengan melibatkan Dewan Sumber Daya Air,TKPSDA mupun Masyarakat	BWS SUMATERA VI, LSM, Perguruan Tinggi, PDAM, Dinas PU Prov/Daerah

Tabel 4.11 Matrik Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Rendah

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait				
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)						
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	Hutan Suaka TN Kerinci Seblat dan hutan lindung di hulu S. Batanghari (Kab. Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Solok Selatan) berfungsi sbg daerah recharge dr CAT Bangko Sarolangun, CAT Kayu aro padang aro, CAT Muara Bungo, CAT Solok, CAT Sungai Penuh, Hutan Lindung di Kab. Tebo, Sarolangun, Batanghari (Tengah Sungai Batanghari), sbg daerah recharge CAT Muara Tembesi, CAT Jambi Dumai, Hutan lindung di Kab. Tanjung Jabung Timur/ TN Berbak (Hilir Sungai Batanghari) sbg daerah recharge CAT Jambi Dumai	Untuk mencapai tujuan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, maka keberadaan Hutan Lindung dan Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur perlu dipertahankan penetapannya, direhabilitasi, ditingkatkan upaya pemeliharaannya.	Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyangga maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyangga maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	Penetapan kembali hutan lindung dan Taman Nasional juga kawasan penyangga maupun produksi di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur . - Monitoring dan Evaluasi	Selain penetapan status hutan lindung dan hutan suaka/taman nasional oleh pemerintah pusat, perlu didukung oleh peraturan daerah tentang RTRW di tingkat Provinsi dan Kab./Kota yang menetapkan kawasan tsb.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Balai PSDA Prov. BWS Sumatera VI				
				- Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur -Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan	Upaya rehabilitasi hutan di semua Kab/Kota dan pemeliharaan hutan lindung Taman Nasional di Kab. Solok Selatan, Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjab Timur -Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan						
				Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan,	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi	Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar, perambahan hutan dan Monitoring dan evaluasi						
				Tutupan Hutan lindung dan hutan suaka (taman nasional) telah mencapai 27% dari luas WS Batanghari, namun lokasinya kurang proporsional.	Utk tujuan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, maka perlu diusahakan penambahan luasnya, khususnya untuk hutan lindung di Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur	- Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab.Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur			- Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab.Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur	- Penambahan luasan dari hutan lindung di Kab.Kab.Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur - Evaluasi dan monitoring	Perlu didukung peraturan daerah tentang RTRW di tingkat Provinsi dan Kab./Kota yang menetapkan adanya penambahan luas kawasan hutan lindung atau hutan suaka pada lokasi tsb.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
				Luas DAS Kritis yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.	Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan menjadi DAS yang tidak kritis.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 30% dari seluruh luas lahan kritis:			Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 30% dari seluruh luas lahan kritis:	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan target 30% dari seluruh luas lahan kritis: - Evaluasi dan monitoring	Perlu ada pencanangan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat Prov., Kab./Kota tentang upaya terpadu untuk pemulihan lahan atau DAS Kritis.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
	Tingkat erosi lahan pada WS Batanghari masuk dalam katagori sedang, dengan kemiringan lereng bagian hulu antara 2 % sampai dengan 3 % yang disebabkan oleh adanya pengolahan tanah/lahan pertanian, perkebunan dan hutan produksi yang tidak memperhatikan norma konservasi lahan.	Upaya pengendalian erosi lahan sehingga mencapai kategori rendah.	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan - Penegakan hukum	- Menyusun perda pengaturan pengolahan lahan, - Bantuan teknik utk pelaksanaan pengolahan lahan Penegakan hukum - Monitoring dan evaluasi	Penyiapan peraturan daerah tentang teknik	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI					

Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
2	Pengawetan air	Terjadi konflik antar sektor, khususnya terhadap perkebunan sawit yang dianggap menyempitkan keberadaan sumber2 air	Mengupayakan dibangunnya embung-embung pada setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan sawit, kebutuhan airnya terpenuhi dan tidak mengganggu keberadaan sumber air di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ttg kebutuhan air tanaman sawit, perbandingan luas lahan dengan volume embung sbg dasar penyusunan naskah akemis perda. - Penyusunan perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ttg kebutuhan air tanaman sawit, perbandingan luas lahan dengan volume embung sbg dasar penyusunan naskah akemis perda. - Penyusunan perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ttg kebutuhan air tanaman sawit, perbandingan luas lahan dengan volume embung sbg dasar penyusunan naskah akemis perda. - Penyusunan perda ttg keharusan membangun embung pd kawasan perkebunan sawit - Sosialisasi perda - Bantuan teknis sbg realisasi pelaksanaan perda - Monitoring & evaluasi 	Penyiapan peraturan daerah di tingkat Prov., Kab./Kota tentang persyaratan membangun embung dgn volume tampungan tertentu sesuai dengan luas lahan kebun sawit yang ditanam	Bappeda,BLHD, Dinas Perkebunan di tingkat Prov., Kab./Kota
		Pengambilan air tanah secara besar-besaran akan mengganggu ekosistem keairan (siklus geohidrologi) di WS Batanghari	Upaya mengendalikan penggunaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air tanah, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang penggunaan air - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Penegakan hukum - Monitoring & evaluasi 	Perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Prov., Kab./Kota tentang prioritas penggunaan air permukaan untuk memenuhi semua kebutuhan air di WS Batanghari (seuai UU SDA dan PP 42/2008, ps 26) serta ketentuan dan persyaratan penggunaan air tanah beserta nilai restibusi yang menyertakan beban biaya untuk konservasi SDA	
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Pencemaran terjadi pada sungai-sungai yang melalui kota di WS Batanghari yang disebabkan oleh aktivitas PETI, pembuangan limbah rumah tangga.	Upaya pengendalian pencemaran air sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota - Penegakan hukum, 	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau, mereview dan menyusun peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran sungai, - Sosialisasi perda - Bantuan teknis realisasi pelaksanaan perda - Pembangunan stasiun pemantau kualitas air di hulu, pusat kota dan di hilir kota-kota di Prov./Kab./Kota - Penegakan hukum, - Monitoring dan Evaluasi 	Peraturan daerah di Tk Prov., Kab./Kota tentang persyaratan air limbah RT, Industri yang boleh dibuang ke badan air serta peraturan tentang golongan atau kelas sungai yang mencerminkan kualitas dan peruntukannya.	BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas PU/Bidang Cipta Karya di Tk Prov., Kab./Kota

Tabel 4.12 Matrik Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Rendah

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	Penatagunaan sumber daya air	Arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi telah sesuai dengan potensi SDA, kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, keberadaan CAT.	Dalam RTRW Kab/Kota perlu penetapan zona untuk fungsi lindung khususnya pada daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya Upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan pengembangan (penambahan luas) hutan lindung di hulu S Batang Merao Kab. Kerinci, S Batang Merangin Kab. Merangin, S Batang Tembesi Kab. Sarolangun, S Batang Tabir Kab, Merangin, S Batang Bungo S Batang Tebo Kab. Bungo, S Batanghari Kab. Solok,Sijunjung, Dharmasraya upaya rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan lindung taman nasional. Upaya penegakan hukum thd pembalakan liar dan perambahan hutan Monitoring dan evaluasi 	Perlu ditetapkan zona untuk fungsi lindung di kedua hulu sungai tersebut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten.	Bappeda, Dinas PU Tata Ruang, BP DAS, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2	Penyediaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan Belum ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi PDAM hanya melayani penyediaan kebutuhan rumah tangga/domestik Kesulitan air baku utk PDAM karena kualitas dan kuantitas air baku yang menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga/domestik sebesar 80% Pengembangan pelayanan/peningkatan kapasitas PDAM untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga daerah pedesaan Pengembangan sistim penyediaan kebutuhan air perkotaan/municipal (taman, gelontor, hidran dll) dan industri secara terpadu Peningkatan, penyediaan sarana dan prasarana air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga yang ada di WS Batanghari Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga yang ada di WS Batanghari Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga yang ada di WS Batanghari Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga yang ada di WS Batanghari Peningkatan dana pembangunan intake air baku serta dana O&P penyediaan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan zona penyediaan SDA, khususnya utk kebutuhan air rumah tangga/domestik Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga yang ada di WS Batanghari Evaluasi, Monitoring, O&P Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk kota Evaluasi, Monitoring, O&P prasarana dan sarana penyediaan air bersih/rumah tangga penduduk pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ada penetapan kebijakan pendayagunaan SDA utk mengutamakan air permukaan Perlu ada kebijakan yg menetapkan urutan prioritas utama utk kebutuhan pokok sehari-hari, berikutnya irigasi Perlu ada kebijakan pemerintah utk peningkatan pembangunan (investasi) infrastruktur sarana air bersih untuk RKI Pengaturan kerjasama antar daerah kekeringan air dan surplus air dim penyediaan air baku utk RKI. 	Bappeda,BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU / bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penyediaan air irigasi utk lahan eksisting belum optimal karena fungsi bangunan dan jaringan belum optimal - Penyediaan air utk irigasi masih dapat ditingkatkan dengan pengembangan lahan irigasi baru - Penyediaan air untuk perkotaan, industri, perkebunan sawit DLL belum dapat terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikembangkan upaya pemenuhan kebutuhan air perkebunan tanpa mengganggu badan air di wilayahnya. - Terbangunnya daerah irigasi baru di wilayah WS Batanghari 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya pada lahan irigasi potensial - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya pada lahan irigasi potensial - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan irigasi baru dgn pembangunan infrastrukturnya pada lahan irigasi potensial - Pembangunan DI Batang Asai Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pengembangan DI Batanghari Kab. Dharmasraya Kab. Bungo - Pembangunan embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan - Evaluasi, Monitoring, O&P embung atau saluran air penampung air hujan pada setiap luasan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada kebijakan peningkatan O&P irigasi yang meningkat menyesuaikan inflasi - Perlu adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan RT RW tentang daerah pertanian yang dimaksud - Perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa setiap luasan tertentu dari lahan perkebunan khususnya kelapa sawit harus membangun embung atau saluran air penampung air hujan utk memenuhi kebutuhan airnya 	
3	Penggunaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan air utk rumah tangga meningkat sesuai pertambahan penduduk, PDAM belum mampu memenuhi. - Peningkatan kegiatan O&P untuk mendukung meningkatnya penggunaan air irigasi - Masih kurangnya tenaga listrik untuk keperluan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan air rumah tangga harus disertai denga peningkatan kegiatan pembangunan dan pembiayaan O&P infrastruktur penyediaan air bersih. - Optimalisasi penggunaan air irigasi harus diikuti dengan peningkatan kegiatan dan pembiayaan O&P irigasi - Tersedianya sumber daya listrik yang terjangkau oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastruktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri. - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi - Pembangunan PLMH dan PLTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastruktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri. - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi - Pembangunan PLMH dan PLTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P infrastruktur utk penggunaan air rumah tangga, air perkotaan dan industri. - Peningkatan pembiayaan dan kegiatan O&P irigasi - Pembangunan PLMH dan PLTA 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada kebijakan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi pengelola yang menyediakan air rumah tangga perkotaan dan industri secara terpadu. - Meningkatkan peran serta masyarakat dan P3A di daerah - Memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk pengembangan sumber daya listrik dengan pemanfaatan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, BLHD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PU/bid Cipta karya di Tk Prov., Kab./Kota, PDAM Kab/Kota, Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian PU, Direktorat Jenderal SDA, BWS.

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
4	Pengembangan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi dan optimalisasi penggunaan air untuk kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri dan irigasi belum dilakukan. - Pengelolaan SDA belum menerapkan konsep kemandirian dalam pengelolaannya dgn memperhitungkan nilai ekonomi dan jasa pengelolaan SDA - Transportasi sungai merupakan salah satu sarana transportasi yang masih dimanfaatkan - Peningkatan Pemanfaatan Rawa - Budidaya perikanan air tawar dengan metode keramba banyak dilakukan disungai-sungai dan Danau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA, khususnya dalam pendayagunaannya harus dilakukan secara optimal, efisien dan efektif - Pengelolaan SDA harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian - Pengelolaan dan pengembangan saran prasarana transportasi sungai harus dijaga - Pengembangan daerah rawa potensial untuk lahan pertanian Pangan. - Terpeliharanya potensi dan pengembangan budidaya ikan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan dengan subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengalokasikan air secara terpadu - Pemanfaat air membayar jasa pengelolaan tanpa subsidi - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan prasarana persungai di tiap kabupaten/kota di WS Batanghari - Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana daerah rawa lebak maupun rawa pasang surut di tiap kab./kota di WS Batanghari - Terpelihara dan terjaganya mutu / kualitas air untuk pengembangan ikan keramba di Danau Kerinci, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Sipin, Danau Teluk, Sungai Batanghari. - Pelaksanaan, Evaluasi, Monitoring dan O & P 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penggunaan hemat air - Kebijakan pemanfaat air membayar jasa pengelolaan - Kebijakan dalam penentuan jalur pelayaran - Pengaturan RTRW daerah rawa potensial pengembangan budidaya tanaman pangan. - Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan ikan keramba 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, Dinas Pendapatan/Perekonomian Daerah, Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan, Dinas PU/Bid Pengairan, Prvo. Kab/Kota, PDAM Kab/Kota, BWS
5	Pengusahaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Ada potensi usaha air kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiapkan peraturan terkait pengusahaan tersebut - Penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria bagian SDA yang dapat dilakukan pengusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. - Penyiapan perturan - Menetapkan peraturan menjadi Perda - Pelaksanaan, penegakan peraturan, pemantauan&evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pengendalian debit, retribusi untuk pendapatan daerah dan retribusi untuk konservasi daerah resapan & tangkapan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda, Dinas Pendapatan/Perekonomian Daerah, Dinas Pertambangan, BLHD, Dinas PU/Bid Pengairan, BWS

Tabel 4.13 Matrik Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Rendah

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait			
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)					
1	PENCEGAHAN DAYA RUSAK AIR	Banjir S.Batanghari terjadi setiap tahun dan menjadi kejadian yang rutin, lokasi limpasan banjir yang sering terjadi yaitu pada S Batanghari bagian Hulu Menggenangi Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya, S. Batanghari bagian hilir dan tengah menggenangi Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur, S Batang Tembesi menggenangi Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari, S Batang Tebo menggenangi Kab. Tebo dan Kab. Bungo, S Batang Merao menggenangi Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh, S Batang Merangin dan S Batang Tabir menggenangi Kab. Merangin.	Terbebasnya kawasan dari bencana banjir akibat meluapnya sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Pembangunan bangunan penahan tebing dan pengendali erosi antara lain. ground sill, revetment, retaining wall, tanggul di sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Merangin dan sungai-sungai kecil lainnya.	Alokasi dana untuk pembangunan bangunan sipil teknis untuk mencegah terjadinya banjir	BWS SUMATERA VI			
				Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari,	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari,	Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di WS Batanghari,	Penetapan kawasan rawan bencana banjir dengan Perda				
				Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai	Normalisasi sungai-sungai Monitoring dan Evaluasi	Penyebaran informasi tentang banjir				
							Pelibatan peran masyarakat dalam menghadapi banjir				
				Banjir sebagian disebabkan oleh kerusakan DAS di hulu sungai	Di prioritaskan upaya-upaya non teknis dalam pencegahan banjir, antara lain: sistem peringatan dini, pengaturan dataran banjir, konservasi sumber daya air.	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari		Reboisasi dan penghijauan DAS/Konservasi hutan di hulu, tengah dan hilir WS Batanghari	Menggunakan konsep kesatuan sistem ekologi hidrolik antara badan sungai, sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS)	BWS SUMATERA VI
						Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak		Meningkatkan kapasitas retensi sepanjang alur (sempadan) sungai dengan menaturalisasi sempadan sungai yang rusak	Penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi dibagian hulu dengan pendavagunaan Penetapan SOP(RTD)	
						Pemasangan flood warning system WS Batanghari	Pemasangan flood warning system WS Batanghari		Pemasangan flood warning system WS Batanghari		
				Meningatnya erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	Mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi di muara S. Batanghari	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil		mengurangi laju / tingkat erosi dengan pendekatan bangunan teknik sipil	Alokasi dana untuk pemeliharaan muara sungai	BWS SUMATERA VI
						Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai.	Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai.		Pembangunan pengaman / perkuatan tebing sungai.		
	Pengerukan muara di S. Batanghari	Pengerukan muara di S. Batanghari; Monitoring, Evaluasi, Operasional dan Pemeliharaan									

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Kegiatan	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi yang Terkait	
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)			
2	PENANGGULANGAN DAYA RUSAK AIR	Diperlukan pemahaman tentang manajemen banjir	Daerah yang rawan bencana banjir siap menghadapi banjir pada periode ulang banjir yang direncanakan	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penyusunan Jambi Flood Control untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kota Jambi	Penegakan hukum dan peraturan yang berlaku khususnya yang menyangkut sempadan sungai	BWS SUMATERA VI	
				Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	Penyusunan peta resiko banjir (flood hazard map) untuk daerah rawan banjir	SOP dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan banjir		
				Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Pembuatan sistem peringatan dini datangnya banjir dan sistem informasi tentang banjir	Penetapan pedoman pemanfaatan lahan di daerah rawan banjir Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan bencana alam/banjir.		
		Menyiapkan penanggulangan darurat bencana akibat banjir	Bencana banjir dapat dijinakkan (dimitigasi) sehingga mngurangi korban akibat banjir	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menampung debit banjir dengan meningkatkan kapasitas bangunan pelimpah banjir, kolam retensi, saluran pengalih dsb	Menyusun perencanaan pengendalian banjir		Kooordinasi stakeholder dalam kesiapsiagaan menghadapi banjir Mobilisasi bantuan tanggap darurat Pelibatan peran masyarakat dalam menanggulangi banjir
				Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca	Mengurangi debit banjir dengan pembangunan bangunan-bangunan prasarana pengendali banjir misal: waduk, bendungan, areal parkir air sementara, sumur resapan, reboisasi dan modifikasi cuaca			
				Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam)	Mengendalikan erosi dan sedimentasi akibat dari banjir sesuai dengan lokasinya, yaitu dilereng bukit (dengan sistem teras, saluran di lereng dan penanaman segaris) atau di sungai (dengan pembangunan revetment, check dam); Evaluasi dan monitoring, O & P sistim informasi			
3	PEMULIHAN DAYA RUSAK AIR	Kekurangsiaan dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup setelah terjadi bencana banjir	Fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air dapat dipulihkan kembali	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Melaksanakan restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup	Penyebaran informasi tentang b	BWS SUMATERA VI	
				Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Merehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir sesuai dengan sandar yang berlaku	Pelibatan peran masyarakat dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup setelah banjir		
				Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir	Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir	Merekonstruksi/memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari banjir; Monitoring dan Evaluasi serta pemeliharaan			

Tabel 4.14 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

Skenario Ekonomi Rendah

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

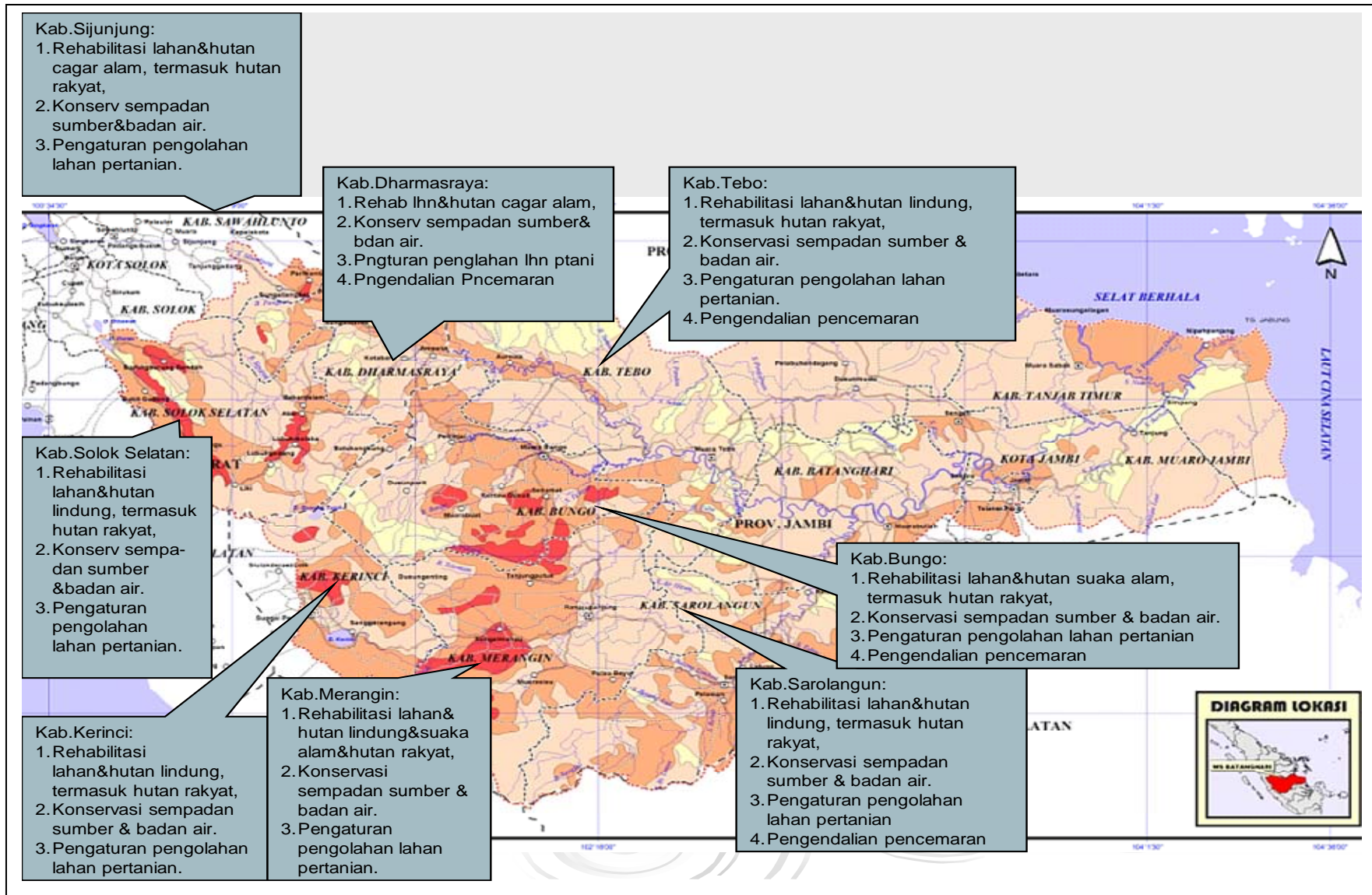
No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	INFORMASI SDA	Data klimatologi, curah hujan, muka air sungai di tiap DAS sangat terbatas dari sisi panjang/th data, kelengkapan data, kerapatan datanya.	Peningkatan kualitas data	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos hidrologi (60%)	Pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta membangun stasiun hidrologi sesuai hasil rasionalisasi pos	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta O & P	Perlu didukung peraturan tentang pentingnya pendataan yang benar dan lengkap terhadap kondisi	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada keterpaduan informasi data antar instansi pengelola data hidrologi serta data dasar lainnya di DAS Batanghari sehingga menyulitkan mengakses data dan informasi yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah.	Perlu wadah atau badan koordinasi informasi data hidrologi dan geohidrologi serta data dasar lainnya antar lembaga/instansi pengelola data terkait sehingga memberikan kemudahan pengaksesan data dan informasi SDA yang akurat, tepat waktu dan berkelanjutan	Penyiapan peraturan terkait koordinasi, pelaksanaan kegiatan Sistem informasi dan penyiapan perangkatnya.	Membangun sistem jaringan informasi dengan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang bentuk badan koordinasi, mekanisme koordinasi, pengaturan pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan keterpaduan	BWS SUM-VI, BMG, BPDAS, Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Pertanian
		Belum ada data aset sumber daya air terkait dengan kepentingan pengelolaan SDA	Pendataan aset SDA dan pengelolaannya.	Penyiapan peraturan pengelolaan aset, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengelolaan aset SDA	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan pengelolaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Diperlukan peraturan tentang pengelolaan aset SDA, usaha pemantauan dan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan pengelolaannya	BWS SUM-VI, Dinas PU Prov/Kab/Kota
2	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI	Jumlah & kerapatan jaringan stasiun pengamatan iklim, curah hujan, Kualitas air, muka air sungai kurang mewakili DAS pada WS Batanghari	Penambahan kuantitas stasiun pengamatan dan peningkatan kemampuan kerja alat. sesuai rasionalisasi jaringan hidrologi	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi (80%)	Pengadaan stasiun pengamatan curah hujan, stasiun kualitas air, muka air sungai, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi (100%)	Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset SDA, pemantauan dan evaluasi	Adanya kebijakan tentang pentingnya pendataan yang baik dan lengkap terhadap	BWS SUM-VI
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air (SDA)	Disiapkan organisasi dan personil yang handal pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Pusat	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan pelatihan.	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan, pendidikan dan	Penyiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan & evaluasi melalui perekrutan,	Adanya peraturan organisasi dan personil pengelola sistem informasi secara khusus	BWS SUM-VI

Tabel 4.15 Tabel Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari

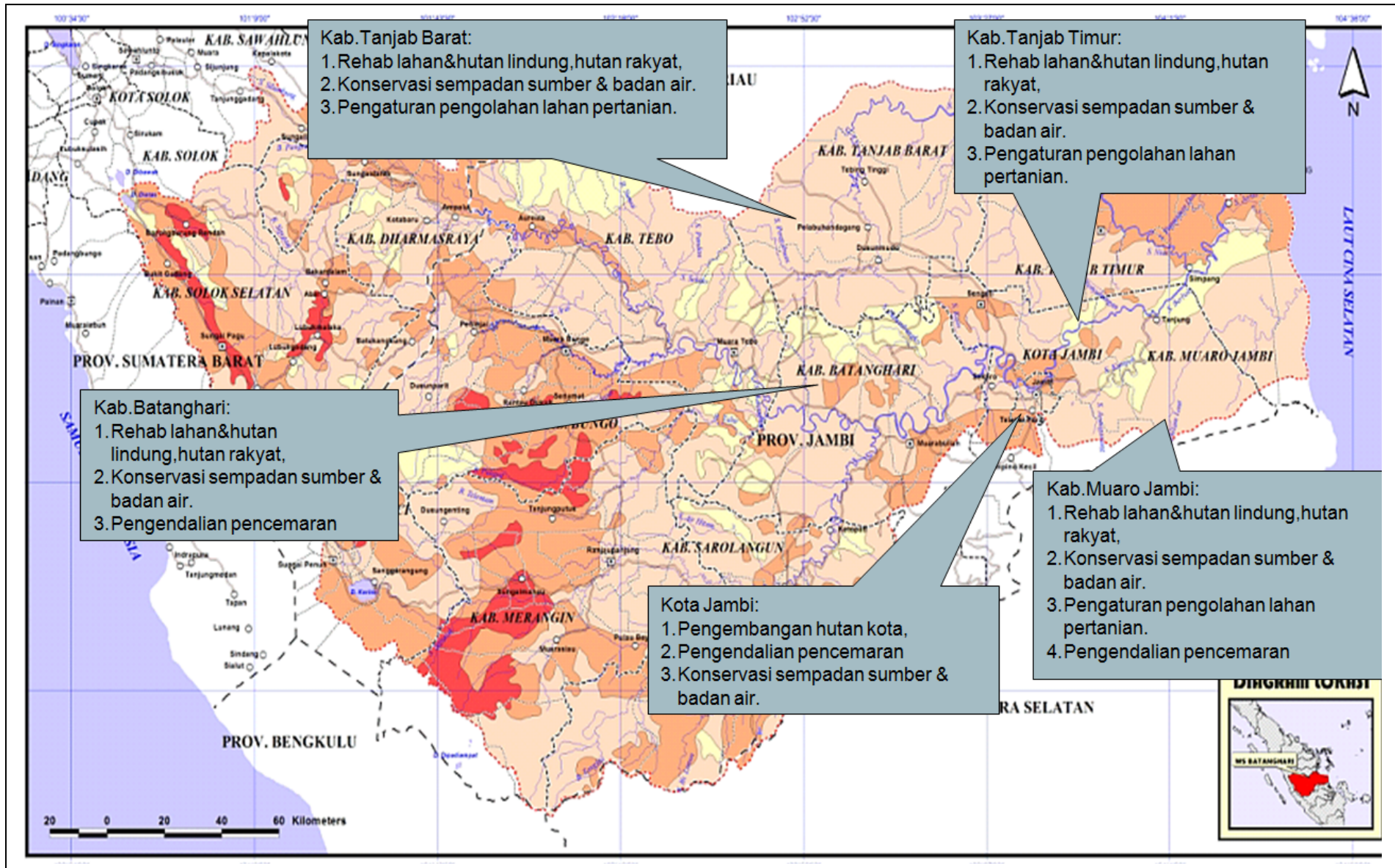
Skenario Ekonomi Rendah

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat

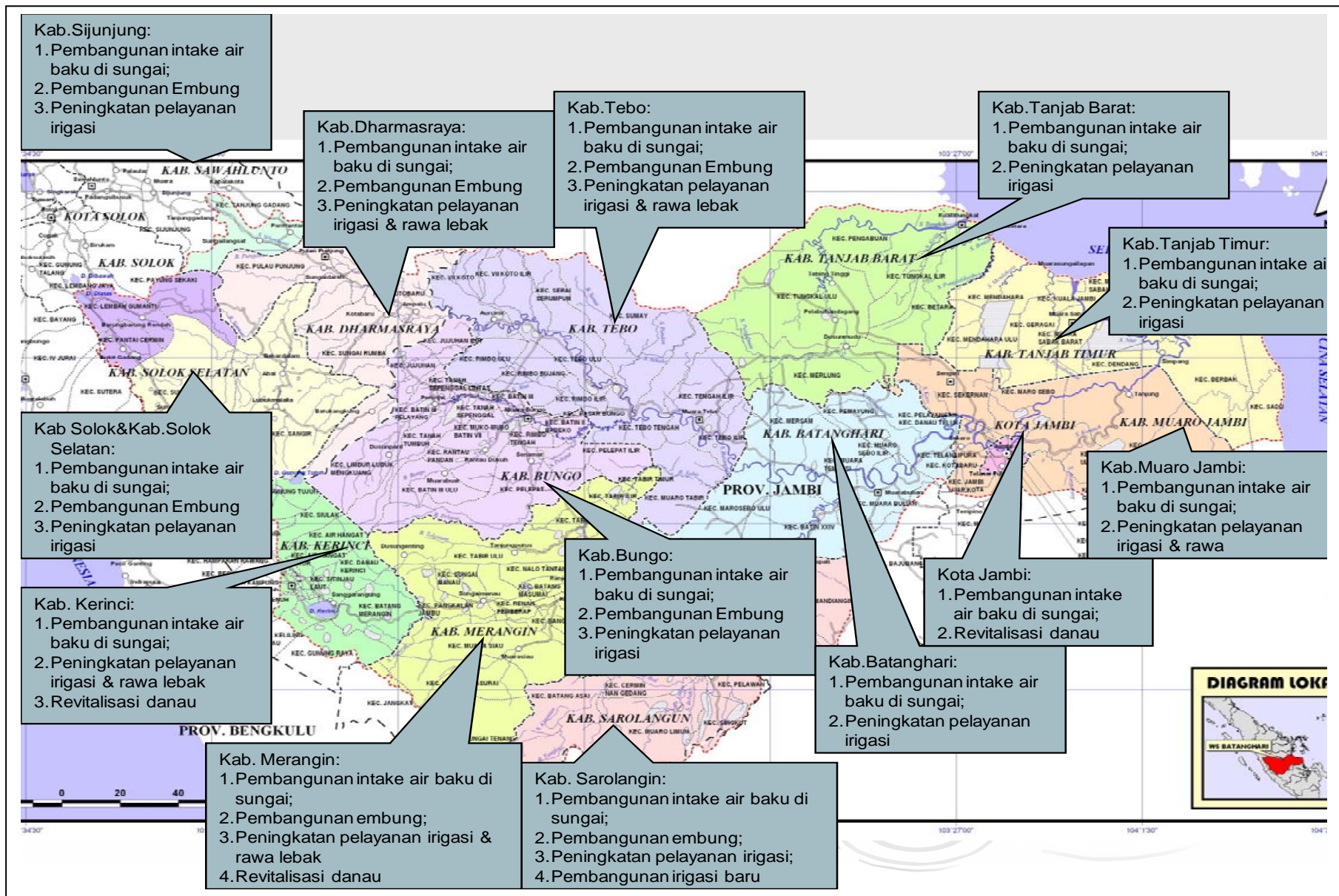
No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/Target yang ingin dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi yang Terkait
				Jangka Pendek (2010-2015)	Jangka Menengah (2010-2020)	Jangka Panjang (2010-2030)		
1	PEMBERDAYAAN	masyarakat banyak yang belum paham mengenai pentingnya menjaga kelestarian SDA	Dikembangkan sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Disiapkan sistim pendidikan yang sesuai, serta dilakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Pelaksanaan, pemantauan & evaluasi serta usaha peningkatannya	Adanya peraturan mengenai sistem pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan alam lingkungannya	Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Depdiknas
2	PELIBATAN PERAN MASYARAKAT	Dalam pengelolaan SDA di WS, pelibatan peran masyarakat masih sangat minim	Pelibatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan konsrtuksi SDA, Pengawasan SDA, O & P SDA perlu ditingkatkan	Setiap kegiatan pengelolaan SDA harus ada wadah untuk konsultasi publik dengan para stake holder (Pembentukan TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan intensitas konsultasi antar publik dan stake holder (TKPSDA)	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, perlu ada kebijakan tertulis dari lembaga/instansi pengelola SDA untuk memprioritaskan pelibatan masyarakat.	Dinas PU Prov/Kab/Kota, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, BWS SUM VI, Perguruan Tinggi, LSM
		Dunia usaha/badan usaha menggunakan/me manfaatkan air sebagai komoditi usaha belum banyak dilibatkan	Dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha perlu dilibatkan dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada masing-masing DAS pada WS Batanghari	Penyiapan peraturan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta usaha peningkatan peran dunia usaha	Adanya peraturan mengenai kewajiban dunia usaha/badan usaha yg menggunakan/memanfaatkan air sebagai komoditi usaha dalam proses pemulihan keairan, konservasi SDA pada tiap DAS	Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertambangan Pemprov, Pemkab, Bappeda
3	PENGAWASAN	Belum ada mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan SDA	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan SDA oleh seluruh masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Pemantauan dan pengawasan masyarakat	Adanya peraturan perundangan yang menetapkan Pengawasan terhadap pengelolaan SDA dengan melibatkan Dewan Sumber Daya Air,TKPSDA maupun Masyarakat	BWS SUMATERA VI, LSM, Perguruan Tinggi, PDAM, Dinas PU Prov/Daerah



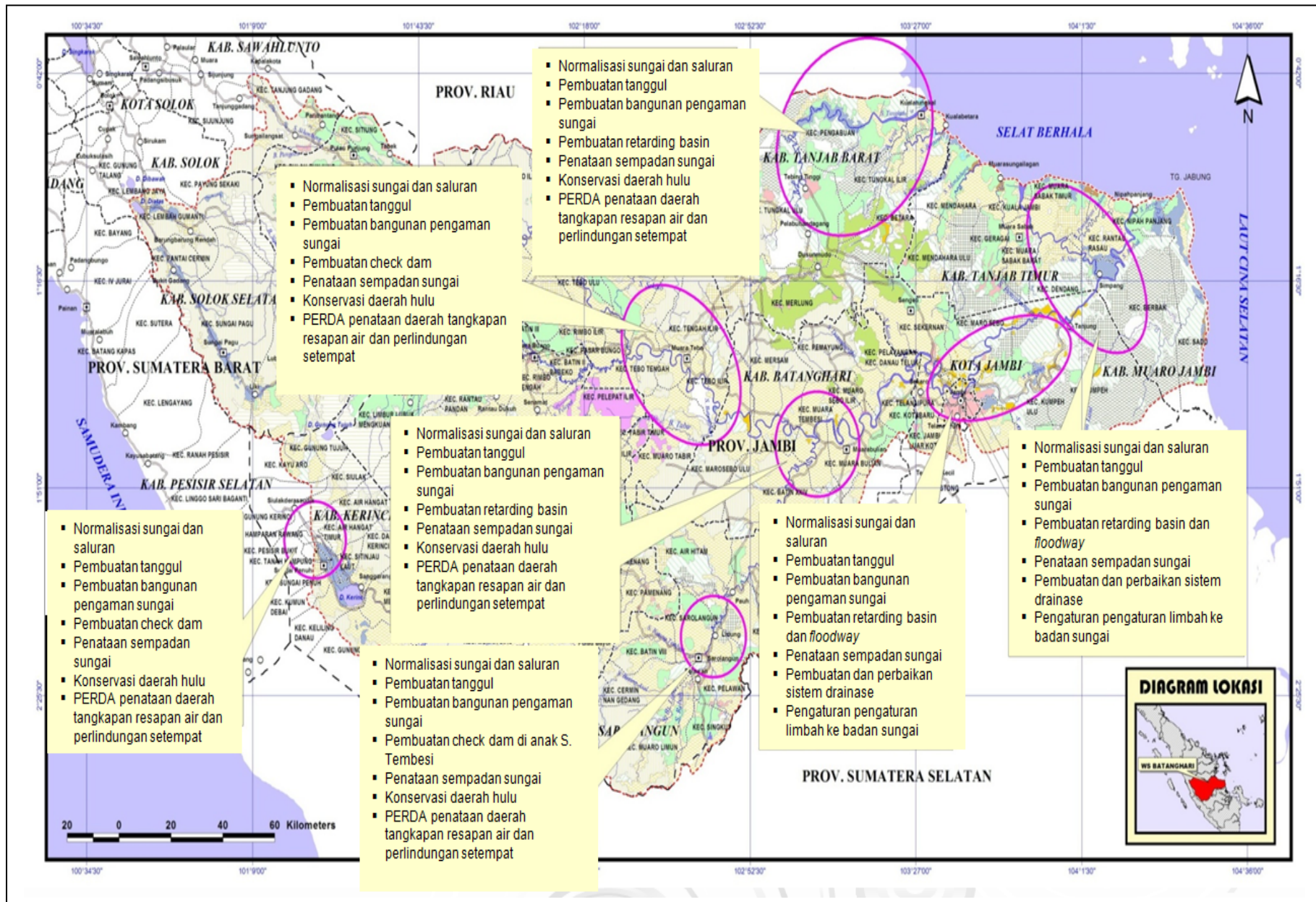
Gambar 4.1 Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari Aspek Konservasi Sumber Daya Air



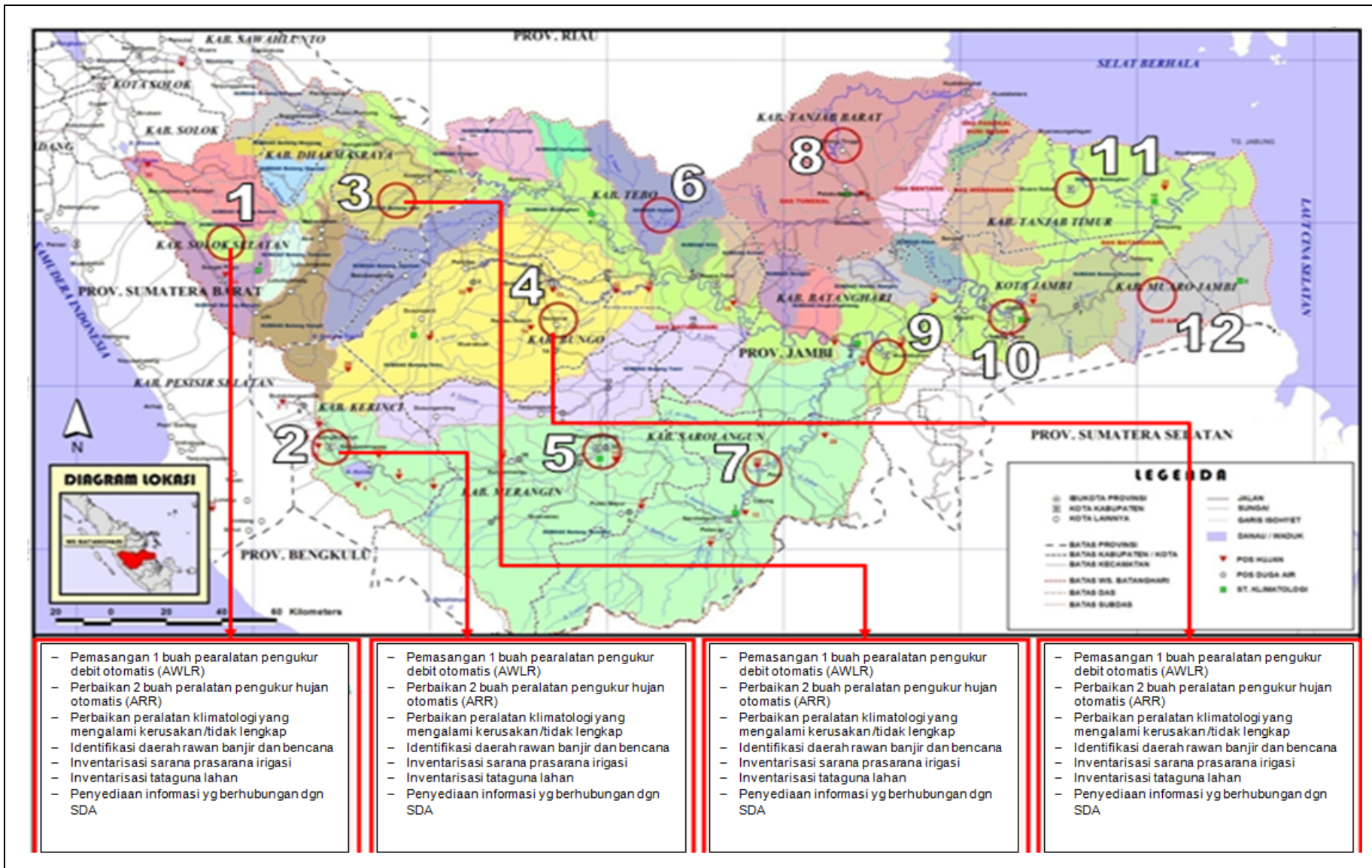
Gambar 4.2. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari Aspek Konservasi Sumber Daya Air (lanjutan)



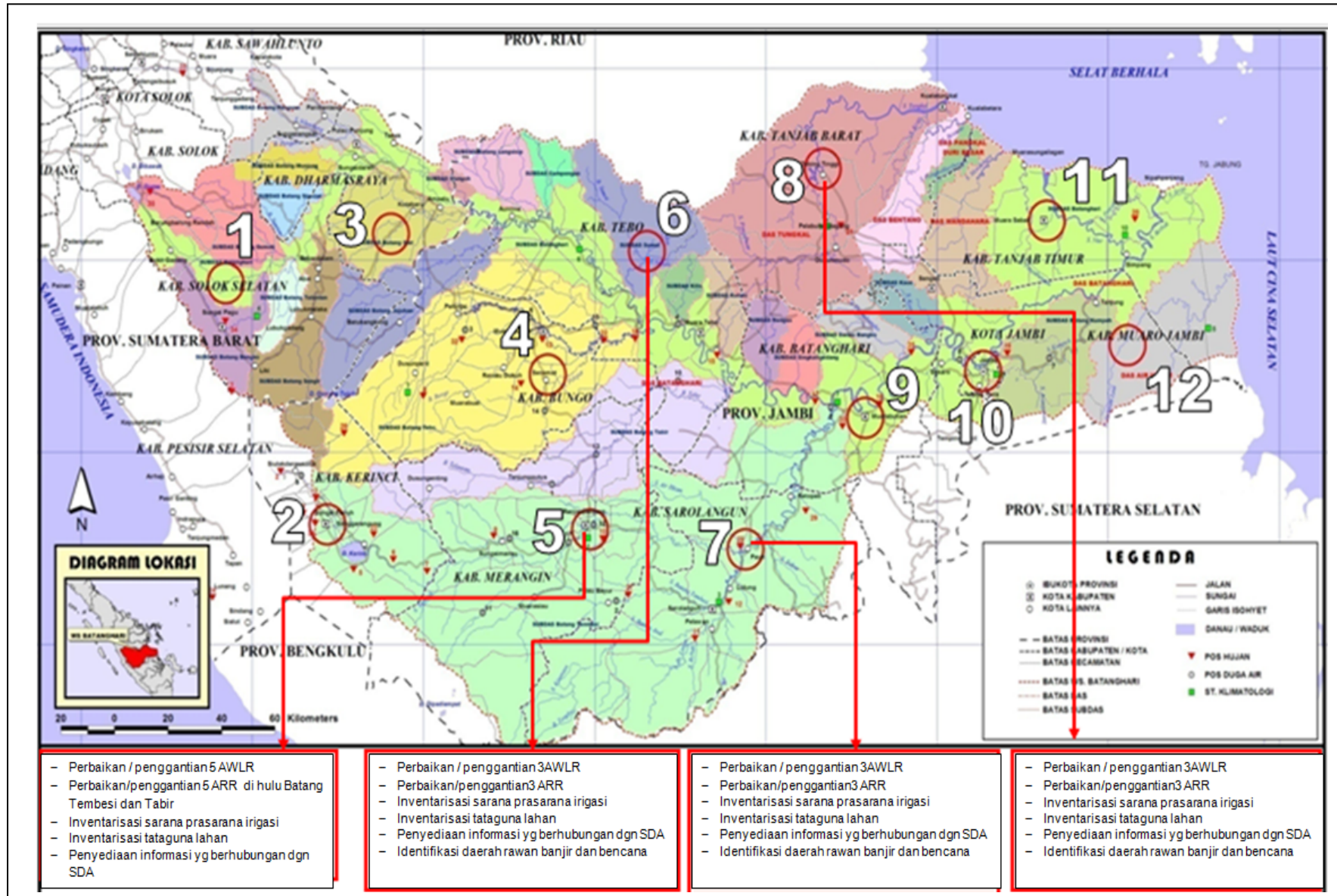
Gambar 4.3. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air)



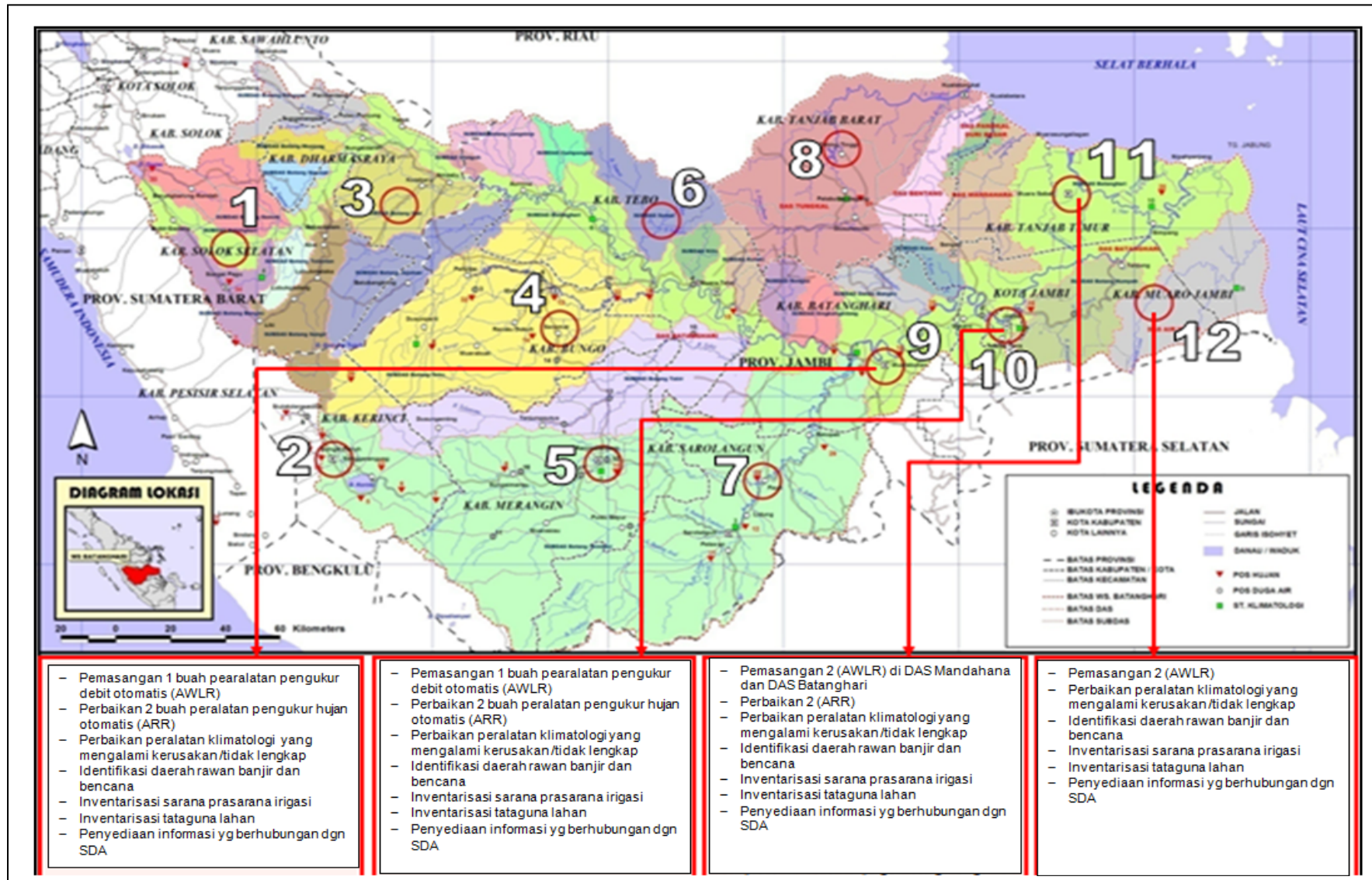
Gambar 4.4. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Pengendalian Daya Rusak Air)



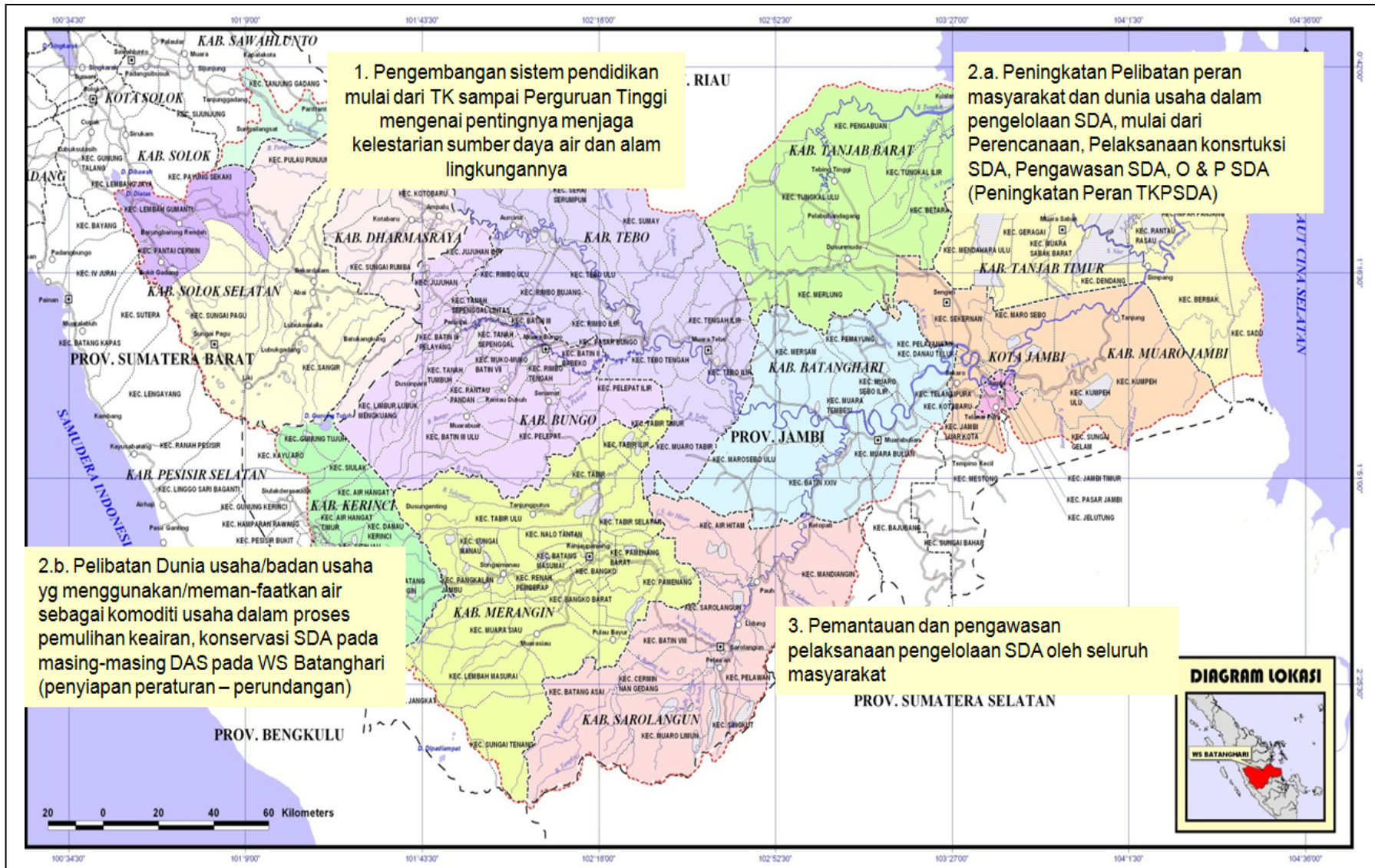
Gambar 4.5. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air)



Gambar 4.6. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air (Lanjutan 1))



Gambar 4.7. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air (Lanjutan 2))



Gambar 4.8. Peta Tematik Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari (Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha)